

TOP 99

INOVASI PELAYANAN PUBLIK INDONESIA

*INDONESIA PUBLIC SERVICE
INNOVATIONS 2015*

TAHUN 2015



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

*MINISTRY OF OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA*

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015

Top 99 Indonesia Public Service Innovations 2015

Copy Right :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-602-71510-3-1

Cetakan 1 - Mei 2015

Diterbitkan oleh :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jln. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta 12190

Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

TOP 99

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK
INDONESIA**

*INDONESIA PUBLIC SERVICE
INNOVATIONS 2015*

TAHUN 2015

For Information: Please contact Sri Hartini,
phone number, +6221 7398355, Fax. +6221 7398401
email tu.yanlik@menpan.go.id, sri_hartinie@yahoo.com



Kata Pengantar

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku **“Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015”**. Penerbitan buku ini merupakan arahan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Dr. Yuddy Chrisnandi, MM, sebagai salah satu apresiasi beliau terhadap pelaksanaan program **“One Agency, One Innovation”** melalui pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015.

Buku ini berisi 99 inovasi pelayanan publik 2015 terbaik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Tahun 2015. Inovasi pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 09 Tahun 2014 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ada perbedaan antara Buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dengan Buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. Buku Top 99 tahun ini, dibedakan antara Kementerian dan Lembaga; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dan penerbitan buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. Kepada semua inovator Top 99 saya sampaikan apresiasi dan berharap terus menciptakan inovasi pelayanan publik.

Saya berharap inovasi yang sudah ada terus diperbaiki dan berkelanjutan, serta direplikasi oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik,

Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc., C.Fr.A., CA



Foreword

Deputy of Public Service

*My gratitude goes to God The Almighty on the publication of book “Top 99 Public Service Innovation 2015”. This book is a direct directive of Minister of Administrative and Bureaucratic Reform, Dr. Yuddy Chrisnandi, MM, as one of his appreciation towards the implementation of the “**One Agency, One Innovation**” program through the implementation of the Public Service Innovation Competition in 2015.*

This book contains 99 best innovations of public service in 2015 conducted by the Ministry/ Institution, the Provincial Government, Regency Government, and City Government Year 2015. Innovation of public service refers to the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation Number 30 Year 2014 about Guidelines for Public Service Innovation and Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Circulation Letter Number 09 Year 2014 about Public Service Innovation Competition 2015 within the Ministry/Agencies and Local Government.

There is a difference between the book Top 99 Public Service Innovation 2014 Book with the Top 99 Public Service Innovation 2015 Book. In this year, the Top 99 Book categorizes it into the Ministry, the Agency; Provincial Government; Regency Government and City Government.

On this auspicious occasion, I would like to thank all those who have helped to smooth the implementation of the Public Service Innovation Competition 2015 and the publication of the Top 99 Public Service Innovation Year 2015 Book. To all the Top 99 innovators, I convey my appreciation and also expectation to continue making public services innovation.

I hope the innovations that already exist continue to be improved and sustained, and also replicated by other units of public service providers.

Deputy of Public Service,

Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc., C.Fr.A., CA



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sambutan



Pelayanan publik yang berkualitas adalah dambaan setiap warga negara. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pemerintah mengambil berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, Pemerintah melalui Kementerian PANRB memperkenalkan inisiatif “**Satu Instansi, Satu Inovasi (One Agency, One Innovation)**” sejak tahun 2013. Pada prinsipnya inisiatif ini mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah agar melakukan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnya. Paralel dengan inisiatif ini juga diselenggarakan **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik**.

Saya bersyukur, bahwa jumlah peserta kompetisi dalam tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 kompetisi ini diikuti oleh **515 peserta**, dan tahun 2015 meningkat menjadi **1.189 peserta**. Peningkatan ini dapat menjadi petunjuk penting tentang kuatnya komitmen dari para penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Terhadap peserta kompetisi ini, setelah melalui penilaian independen dihasilkan 99 inovasi terbaik.

Sebagai pelengkap dari inisiatif di atas, Kementerian PANRB setiap tahun mempublikasikan 99 inovasi terbaik itu dalam buku “**Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015**”. Hasil publikasi ini merupakan salah satu alat diseminasi guna mempercepat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik melalui transfer pengetahuan, replikasi, maupun sebagai rujukan untuk peningkatan kapasitas, perluasan jejaring, dan pelembagaan inisiatif inovasi pelayanan publik.

Akhirnya, kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan dedikasi melalui kerja keras dalam penyelenggaraan kompetisi dan penyusunan buku ini, saya sampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati setiap niat dan langkah baik kita dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME



**The Minister Of Administrative And Bureaucratic
Reform Republic Of Indonesia**

Greetings

A high-quality public service is a desire of every citizen. Therefore, it is no surprise that the government undertakes various initiatives to improving the quality of public service sustainably. In this regard, the government through the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform have introduced the “One Agency, One Innovation” initiative since 2013. Basically, this initiative obliges each government agency to conduct at least one innovation annually. Parallel to this initiative, the Public Service Innovations Competitions have been organized.

I am grateful that the number of participants in this year’s competition increases compared to the previous year. In 2014, this competition was attended by 515 participants while in 2015 it increases to 1.189 participants. This increase could be an important reference regarding the strong commitment of public service providers to meet the society expectation. Among the participants of the competition, after undergoing independent assessment, 99 best innovations are chosen.

As a complimentary to the innovation above, the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform every year publishes those 99 best innovations into a book titled “Top 99 Public Service Innovations”. This publication is one of the dissemination tools to accelerate the efforts to improving public service quality, through transfer of knowledge, replication, and also as a referral for capacity improvement, network expansion, and institutionalization of innovation initiatives.

Finally, to various parties that have shown dedication through hard work in the accomplishment of this competition and the making of this book, I would like to deliver my highest appreciation.

I wish God the Almighty bless our every good intention and actions to serve the nation and the country.

**Minister of Administrative and
Bureaucratic Reform**

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Daftar Isi

Kata Pengantar Deputi Bidang Pelayanan Publik	iv
Sambutan Menteri PANRB	vi
Daftar Isi	viii
1. Inovasi GE.LA.TIK Sampah Plastik di Kabupaten Badung	2
2. Sistem Inti-Plasma Ikan Patin di Kabupaten Subang	4
3. Layanan Unit Perinatologi di Rumah Sakit Lasinrang	6
4. ATM SAMSAT JAWA TIMUR	8
5. Bantuan Sosial Bedah Rumah di Kabupaten Luwu Timur	10
6. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang	12
7. Pengolahan Tinja di Kota Banda Aceh	14
8. Prolanis – One Stop Service Pengelolaan Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas	16
9. Lahir Procot Pulang Bawa Akte	18
10. Payment Point <i>Drive Thru</i> PBB-P2	20
11. Program Rumah Sejahtera	22
12. Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah	24
13. UPTPK : Kantornya Orang Miskin di Kabupaten Sragen	26
14. Yogyakarta Emergency Services (YES) 118 Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Medis Terpadu Yang Terjadi Di Wilayah Kota Yogyakarta Dengan Penjaminan 24 Jam Pertama	28
15. SIJARIEMAS Sebagai Upaya Akselerasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang	30
16. Jogjaplan	32
17. E-SAMSAT JATIM – Layanan Tanpa Batas Jarak, Ruang, dan Waktu	34
18. Reformasi Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	36
19. SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak)	38
20. INTAN	40
21. Sistem Penilaian Prestasi Kerja <i>Online</i> Kemenperin	42
22. ODHALINK	44
23. Cegah Kanker Serviks, Perempuan Tersenyum	46
24. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	48
25. SMS Sehat Bagi Masyarakat Jambi	50
26. Layanan Tujuh Menit (Lantum)	52

Table of Contents

<i>Foreword Deputy of Public Service</i>	v
<i>Greetings The Minister Of Administrative And Bureaucratic Reform Republic Of Indonesia</i>	vii
<i>Table of Contents</i>	ix
1. <i>GE.LA.TIK Innovation of Plastic Trash in Badung Regency</i>	3
2. <i>The Nexus-Plasma System of Basa in Subang Regency</i>	5
3. <i>Perinatology Unit Service in Lasinrang Hospital</i>	7
4. <i>SAMSAT ATM in East Java</i>	9
5. <i>Housing Renovation Aid in Luwu Regency</i>	11
6. <i>Talangagung Kepanjen, Waste Management Unit Educational Tourism</i>	13
7. <i>Human Waste Management in Banda Aceh City</i>	15
8. <i>Prolanis – One Stop Service in Managing Hypertension and Diabetes Mellitus in Talagabodas Health Center, Bandung</i>	17
9. <i>Expedited Birth Certification.</i>	19
10. <i>Payment Point Drive Thru PBB-P2</i>	21
11. <i>Fitting Housing Program</i>	23
12. <i>Central Kalimantan Province Inflation Control System</i>	25
13. <i>Integrated Service Unit for Poverty Alleviation: the Office of Poor People in Sragen Regency</i>	27
14. <i>Yogyakarta Emergency Services (YES) 118, a Unified Efforts in Dealing with Yogyakarta’s Medical Emergency, with a guaranteed free emergency services for the first 24 hours of care.</i>	29
15. <i>SIJARIEMAS: Series of Efforts to Ensure the Safety of Maternity Patients in Karawang Regency.</i>	31
16. <i>Jogjaplan</i>	33
17. <i>East Java’s SAMSAT – Service Without Distance, Space, and Time Boundaries.</i>	35
18. <i>Management Reform on Youth Counseling and Information Center</i>	37
19. <i>SAKINA (Stop Kematian Ibu dan Anak) / Stop Maternal and Infant Mortality</i>	39
20. <i>INTAN</i>	41
21. <i>Online Performance Evaluation System of Ministry of Industry</i>	43
22. <i>ODHALINK</i>	45
23. <i>Prevent Cervix Cancer, Women Smile</i>	47
24. <i>Community Mental Health Service</i>	49
25. <i>Healthy SMS for Society in Jambi</i>	51
26. <i>Seven Minutes Services (Lantum)</i>	53

27. Model Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas Kampus Kota Palembang	54
28. Pelayanan <i>Online</i> berbasis aplikasi Web	56
29. GERBANG SERASAN	58
30. Pelayanan “Kios 3in1” Untuk Pencari Kerja Dalam Rangka Mengurangi Jumlah Pengangguran	60
31. Program Pengendalian Malaria Kabupaten Teluk Bintuni melalui sistem EDAT	62
32. Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper).	64
33. Gebrakan SuSi (Suami Siaga) turunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	66
34. Dari Lahan Kritis Menuju Hutan Kota Impian	68
35. Layanan Bus Sekolah Gratis Asa Kasea	70
36. “KEUR” Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu-lintas	72
37. <i>e-Health</i>	74
38. Emas Hitam dibalik Tumpukan Sampah	76
39. Memanfaatkan Facebook Untuk Percepatan Pelayanan Publik	78
40. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif Dalam Era Informasi Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Petik	80
41. Pengembangan Potensi Pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan)	82
42. Unit Pelaksana Teknis - Pekerjaan Umum Tingkat Kecamatan (UPT-PU Kecamatan) di Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Solusi Penyelesaian Infrastruktur Daerah	84
43. Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	86
44. Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang (PaKSi Pinrang)	88
45. Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan	90
46. Pelayanan Penjangkauan (Outreaching) Melayani Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat	92
47. Klinik Koperasi dan UMKM	94
48. Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Melalui Forum Komunikasi BBLKI Serang dan Stakeholders	96
49. Klinik Lansia Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi	98
50. Meningkatkan Pelaksanaan Lelang yang Efisien, Kompetitif, dan Adil Melalui Pelaksanaan e-Auction	100
51. Program Kartu Insentif Anak dan Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran	102

27. <i>Integrated Traditional Health Care in Campus Health Center of Palembang</i>	55
28. <i>Online Web-based Application Service</i>	57
29. <i>GERBANG SERASAN</i>	59
30. <i>3 in 1 kiosk service for Job Seekers an initiative to reduce unemployment</i>	61
31. <i>Malaria Containment Program in Teluk Bintuni Regency through EDAT System.</i>	63
32. <i>Licensing Service Clinic (Klipper)</i>	65
33. <i>SuSi: a Breakthrough to Reduce Maternal Mortality and Infant Mortality</i>	67
34. <i>From Barren Land to the Ideal Urban Forest</i>	69
35. <i>Free School Bus Service Asa Kasea</i>	71
36. <i>“KEUR” only 26 Minutes to Traffic Safety</i>	73
37. <i>e-Health</i>	75
38. <i>Black Gold underneath the Scrap Heap</i>	77
39. <i>Utilizing Facebook for the Acceleration of Public Service</i>	79
40. <i>PETIK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>	81
41. <i>Asparagus Grown, Economy Improved in North Badung</i>	83
42. <i>Unit of Public Works in District Level in Penajam Paser Utara Regency as a Solution for Regional Infrastructure</i>	85
43. <i>Utilization of Caries Risk Simulator (Cavities) through Interpersonal Approach in Dental Clinic</i>	87
44. <i>Investment Policy Package of Pinrang Regency</i>	89
45. <i>Institute for Women Children and Youth Protection of Pekalongan</i>	91
46. <i>Outreaching Service for Persons with Disabilities in the Society</i>	93
47. <i>Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises Clinic</i>	95
48. <i>Promoting Participation of Stakeholders in Placement of Manpower</i>	97
49. <i>Elderly Clinic of Putri Ayu Public Health Center in Jambi</i>	99
50. <i>Improving Efficient, Competitive, and Fair Auction through e-Auction</i>	101
51. <i>Children Incentive Card Program and Birth Record Relation System</i>	103

52. Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Berbasis Web (SPK <i>Online</i>)	104
53. Pelayanan Maternal Penderita HIV Positif (AIDS) di RSUD Kardinah dalam Mendukung Program MDG'S di Kota Tegal	106
54. SPOTS (Sistem Perizinan <i>Online</i> dan Tracking System)	108
55. Gempungan Di Buruan Urang Lembur	110
56. MaKinTerLayani pegawai On-Line	112
57. Gender Infrastruktur PU dan Permukiman	114
58. Penyimpangan "Positif" Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui program BLC (Broadband Learning Center)	116
59. "One Stop Service Toilet SMKN 3 Wonosari" (Pelayanan Terpadu bagi Siswa, Guru, dan Karyawan Putri Dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Kesehatan Reproduksi di SMKN 3 Wonosari)	118
60. Pro Investasi (Implementasi PTSP) Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah	120
61. Balee Inong (Rumah Perempuan Kota Banda Aceh)	122
62. Penggunaan Media <i>Online</i> Sabilulungan.go.id untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung (Inovasi Pelayanan Publik <i>Online</i> Pemerintah Kota Bandung)	124
63. Campus Social Responsibility	126
64. Pengesahan Badan Hukum Versi AHU <i>Online</i>	128
65. Inovasi Pala Sambutan untuk mendukung Rehabilitasi Kebun Pala Rakyat yang terserang Penyakit di Kabupaten Aceh Selatan	130
66. HoT (HOSPITAL on TABLET), Modifikasi Rekam Medis Elektronik Rawat Inap Menggunakan Tablet di RS Paru Jember	132
67. Taman Budaya Jambi	134
68. Layanan Rakyat Istimewa Untuk Sertifikasi Tanah (LARIS)	136
69. Menjemput Impian Wajib Pajak Dengan Layanan "Delivery Service Km.0 – Km.15 = 0"	138
70. AyoKerja	140
71. ICT based VALEMO	142
72. Analisis Kemiskinan Partisipatif (Pendataan dari Si Miskin, oleh Si Miskin dan untuk Si Miskin)	144
73. Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	146
74. BAPETEN Licensing Information System for Export and Import (BALIS EXIM) <i>Online</i>	148
75. Satu Meja Beres Perkara, Layanan Pendaftaran dan PenjaminanTerpadu (LP2T) pada Pelayanan Rawat Jalan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	150
76. Sistem Informasi Ketahanan Industri	152

52. Web-based <i>Statistic Classification Code Searching System</i>	105
53. <i>Maternity Service for HIV Positive (AIDS) Patients in Kardinah Public Hospital</i>	107
54. <i>Online Licensing System and Tracking System</i>	109
55. <i>Initiative Gembur in Purwakarta</i>	111
56. <i>Integrated Performance Management of Employee Services Online</i>	113
57. <i>Gender Public Work and Settlement Infrastructure</i>	115
58. Broadband Learning Center <i>Program in Library</i>	117
59. <i>Integrated Reproductive Health Services at Wonosari High School)</i>	119
60. <i>Pro Investment (PTSP Implementation) Boyolali Regency, Central Java Province</i>	121
61. <i>Balee Inong: Women Empowerment House in Banda Aceh City</i>	123
62. <i>Bandung Municipal innovation on Online Public Service Delivery</i>	125
63. <i>Campus Social Responsibility</i>	127
64. <i>Online Administration of General Law Legalization for Legal Entity</i>	129
65. <i>Nutmeg Plantation Innovations in South Aceh Regency</i>	131
66. <i>Hospital in Tablets at Paru Jember Hospital</i>	133
67. <i>Jambi Cultural Park</i>	135
68. <i>Special Service for the Society on Land Certification</i>	137
69. <i>Realizing Taxpayers' Dream through Delivery Service</i>	139
70. <i>Let's Work (Ayo Kerja)</i>	141
71. <i>ICT-based VALEMO</i>	143
72. <i>Participative Poverty Analysis</i>	145
73. <i>Information System for Monitoring and Control of Local Development</i>	147
74. <i>BAPETEN Licensing Information System for Export and Import Online</i>	149
75. <i>One Counter and You Get Healthier in Pekalongan Regency</i>	151
76. <i>Industry Resilience Information System</i>	153

77. SMART POL PP (Sarana Masyarakat Berpartisipasi Aktif Mendukung Tugas SATPOL PP)	154
78. Contra War dan Sutera Emas di Kabupaten Malang	156
79. Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari	158
80. SIPADU STIS: Sistem Komputerisasi Pelayanan Proses Administrasi Perkuliahan Menuju STIS Berstandar Internasional	160
81. Sistem Layanan Informasi Terpadu	162
82. Transparansi Informasi Pembayaran Melalui e-SP2D	164
83. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / Call Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	166
84. Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah	168
85. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) tanpa dinding di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta	170
86. SMS-Gateway Sebagai Inovasi Pelayanan Publik melalui Otomasi Informasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal di Kota Pekalongan	172
87. Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Menguatkan Budaya Pelayanan Prima di Kabupaten Pinrang	174
88. Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014	176
89. Katresna Sadaya - Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu dan Anak	178
90. Pemanfaatan Aset Terbengkalai Solusi Peningkatan Kreativitas Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	180
91. Taman Pintar, Science Center Sebagai Sarana Literasi Sains Masyarakat	182
92. Rumah Pajak untuk Anak mengajak Anak Kenal dan Cinta Pajak sejak Dini	184
93. Pelayanan Pendidikan Melalui Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru (SITJB)	186
94. Reformasi Sistem Pelayanan Yang Bersifat Represif Menjadi Humanis	188
95. Tabungan Emas Hijau untuk Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD dan ABK Kecamatan Ponjong	190
96. Pelayanan Prima Bankable	192
97. Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai asas tata kelola pemerintahan	194
98. Ketuk Pintu Rumah Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar	196
99. SWAT – Solid Waste Transportation (Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah)	198

77. SMART SATPOL PP	155
78. Unified Society Based Epidemiology Surveillance at Kepanjen Sub-district, Malang Regency	157
79. Android Application Riau Island's Data on Fingertip	159
80. Computerized System Service for Lecture Administration at STIS	161
81. Integrated Information Service System	163
82. Transparency on Disbursement Information Through e-SP2D	165
83. Call Center 119 in Boyolali Regency	167
84. Central Kalimantan Province Budget Absorption Acceleration System	169
85. Low Birth Weight Baby's Program at Wates Regional Hospital in Kulon Progo	171
86. SMS-Gateway for Licensing Service in Pekalongan	173
87. Information and Complaint Center in Pinrang Regency	175
88. Aceh Jaya Cerdas Scholarship Year 2014	177
89. Society Movement Concerning Mother and Child Health	179
90. Utilization of Abandoned Asset	181
91. Science center for Society Science Literacy	183
92. Tax House for the Children	185
93. Education Quality Service through Indonesia Open School Johor Bahru	187
94. Reforming Repressive Service System into a Humane Service	189
95. Early Childhood Education and Children with Special Needs in Ponjong District	191
96. Bankable Excellent Service	193
97. Surakarta Complaints Service Unit	195
98. Door Knocking of Land Office of Selayar Island	197
99. Waste Transportation Management System	199



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari
Kementerian



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari
Lembaga Pemerintah



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari
Provinsi



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari Pemerintah Kabupaten



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari Pemerintah Kabupaten



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari Pemerintah Kabupaten



Penerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dari Pemerintah Kota



Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99

Top 99
Inovasi Pelayanan Publik Indonesia
Tahun 2015

Top 99
INDONESIA PUBLIC SERVICE INNOVATIONS
2015

1. Inovasi GE.LA.TIK Sampah Plastik di Kabupaten Badung

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Badung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung



Pemerintah Kabupaten Badung Bali meresmikan GE.LA.TIK (Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik) pada tanggal 7 April 2011. Inovasi ini merupakan perbaikan tata kelola sampah meliputi sosialisasi, kewirausahaan, dan pelibatan komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.

Konsep GE.LA.TIK memiliki karakteristik khusus. Pengelola membeli sampah plastik dari masyarakat dengan mengambil sampah dari setiap rumah, dan mendaur ulang sampah menjadi produk kerajinan dan energi.

Implementasi GE.LA.TIK terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1. Membuat desain Rumah Hijau Percontohan.
2. Membentuk Bank Sampah di setiap desa.
3. Membuat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di setiap desa.
4. Membentuk kelompok kerajinan plastik.
5. Menyediakan mesin pengolah sampah plastik menjadi energi.

Pemangku kepentingan GE.LA.TIK meliputi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak swasta yang terlibat adalah pengusaha ritel, pengusaha hotel, dan bankir. Pemerintah, swasta, dan keuntungan pengelolaan sampah menjadi sumber pendanaan inovasi ini.

Dampak GE.LA.TIK yang utama adalah mengurangi secara signifikan volume sampah plastik. Kemudian, mengubah pola pikir masyarakat untuk menukar sampah plastik menjadi uang. Dan akhirnya, mewujudkan kota kecil yang bersih dan menarik kunjungan wisatawan.

1. *GE.LA.TIK Innovation of Plastic Trash in Badung Regency*

<i>Category</i>	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
<i>Agency</i>	<i>Badung Regency</i>
<i>units of service innovation</i>	<i>Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung</i>

Badung Regency Bali initiated GE.LA.TIK (Sustainable Movement for Anti Plastic Trash) in 7th of April 2011. The innovation is an improvement of trash governance includes promotion, entrepreneurship, and society collaboration in the environmentally friendly and economically plastic waste management.

GE.LA.TIK concept has specific characteristics. The administrator buys plastic trash from residents by the door to door collection and recycles the trash into handicrafts and energy.

GE.LA.TIK implementation consists of the following phases.

- 1. Designing Green Houses Piloting*
- 2. Establishing Trash Bank in every village*
- 3. To providing the Integrated Trash Management Site in every village*
- 4. Forming the plastics craftsman groups*
- 5. Providing machinery to change trash becomes energy*

GE.LA.TIK stakeholders are government, private sectors, and citizens. The private sectors include the retailers, hotel companies, and bankers. Government, private companies and the trash management profits are the innovation financial sources.

The main impact of GE.LA.TIK is to reducing the plastic trash volume significantly. Next, it has changed the people's mindset to change trash becomes money. Finally, it creates a small and clean city that attracts tourists.

2. Sistem Inti-Plasma Ikan Patin di Kabupaten Subang

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele (BBIPL) Cijengkol Subang

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele Cijengkol Subang Jawa Barat menjalankan Sistem Inti-Plasma ikan patin sejak tahun 2010. Inovasi ini meliputi proses memelihara induk, memproduksi larva, serta membesarkan benih ikan ukuran satu dan dua inci.

Sistem Inti-Plasma terdiri dari dua pelaku utama. Pertama, Balai Cijengkol sebagai Inti melakukan pemeliharaan induk dan produksi larva ikan patin. Kedua, petani sebagai Plasma melakukan pembesaran benih patin ukuran satu dan dua inci.

Implementasi Sistem Inti-Plasma terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1. Melakukan survei ke beberapa provinsi.
2. Melakukan pengujian dan percobaan penerapan teknologi.
3. Melaksanakan pelatihan dan magang.
4. Membuat unit percontohan.
5. Membentuk dan membina Plasma

Dampak Sistem Inti-Plasma yang utama adalah membangun kawasan pembenihan dan produksi ikan patin di Subang. Kemudian, menciptakan lapangan kerja baru untuk ratusan orang. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas lahan pekarangan penduduk untuk kegiatan pembesaran ikan.

2. The Nexus-Plasma System of Basa in Subang Regency

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	West Java Province
units of service innovation	<i>Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat</i> Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele (BBIPL) Cijengkol Subang

Fish Farming Development Center Cijengkol Subang West Java has implemented the Nexus-Plasma System of Basa Fish since 2010. The innovation includes parent fish management, fish larvae production, and fish seed rearing to the size of 1 and 2 inches.

The Nexus-Plasma System consists of two major principals. First, the Cijengkol Agency as the Nexus that is responsible for the parent fish management and fish larvae production. Second, farmers as the Plasma, who are responsible to rear fish seed to the size of 1 and 2 inches.

The system implementation consists of the following phases.

- 1. Conducting surveys to some provinces*
- 2. Conducting tests and technology implementation trials*
- 3. Performing training and internships*
- 4. Creating piloting units*
- 5. Establishing and mentoring Plasma*

The main impact of the innovation is building the seeding and production of basa fish in Subang. Then, it creates new jobs for hundreds of people. Finally, it improves the productivity of house gardens for fish seed rearing activities.

3. Layanan Unit Perinatologi di Rumah Sakit Lasinrang

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pinrang
Unit Inovasi Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang 0421-921298, msu_group@yahoo.com

Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan meningkatkan pelayanan unit perinatologi sejak akhir tahun 2012. Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi dengan melakukan berbagai perbaikan dalam manajemen kelahiran bayi.

Konsep Layanan Unit Perinatologi memiliki karakteristik khusus. Rumah Sakit memiliki sistem rujukan berbasis sistem *online*. Sistem ini menghubungkan semua unit layanan kesehatan dari tingkat bidan desa sampai dengan puskesmas kecamatan. Layanan ini juga menggratiskan biaya pelayanan untuk masyarakat miskin.

Implementasi Layanan Unit Perinatologi terdiri dari beberapa pendukung sebagai berikut:

1. Sistem Rujukan berbasis sistem *Online*.
2. Pelayanan *Call Center* 082 333 328 176.
3. Kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam penyediaan dokter spesialis.
6. Saluran pengaduan langsung masyarakat ke nomor 081 244 189 098.
7. Status Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Pemangku kepentingan inovasi ini adalah pemerintah, rumah sakit, universitas, dan lembaga donor. Pemerintah Kabupaten dan USAID menjadi sumber pendanaan inovasi ini.

Dampak utama inovasi ini adalah menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi. Kemudian, meningkatkan cakupan pelayanan kelahiran bayi dan koordinasi antar unit pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan. Akhirnya, meningkatkan kualitas pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat.

3. Perinatology Unit Service in Lasinrang Hospital

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	Pinrang Regency
units of service innovation	Lasinrang Hospital 0421-921298, msu_group@yahoo.com

Lasinrang Hospital in Pinrang Regency South Sulawesi has improved unit perinatology unit service since the end of 2012. The innovation aims to reduce the mortality rate of mothers and infants by conducting various improvements in the childbirth management.

The perinatology unit service's concept has the following characteristics. The hospital has an online-based referral system. The system connects all health services from the village midwives until the sub-districts' health centers. The service does not charge any fees for poor people.

The service implementation consists of the following support systems.

1. *The Online-based referral system*
2. *Call center 082 333 328 176.*
3. *Compliance to Standard Operating Procedures.*
4. *Improvement of facilities and infrastructures and the qualified human resources.*
5. *Cooperation with Hasanuddin University in the provision of specialists.*
6. *Complaint direct access to 081 244 189 098*
7. *Public Service Agency status of the hospital*

The innovation stakeholders are government, hospital, university, and donor agencies. Regency administration and USAID have funded the innovation.

The main impact of the innovation is the decreasing mortality rate of mothers and infants. Then, it increases the coverage of childbirth service and coordination among health centers by using referral system. Finally, it improves the service quality and citizen's satisfaction index.

4. ATM SAMSAT JAWA TIMUR

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur pajakdipendajatim@yahoo.co.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan inovasi ATM SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) JATIM sejak tahun 2011. Inovasi ini merupakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). ATM SAMSAT merupakan peningkatan layanan SAMSAT KELILING, SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT *Corner* yang telah diimplementasikan.

ATM SAMSAT memiliki karakteristik khusus. Pengguna layanan menggunakan mesin ATM yang terhubung dengan sistem perbankan untuk melakukan transaksi sehingga tidak perlu bertatap muka dengan petugas. Inovasi ini mendukung e-identifikasi, penetapan pajak tahunan secara *online* dan otomatis, pembayaran non tunai, pencetakan otomatis bukti pembayaran, dan pengesahan surat kendaraan elektronik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai inovasi ini.

Pelaksanaan inovasi ATM SAMSAT membutuhkan langkah berikut.

1. Mewujudkan purwarupa mesin ATM dan rancangan media *SmartCard*.
2. Menentukan lokasi ATM, khususnya di daerah industri dan perdagangan.
3. Kerjasama dengan perbankan.
4. Promosi layanan melalui berbagai media.
5. Pemantauan dan evaluasi rutin.

Dampak utama ATM SAMSAT adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian, petugas SAMSAT mengurangi biaya operasi layanan pajak dengan sistem elektronik. Akhirnya, layanan ini meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah.

4. SAMSAT ATM in East Java

Category	<i>Encouraging Participation in Policy Making through Innovation</i>
Agency	<i>East Java Province</i>
units of service innovation	<i>Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur pajakdipendajatim@yahoo.co.id</i>

East Java Provincial administration has implemented innovation of ATM SAMSAT (one stop service for vehicle tax) since 2011. The innovation is a vehicle tax payment based on ATM (Automated Teller Machine). ATM SAMSAT is a service improvement from the existing SAMSAT Mobile, SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT Corner.

ATM SAMSAT has specific characteristics. Consumers use the bankable ATM to transact without seeing any officer. The innovation supports e-identification, automatic and online-based annual tax quotation, non-cash payment, automatic receipt printing, and the electronic vehicle document's validation. Provincial government finances this innovation.

Implementation of ATM SAMSAT innovation requires the following phases.

- 1. To constructing the ATM prototype and SmartCard media program*
- 2. To determining the ATM site especially in the surrounding industrial and trading park*
- 3. Cooperation with banking sector*
- 4. Promoting the service through many media*
- 5. Routine monitoring and evaluation*

The main impact of ATM SAMSAT is improving citizen's compliance to pay vehicle tax. Then, SAMSAT officials reduce operating costs of tax administration service by using electronic system. Finally, the service increases satisfaction and citizens' trust in the government officials.

5. Bantuan Sosial Bedah Rumah di Kabupaten Luwu Timur

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur dtrpkabupatenluwutimur@gmail.com

Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan melaksanakan inovasi Bantuan Sosial Bedah Rumah sejak tahun 2013. Inovasinya adalah menyediakan rumah layak huni dengan memberikan bantuan bahan bangunan kepada masyarakat miskin yang memiliki tanah dan bangunan atas nama sendiri.

Konsep Bantuan Sosial Bedah Rumah memiliki karakteristik khusus. Dana bantuan diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk material bangunan. Pemerintah membayar biaya pembelian material bangunan kepada penyedia material bangunan (toko atau pabrik) menggunakan transfer bank.

Implementasi Bedah Rumah terdiri dari tahapan berikut.

1. Perencanaan dan pembentukan kelompok kerja sosialisasi.
2. Pemrosesan proposal penerima bantuan.
3. Proses penganggaran dan pencairan dana.
4. Pelaksanaan program.
5. Pelaporan dan evaluasi.

Pemangku kepentingan inovasi ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai inovasi ini.

Dampak inovasi yang utama adalah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepedulian terhadap sesama. Pembelajaran dari inovasi adalah perlunya peningkatan layanan teknis menyangkut perbankan serta koordinasi antara pemangku kepentingan.

5. Housing Renovation Aid in Luwu Regency

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	<i>East Luwu Timur Regency</i>
units of service innovation	<i>Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur dirpkabupatenluwutimur@gmail.com</i>

Luwu Regency South Sulawesi has implemented the Housing Renovation Aid since 2013. The innovation is in providing good houses by giving raw materials to poor households who have land and existing houses under their names.

The innovation has specific characteristics. The financial assistance is given to poor households in the form of raw materials. The government pays the raw material to the suppliers by using bank transfer.

The program implementation consists of the following phases.

- 1. Planning and forming of a task force to promoting the program.*
- 2. Processing the recipients' proposal.*
- 3. Processing the budgeting and financial disbursements.*
- 4. Implementing the program.*
- 5. Reporting and evaluation.*

The innovation's stakeholders are the central government, the local government, and private sectors. The central and local government finance the innovation.

The main impact of the innovation is reducing the number of poor houses. Then, it improves the resident's life quality. Finally, it increases the people's trust and care to other people. The lessons learned from this program is that it needs upgrading of technical service relates to banking and coordination among stakeholders.

6. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kabupaten Malang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang c4c4_rr@yahoo.com



Kabupaten Malang Jawa Timur menerapkan inovasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen sejak tahun 2009. Inovasi ini merupakan peningkatan kualitas pengolahan sampah dan pemanfaatan pengelolaan sampah yang menghasilkan energi dan lokasi wisata edukasi.

Konsep inovasi ini memiliki karakteristik khusus. TPA ini dikembangkan dari proses terbuka menjadi

tertutup. Dengan memanfaatkan teknologi, TPA ini menghasilkan gas methane dan menjadi lokasi wisata edukasi.

Implementasi inovasi ini terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1. Perencanaan dan penganggaran program.
2. Studi lingkungan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian alat pengguna gas methane.
4. Instalasi dan pengoperasian jaringan perpipaan gas ke rumah-rumah penduduk.
5. Evaluasi layanan dan keamanan program.
6. Konsistensi pengoperasian dan pengelolaan program.

Pemangku kepentingan inovasi ini adalah pemerintah daerah, universitas, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah daerah membiayai program ini secara keseluruhan.

Dampak inovasi utama adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian, meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sampah berupa gas dan wisata edukasi. Akhirnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Talangagung Kepanjen, Waste Management Unit Educational Tourism

Category	<i>Encouraging Participation in Policy Making through Innovation</i>
Agency	Malang Regency
units of service innovation	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang c4c4_rr@yahoo.com

Malang Regency East Java has implemented innovation of Kepanjen Waste Management Facility since 2009. The innovation is an improvement of waste management quality, waste to energy management, and the education tourism site.

The innovation concept has specific characteristics. The landfill is developed from open dumping into a controlled sanitary landfill. By technology utilization, the landfill produces methane and the education tourism site.

The program implementation consists of the following phases.

- 1. Program planning and budgeting.*
- 2. Environmental study.*
- 3. Promotion of society and provisioning methane tools*
- 4. Installation and pipeline network to residencies.*
- 5. Service evaluation and program security.*
- 6. Consistency of operation and program management*

The innovation's stakeholders are the local government, university, private sectors, and Non-Governmental Organization. The local government finances the whole program.

The main impact of the innovation is reducing the environmental pollution. Then, it improves added valued from waste management and education tourism. Finally, it improves the citizens' quality of life.

7. Pengolahan Tinja di Kota Banda Aceh

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Banda Aceh
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh mirza_dkp@yahoo.com



Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam melaksanakan inovasi Pengolahan Tinja sejak tahun 2005. Inovasi ini merupakan pengelolaan tinja meliputi penyedotan tinja di rumah penduduk dan pengolahan tinja menjadi material yang bermanfaat.

Konsep Pengolahan Tinja memiliki karakteristik khusus. Instalasi pengolahan tinja didirikan pasca bencana tsunami yang memorakporandakan perumahan dan fasilitas sanitasi. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari tinja yang dibuang ke lingkungan terbuka, maka dibangun fasilitas kakus umum menggunakan *septic tank*. Tinja yang terkumpul di *septic tank* secara berkala disedot oleh kendaraan khusus dan ditempatkan di instalasi pengolahan tinja. Selanjutnya tinja diproses menjadi cairan yang tidak beracun dan menjadi pupuk padat. Instalasi pengolahan tinja memiliki sistem operasi sederhana, tanpa menggunakan listrik, jumlah operator minimal, biaya operasional murah, dan tidak menimbulkan bau.

Pelaksanaan Pengolahan Tinja terdiri dari tahapan berikut.

1. Perencanaan yang melibatkan konsultan asing dan nasional.
2. Konstruksi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi pemerhati lingkungan.
3. Pra-operasional dengan sosialisasi, penyusunan prosedur, dan pelatihan bagi operator dan pengelola.
4. Operasional dengan dukungan operator terlatih, anggaran pemerintah, regulasi, dan kemitraan.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala.

Pemangku kepentingan inovasi ini meliputi pemerintah Provinsi, pemerintah kota dan kabupaten Banda Aceh, lembaga donor, swasta, serta lembaga swadaya masyarakat. JICA dan Unicef membiayai pembangunan instalasi pengolahan tinja. Penyedotan tinja dilaksanakan oleh pemerintah dan penyedia jasa swasta.

Dampak yang utama dari inovasi adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian, meningkatkan lapangan kerja yang bersumber dari jasa penyedotan tinja dan pemanfaatan pupuk serta meningkatkan penerimaan pemerintah dari retribusi. Akhirnya, inovasi ini meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan partisipasi publik dalam program pemerintah.

7. Human Waste Management in Banda Aceh City

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	Banda Aceh City
units of service innovation	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh mirza_dkp@yahoo.com

Banda Aceh City Nangroe Aceh Darussalam has implemented the Human Waste Management since 2005. The innovation is a human waste management consists of suctioning feces at residencies and human waste recycle becomes useful material.

Human Waste Management has specific characteristics. Human waste installation is built after tsunami earthquake that devastated residences and sanitation facilities. To avoid pollution from splattered human excrement, public toilets have been built using septic tanks. Human waste in the septic tank is suctioned by using special vehicles and placed on in the human waste installation.

The program implementation consists of the following phases.

- 1. Planning involves domestic and foreign consultants.*
- 2. Construction involves government, private sectors, society, and environment organization.*
- 3. The pre-operation phase involves promotion, writing procedure, and training for operator and administrator.*
- 4. Operation phase supported by the skilled operator; government supports, regulation, and partnerships.*
- 5. Regular monitoring and evaluation.*

The innovation stakeholders are provincial government, city government, and Banda Aceh regency government, donor agencies, private sectors, and NGO. JICA and Unicef financed the human waste installation. Government and private sector are managing the human waste suctioning and collecting a small fee from users.

The main impact of the program is reducing the pollution. Then, it has created jobs originated from activities to suction human waste, fertilizer utilization, and government income from the fee. Finally, the innovation increases the society quality of life and public participation in the public agenda.

8. Prolanis – One Stop Service Pengelolaan Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Bandung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kota Bandung Talagabodas Kota Bandung e.edywar@gmail.com

Puskesmas Talagabodas, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat menerapkan inovasi Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) dalam sejak tahun 2012. Inovasi ini merupakan upaya kesehatan yang preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk penyakit hipertensi dan diabetes mellitus.

Konsep Prolanis memiliki karakteristik khusus. Puskesmas menyediakan pelayanan menyeluruh kepada pasien meliputi aspek edukasi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi untuk mengurangi angka kematian.

Strategi prolanis memiliki tujuh pilar yaitu

1. Melakukan kontrol dan pengobatan.
2. Program diet.
3. Program edukasi terkait gizi, olahraga dan gaya hidup sehat.
4. Pemeriksaan laboratorium.
5. Membuat klub pasien yang dimotori oleh pasien.
6. Pengiriman pesan singkat seluler.
7. Melakukan kunjungan ke rumah.

Pemangku kepentingan Prolanis meliputi pihak pemerintah, jejaring apotik, laboratorium, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah Kota dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) dengan skema pembayaran *fee for services* membiayai inovasi ini.

Dampak Prolanis yang utama adalah menurunkan angka kematian karena penyakit kronis. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan kesehatan. Dan akhirnya Prolanis membentuk budaya hidup sehat.

8. Prolanis – One Stop Service in Managing Hypertension and Diabetes Mellitus in Talagabodas Health Center, Bandung

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Bandung City
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kota Bandung Talagabodas Kota Bandung e.edywar@gmail.com

Talagabodas Health Center, Lengkong Sub-district, Bandung City has implemented Chronic Disease Management Program (Prolanis) since 2012. The innovation is a preventive, curative, and rehabilitative health initiative to cure Hypertension and Diabetes Mellitus.

Prolanis has specific characteristics. The Health Center provides integrated service to patient covering education, prevention, treatment, and rehabilitation to reduce the death rate.

Prolanis has the following seven pillars.

1. Conducting control and treatment.
2. Diet program.
3. Education program relates to nutrition, sports, and healthy lifestyle.
4. Laboratory examination.
5. Patient clubs led by patients.
6. Sending Short message (SMS).
7. House visit.

The program stakeholders are government, pharmacy stores network, laboratories, education centers, and NGO. City administration and the Healthcare and insurance administrator (BPJS) finance the program by conducting fee for services. The main impact of Prolanis is reducing the death rate from chronic diseases. Then, it improves the public service quality at the Health Center. Finally, Prolanis promotes the healthy lifestyle.

There is a high chance of replicating the initiative; this was indicated by the frequent visits from neighboring health centers, be it from other districts, region or province, and the frequent knowledge sharing event to other regions in Indonesia. The Prolanis experiences are one stop service quality, community-based treatment, a creative, innovative, and dynamic concept, applying observes, duplicate, and modify the approach. It also applies the good public governance and empowering the society in reaching the highest living standards.

9. Lahir Procot Pulang Bawa Akte

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi capil.bwi12@yahoo.co.id

Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur memulai inovasi Lahir Procot Pulang Bawa Akte pada 16 November 2013. Inovasi ini berupa pemberian akte kelahiran dengan gratis kepada setiap bayi yang baru lahir.

Konsep inovasi ini memiliki karakteristik khusus. Bayi yang dilahirkan dengan bantuan bidan, puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga secara gratis. Dokumen tersebut akan dikirimkan ke alamat rumah melalui pos.

Implementasi inovasi terdiri dari tahapan berikut.

1. Data permohonan akta kelahiran dari masyarakat dilengkapi dengan kartu tanda pengenal kedua orang tua dan surat nikah.
2. Pengurusannya melalui puskesmas, rumah sakit atau kecamatan lokasi bayi lahir.
3. Pemeriksaan berkas oleh petugas.
4. Berkas *discan* dan diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Akta Online <http://dispenduk.banyuwangikab.go.id/akta>.
5. Akte dan kartu keluarga dicetak.
6. Dokumen dikirimkan melalui pos.

Pemangku kepentingan inovasi ini meliputi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak swasta yang terlibat adalah usahawan, rumah sakit, dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah membiayai sepenuhnya program ini.

Dampak utama inisiatif ini adalah meningkatkan kualitas layanan publik sehingga lebih mudah, lebih cepat dan gratis. Kemudian, mengurangi praktek calo yang menambah biaya pelayanan. Dan akhirnya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan.

9. Expedited Birth Certification.

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	Banyuwangi Regency
units of service innovation	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi <i>capil.bwi12@yahoo.co.id</i>

Banyuwangi Regency East Java implemented the expedited birth certification on November 16th, 2013. The innovation is to give a free of charge birth certificate to every newly born baby.

The innovation has specific characteristics. A baby delivery by midwives, health center, and hospital in Banyuwangi Regency obtains a birth certificate and family card without fee. The documents would be delivered to the baby parents' house by postal service.

The innovation implementation consists of the following phases.

- 1. Application document supported by ID card of both parents and marriage certificate.*
- 2. Health Center, Hospital, or Subdistrict offices administer the process.*
- 3. Officers examine the application document.*
- 4. The document is scanned and uploaded into an online system.*
- 5. Birth certificate and family card are printed out.*
- 6. Documents are delivered by postal service.*

The program stakeholders are government, private, and society. The private sectors include the businesspeople, hospital and the Indonesian Postal Service. The local government finances the program.

The main impact of the program is improving the public service quality become easier, faster, and free. Then, it has reduced the existing middlemen roles that have increased the service costs. Finally, it increases the public awareness to engage with the civic administration.

10. Payment Point *Drive Thru* PBB-P2

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Email dipenda.bwi.kab@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur meresmikan layanan *Drive Thru* pembayaran Pajak Bumi Bangunan sejak tahun 2013. Inovasi ini merupakan peningkatan pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Konsep *Drive Thru* memiliki karakteristik khusus. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilaksanakan dalam waktu tiga menit dan menggunakan layanan perbankan. Juga terdapat pola pembayaran kolektif setiap desa.

Tahapan pelayanan *Drive Thru* meliputi.

1. Masyarakat datang ke kantor lokasi pembayaran pajak.
2. Memberikan Nomor Objek Pajak (NOP) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada petugas.
3. Transaksi diproses oleh petugas pada aplikasi *online*.
4. Masyarakat melakukan pembayaran.
5. Bukti pembayaran diberikan kepada masyarakat.

Pemangku kepentingan program ini meliputi pihak pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim). Pemerintah daerah membiayai sepenuhnya program ini.

Dampak inovasi yang utama adalah mempermudah layanan pembayaran pajak. Kemudian, meningkatkan kualitas layanan publik. Dan akhirnya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

10. Payment Point Drive Thru PBB-P2

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Banyuwangi Regency
units of service innovation	Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Email dipenda.bwi.kab@gmail.com

Banyuwangi Regency East Java has launched Drive Thru service for property tax payment since 2013. The innovation is an improvement of the existing tax property payment.

The concept of Drive Thru has specific characteristics. Property payment is done in three minutes and using bank transfer. It also employs a village collective payment method.

The program has the following phases.

- 1. Residents visit the payment point.*
- 2. They give documents relate to tax payment to officers in charge.*
- 3. Officer in the online application is processing transaction.*
- 4. Residents pay.*
- 5. Residents obtain tax receipt.*

The program stakeholders are the government and East Java Development Bank. The local government finances the program.

The main impact of the innovation is easing the tax payment process. Then, it improves the public service quality. Finally, it increases public awareness to pay taxes.

11. Program Rumah Sejahtera

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Hulu Sungai Selatan Email dinsosnakertranshss@gmail.com



Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan meresmikan program Rumah Sejahtera pada tahun 2012. Inovasi ini berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk membangun rumah layak huni.

Konsep Rumah Sejahtera memiliki karakteristik khusus. Pemerintah membangun rumah layak huni unuk

masyarakat miskin bekerjasama dengan berbagai pihak dan menggunakan pendanaan publik dan swasta.

Implementasi Rumah Sejahtera memiliki keistimewaan sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan.
2. Data kemiskinan terpadu dan dijadikan acuan dasar program intervensi lanjutan.
3. Mampu mengintegrasikan program-program lanjutan.
4. Pencapaian melebihi target.
5. Pemantauan, evaluasi, advokasi, dan pendampingan.

Pemangku kepentingan Rumah Sejahtera meliputi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak pemerintah meliputi pemerintah pusat dan kabupaten. Pihak swasta yang terlibat adalah perusahaan dan badan amil zakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membiayai program ini.

Dampak Rumah Sejahtera yang utama adalah meningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kemudian, meningkatkan kemitraan berbagai pihak dalam program pembangunan. Dan akhirnya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dan berbagi dengan sesama.

11. Fitting Housing Program

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Hulu Sungai Selatan Regency
units of service innovation	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Hulu Sungai Selatan Email dinsosnakertranshss@gmail.com

South Hulu Sungai Regency South Kalimantan has launched Proper Housing Program since 2012. The innovation is the provision of assistance to poor residents to build good houses.

The program concept has specific characteristics. The government builds houses for poor people assisted by many parties using public and private financial sources.

The program implementation has several distinctions.

1. Able to identify the poverty root of problems.
2. Build up an integrated poverty data that can be used for other intervention programs.
3. Able to integrate expansion programs.
4. Achievements have been reached beyond targets.
5. Monitoring, evaluation, and advocacy.

The program stakeholders are the government, private sectors, and society. The government includes the central and local government. The involved private sectors are companies and zakat administrator. The central government, local government, and private sectors finance the program.

The main impact of the program is improving the quality of houses for poor people. Then, it increases partnerships among parties in the development program. Finally, it increases people's care to others.

12. Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Inovasi Pelayanan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kalimantan Tengah Email woelan_20@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan inovasi Sistem Pengendalian Inflasi sejak tahun 2014. Inovasi ini merupakan peningkatan peran pemerintah dalam pengendalian kondisi makroekonomi yaitu tingkat inflasi dengan melakukan intervensi kepada pasar komoditas.

Konsep ini memiliki karakteristik khusus. Pemerintah memantau harga komoditas, melakukan proses pembelian komoditas, dan melakukan stabilisasi harga komoditas tersebut.

Implementasi inovasi ini terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1. Tenaga ahli melakukan kajian terhadap komoditas yang mendorong inflasi.
2. Menyusun rencana aksi untuk membeli komoditas dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar yang pengadaannya dilaksanakan pada waktu-waktu terjadinya inflasi sesuai hasil kajian.
3. Pembelian dilakukan dari berbagai tempat dan pihak termasuk di luar Provinsi.
4. Pelaksanaan Pasar Penyeimbang atau Operasi Pasar di lokasi strategis.
5. Pemberian informasi harga komoditas kepada masyarakat.
6. Inspeksi mendadak dan himbauan kepada pedagang.

Pemangku kepentingan program ini meliputi pihak pemerintah, swasta, universitas dan masyarakat. Pemerintah daerah sepenuhnya membiayai program ini.

Dampak utama inisiatif ini adalah menurunkan tingkat inflasi dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Kemudian, menjaga daya beli masyarakat sehingga mengurangi peningkatan angka kemiskinan. Dan akhirnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kemampuan pemerintah dalam mengelola krisis ketersediaan komoditas pokok.

12. Central Kalimantan Province Inflation Control System

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Kalimantan Tengah Province
units of service innovation	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kalimantan Tengah Email woelan_20@yahoo.com

Central Kalimantan Province has implemented Inflation Control System since 2014. The innovation is to improve government's role in macroeconomic control i.e. inflation rate by intervening the commodity market.

The concept has specific characteristics. The government monitors the commodity prices, buys commodities, and conducts price stabilization.

The innovation implementation consists of the following steps.

- 1. Expert studies the commodities that push inflation rate.*
- 2. Arranging action plan to buy commodities in bulk with normal prices*
- 3. Purchase commodities from many parties including from those out of the province.*
- 4. Conducting Market Operation in a strategic location.*
- 5. Providing the price of commodities to residents.*
- 6. Random inspections and suggestion to traders.*

The program stakeholders are the government, private sectors, university, and society. The local government finances the program.

The main impact of the initiative is reducing and controlling the inflation rate at the normal level. Then, it maintains the citizens' purchasing power and reduces the poverty level. Finally, it increases the people's trust in the government's ability in dealing with the main commodities distribution.

13. UPTPK : Kantornya Orang Miskin di Kabupaten Sragen

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kabupaten Sragen
Unit Inovasi Pelayanan	Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan(UPTPK) Kabupaten Sragen Email uptpk@sragenkab.go.id

Kabupaten Sragen Jawa Tengah melaksanakan inovasi Kantor Orang Miskin pada Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sejak tahun 2012. Inovasi ini merupakan peningkatan layanan kepada penduduk miskin.

Konsep Kantor Orang Miskin memiliki karakteristik khusus. Pelayanan terhadap penduduk miskin dilaksanakan di satu kantor secara terpadu, dilengkapi layanan ambulance gratis, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Implementasi inovasi ini terdiri dari beberapa tahapan berikut.

1. Membangun gedung khusus untuk pelayanan kemiskinan terpadu, satu pintu, dengan prosedur yang singkat, dan tanpa dipungut biaya.
2. Menyusun *data base* kemiskinan yang tunggal dan terintegrasi.
3. Membuat Kartu Saraswati (identitas warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dan sosial ekonomi) dan Kartu Sintawati (identitas siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan).
4. Melengkapi dengan sarana dan prasarana kantor, *ambulance* gratis antar jemput warga miskin, dan tata ruang perkantoran yang memadai.
5. Membari dan menerapkan *Standard Operating Procedure* dan Standar Pelayanan Minimal dibuat untuk menjamin kualitas pelayanan.

Pemangku kepentingan inovasi ini meliputi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak swasta yang terlibat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) and usahawan. Pihak masyarakat antara lain Badan Amil Zakat, Muhammadiyah dan NU, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Pendanaan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan sumbangan masyarakat.

Dampak inovasi yang utama adalah meningkatkan kualitas layanan kepada warga miskin dengan menyediakan informasi yang pasti dan memangkas jalur birokrasi yang panjang. Kemudian, meningkatkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam masalah kemiskinan. Dan akhirnya, meningkatkan kepuasan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

13. Integrated Service Unit for Poverty Alleviation: the Office of Poor People in Sragen Regency

Category	Encouraging Participation in Policy Making through Innovation
Agency	Sragen Regency
units of service innovation	Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan(UPTPK) Kabupaten Sragen Email uptpk@sragenkab.go.id

Sragen Regency Central Java has implemented the Office of Poor People at the Integrated Service Unit for Poverty Alleviation since 2012. The innovation is an improvement of public service towards poor people.

The office of poor people has specific characteristics. Services toward poor people are performed in one office, equipped by ambulance for free, and proper facilities and infrastructures.

The innovation implementation consists of the following phases.

- 1. Build special office to serve poor people with one door integrated service concept, minimum procedures, and free of charges.*
- 2. Build up a single and integrated poverty database.*
- 3. Make a special ID card for poor people to get social and health services (Saraswati card) and to access education (Sintawati card).*
- 4. Proper equipment is provided such as facilities and infrastructures, ambulance, and well-maintained office.*
- 5. Implementing Standard Operating Procedures and Minimum Service Standard to ensure service quality.*

The innovation stakeholders are the government, the private sectors and society. The private sectors are the companies owned by the local government and businesses. The involved societies are zakat administrators, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, NGO and citizens. All parties finance the program either from the state budget, local budget, and donations.

The main impact of innovation is improving the public service quality to poor residents by providing clear information and cutting down bureaucracy long procedures. Then, it increases the participation and cooperation of societies in poverty problems. Finally, it enhances the public satisfaction and trust to the government.

14. Yogyakarta Emergency Services (YES) 118 Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Medis Terpadu Yang Terjadi Di Wilayah Kota Yogyakarta Dengan Penjaminan 24 Jam Pertama

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Yogyakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Email sek_dinkesyk@yahoo.com

YES 118 merupakan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu di wilayah Kota Yogyakarta yang terintegrasi lintas sektoral, sehingga dapat mengurangi risiko kematian, kecacatan, dan komplikasi akibat keterlambatan pertolongan kegawatdaruratan medis/kecelakaan atau kesalahan pertolongan pada fase *pre hospital* dengan penjaminan biaya 24 jam pertama oleh Pemkot Yogyakarta.

Sebelum penerapannya di bulan November 2008, kasus kegawatdaruratan di Kota Yogyakarta tidak tertangani secara tepat dan cepat, karena masyarakat bingung untuk minta pertolongan ambulans gawat darurat.

Dalam pelaksanaannya Dinkes Kota Yogyakarta bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan 10 (sepuluh) RS Pemerintah maupun Swasta, Polresta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda Kota Yogyakarta.

Upaya kreatif inisiatif YES 118 adalah 1) pembuatan sistem penanganan kegawatdaruratan medis dan trauma; 2) penjaminan biaya kesehatan bagi korban yang ditangani YES 118; 3) pelayanan YES 118 tidak mengenal KTP dan kewarganegaraan melainkan melihat lokasi kejadian kegawatdaruratan medis; dan 4) memudahkan klaim dari rumah sakit dengan membayar klaim berdasarkan tarif dari masing masing rumah sakit.

Mekanisme pelaksanaan YES 118 meliputi:

1. Pelapor menghubungi nomor telepon 118 atau (0274) 420118 dengan memberikan informasi yang dibutuhkan;
2. Operator melakukan panggilan kembali kepada penelepon untuk konfirmasi;
3. Operator menindaklanjuti permintaan bantuan dengan cara menghubungi Tim Ambulans yang paling dekat dengan lokasi kejadian, petugas di markas bersiap-siap apabila rumah sakit terdekat tidak dapat melakukan evakuasi;
4. Tim Ambulans memberikan bantuan perawatan di rumah/di tempat kejadian dan apabila korban perlu dirujuk maka petugas akan melakukan evakuasi ke RS jejaring; dan
5. Setelah korban masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), pihak rumah sakit akan mengurus jaminan korban yang dibantu oleh Pemkot 1 x 24 jam melalui UPTD PJKD Pemkot Yogyakarta.

Pemangku kepentingan adalah unsur Pemerintahan, Swasta, BUMN, dan Masyarakat. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, teknis dan anggaran. Kapasitas pelayanan YES 118 terus meningkat dari 347 layanan di tahun 2009 menjadi 767 layanan di tahun 2014. YES 118 memberikan dampak penurunan angka kecacatan dan kematian atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi.

14. Yogyakarta Emergency Services (YES) 118, a Unified Efforts in Dealing with Yogyakarta's Medical Emergency, with a guaranteed free emergency services for the first 24 hours of care.

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Yogyakarta City
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Email sek_dinkesyk@yahoo.com

YES 118 is the first Unified Medical Emergency Response System (SPGDT) in Indonesia that provides a guaranteed free emergency services for the first 24 hours of care. It is aimed to reduce the mortality rate, disability, and complication due to the delay of emergency treatment or handling mistake during the pre-hospital phase.

Prior to November 2008, emergency cases in Yogyakarta are often not handled appropriately and in a timely fashion in which patients coming to hospitals for emergency services would need to finish the administration documents and deposit money before care was provided. Such procedure caused delays because those who took the patient to the hospital might not be their relatives nor might not have enough money to pay out-of-pocket.

This initiatives comes from Yogyakarta Health Service in collaboration with Yogyakarta's Indonesia Red Cross (PMI) and 10 hospitals (8 public hospitals, and 2 private hospitals), City Police, Regional Disaster Management Agency (BPBD), and Yogyakarta Regional Development Planning Agency.

Creative efforts in YES 118 includes of 1) medical and trauma emergency handling system 2) a guarantee of free medical treatment for the first 24 hours for patients handled by YES 118 3) the service is not limited to Yogyakarta residents but the incident must be taking place in the city limits 4) ease hospitals claim as it is now covered accordingly to each hospitals tariff.

The mechanism of services are

1. Dial 118 or (0274) 420118 and provide your information (identity of the caller, state the emergency case, and casualties condition, location, and number to be contacted)
2. Call are accepted by the operator in charge, and the operator will dial back to confirm
3. The operator then calls up the nearest ambulance to the scene; operator prepares the worst case scenario in case that the nearest hospital are unable to evacuate;
4. Ambulance team provides treatment at the scene, in case that the casualty needs to be referred to a hospital, the officer would evacuate the casualty to the nearest hospital in the network; and
5. After admitting the casualty to the hospital's emergency room (igd), the hospital would administer the casualty with the guarantee from the municipal government (uptd pjkd) for the first 24 hours.

The stakeholders are government, private sector, State Owned Enterprise (BUMN), and the society. The resource includes human resource, technical supports, and budget. YES 118 services have been increasing from 347 services in 2009 to 767 services in 2014. YES 118 decreases the mortality and disability rate for emergency cases.

15. SIJARIEMAS Sebagai Upaya Akselerasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Karawang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Email irfan.sidqi@ASNmail.go.id



Salah satu upaya yang dilakukan Dinkes Kabupaten Karawang dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir adalah dengan meluncurkan Sistem Informasi dan Komunikasi Jejaring Rujukan Gawat Darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir (SiJariEMAS).

Secara singkat, sistem ini mewadahi bidan dalam merujuk; menerima advis perawatan pra rujukan; dan memperoleh informasi ketersediaan dokter dan fasilitas perawatan melalui SMS gateway 081212395555. SMS gateway dioperasikan oleh 8 orang Bidan PTT (*call center*) yang terlatih, 2 petugas IT, melayani 24 jam 7 hari. Pasca perawatan, bidan perujuk akan mendapat konfirmasi dari rumah sakit. SiJariEMAS juga mewadahi umpan balik dari masyarakat penerima layanan sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sejak diluncurkan oleh Bupati Karawang tanggal 14 September 2013, inisiatif ini telah merujuk lebih dari 4.293 kasus.

Strategi SiJariEMAS adalah

1. advokasi Dinkes
2. fokus pada MDGS 4 dan MDGS 5
3. sosialisasi lintas sektor dan lintas program dan keterlibatan organisasi bisnis dan profesional
4. konsep rujukan yang efektif-efisien-berkeadilan
5. pengadaan sarana dan prasarana
6. seleksi tenaga kesehatan
7. pelatihan, kerja sama dengan 3 rumah sakit
8. kerja sama pelaksanaan dengan 17 rumah sakit, dan
9. peran penting *call center*.

Pemangku kepentingan terdiri atas internal (Bupati, Ketua DPRD, SKPD, Setwan), Pemprov, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, USAID, PKK serta Organisasi Wanita.

SiJariEMAS meningkatkan kesiapan rumah sakit menerima rujukan pasien gawat darurat. Keluarga pasien dan bidan pengirim rujukan juga mendapat kepastian kemana pasien harus dibawa dan mendapat advis apa yang harus dilakukan oleh bidan sebelum merujuk.

15. *SIJARIEMAS: Series of Efforts to Ensure the Safety of Maternity Patients in Karawang Regency.*

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	Karawang Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Email irfan.sidqi@ASNmail.go.id

One of the many efforts done by Health Affairs Office of Karawang Regency in reducing the rate of Maternal Death and Child Mortality is Information and Communication and Referral Network System for Maternity Emergency (SiJariEMAS). This system facilitates midwives to refer, receives advice, and obtains information on room availability through SMS gateway 081212395555. It is operated by eight midwives (on contract) for attending to the call center, and 2 IT supports staffs, serving 24 hours a day, seven days a week. Since its initiation on September 14th, 2013, the system has been used for 4.293 referrals.

The strategies to achieve its goals are:

1. *Health Affair Office's legal counseling;*
2. *Focus on MDGS 4 and MDGS 5;*
3. *Cross-sectorial and cross-program socialization and the involvement of professional organizations and business enterprises;*
4. *Ensuring effective, efficient, and fair referral system;*
5. *The provision of adequate facilities and infrastructures;*
6. *The proper selection process for health care staffs; continuous training and education;*
7. *Training cooperation with three hospitals that started September 6th, 2013*
8. *Cooperation with 17 hospitals; and*
9. *The important role of the call center.*

The stakeholders are internal stakeholder that includes Karawang Regent, Head of Local House of Representative, Task Units, and The House Secretariat; and external stakeholder that includes Provincial Government, NGOs, USAID, Family Empowerment groups, and Women Empowerment Organization.

SiJariEMAS assures the readiness of hospitals in handling various referrals of emergency cases. Patient's family and midwife can have a satisfying level of certainty on which hospital to refer the patients.

16. Jogjaplan

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah DIY
Unit Inovasi Pelayanan	Bappeda DIY Email triagusn@gmail.com

Bappeda DIY membangun sistem informasi perencanaan yang menampilkan perencanaan secara detail dan interaktif berbasis *web base* (internet), yang dapat dikunjungi setiap saat pada www.jogjaplan.com. Pengunjung dapat menelusuri secara detail perencanaan yang sedang disusun SKPD, ataupun melihat ringkasan eksekutif secara makro atas keseluruhan perencanaan yang dilaksanakan secara *real time*. Masyarakat DIY dapat berperan memberikan usulan dan pendapat secara tertulis terhadap program kegiatan yang sedang direncanakan di dalam forum Usulan Masyarakat, dengan mengupload proposal dan/atau gambar yang mendukung usulan tersebut.

Jogjaplan menjadi alat monitoring terhadap proses perencanaan di mana halaman eksekutif secara cepat dan akurat menampilkan informasi mengenai *four track strategy* dan penentuan *affirmative policy*. Ketika terjadi ketidaktepatan dalam perencanaan beserta alokasi pendanaan dapat dideteksi lebih dini serta dilakukan perbaikan.

Uji coba pertama kali tahun 2011 dan dilaksanakan tahun 2012 untuk perencanaan 2013.

Strategi pelaksanaan Jogjaplan terdiri atas:

1. penerapan aplikasi berkelanjutan
2. *quality control* sistem
3. peningkatan keterampilan staf Bappeda
4. komitmen pimpinan
5. akuntabel, keberlanjutan
6. peningkatan kapasitas pengguna dan pemanfaat aplikasi
7. dukungan operasional.

Pemangku kepentingan terdiri dari pemkab khususnya Bappeda, dunia usaha, dan masyarakat. Sumber daya Keuangan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Jogjaplan berhasil mewujudkan kemudahan dalam penyusunan dokumen; kemudahan dalam menyajikan informasi; kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan; peningkatan produktivitas kerja; transparansi dan akuntabilitas, dan memperluas jaringan partisipasi masyarakat.

Dampak Jogjaplan antara lain, trilateral desk (share kegiatan DIY dengan Kabupaten/Kota), komitmen anggaran, kejelasan mekanisme kerja, jaringan internet, ketepatan waktu pembuatan, rangkuman eksekutif, *affirmative policy*, tindak lanjut aspirasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, dan dokumen perencanaan berbasis teknologi informasi.

16. Jogjaplan

Category	<i>Encouraging Participation in Policy Making through Innovation</i>
Agency	Pemerintah DIY
units of service innovation	Bappeda DIY Email triagusn@gmail.com

Yogyakarta Regional Development Planning Agency (*Bappeda DIY*) developed an interactive web-based planning information system that can be accessed anytime at www.jogjaplan.com. The system enables visitors to surf through detailed planning formulated by Local Task Units (*SKPD*), or gaining macro perspective from a real-time executive summary on Yogyakarta's overall planning. The system provides access for the society to participate in policy making by uploading proposals and/or picture in support of an initiative presented in the Society Aspiration Forum.

Jogjaplan is a monitoring tool for the planning process. During the formulation of *RKPD*, the executive summary provides fast and accurate information on four-track strategy (pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment), establishment of affirmative policy (pertaining to location, funding allocation to development priority, affairs and strategic points in dealing with the locust of poverty). The system allows inaccuracies in planning and funding allocation to be detected earlier, and thus can be dealt with appropriately. A trial was run in 2011, and its actual operation was launched in 2012 for 2013's development planning.

It implementation strategy includes

1. Sustainable application practice
2. Quality control system
3. Continuous improvement of *Bappeda* employer's skill
4. Top management commitment
5. Accountability and sustainability
6. Improvement of users capacity and the utilization of the application
7. Operational supports.

Stakeholders consist of regency government especially *Bappeda*, private sectors and the general public. *Jogjaplan* is funded through Yogyakarta City's annual budget. Outputs from the initiative are convenience in the formulation of planning document; convenience in presenting the information; convenience in task completion; an increase in work productivity, transparency and accountability; and encouraging society participation.

The notable outcomes from *Jogjaplan* are trilateral desk, commitment to funding, clarity on working mechanism, internet network, timeliness of application development, executive summary, affirmative policy, follow up societies aspiration, transparency and accountability, and last but not least planning document basing on information technology.

17. E-SAMSAT JATIM – Layanan Tanpa Batas Jarak, Ruang, dan Waktu

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	UPT DIPENDA Jatim - Bojonegoro Email pajakdipendajatim@yahoo.co.id

E-SAMSAT JATIM yang diresmikan di Madiun pada Gelar Pelayanan Publik tahun 2011 merupakan jenis layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis internet yang pertama di Indonesia dan dicatat oleh *REKOR MURI* sebagai “*Layanan Pertama di Indonesia Pengguna Produk Perbankan*”.

Pengembangannya dimulai sejak tahun 2009 lewat peluncuran Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro berupa SAMSAT Keliling dan SAMSAT *Payment Point*. Inovasi ini berupaya menyelesaikan beberapa permasalahan terkait keharusan pembayar pajak mendatangi kantor SAMSAT dan praktik percaloan.

Dalam menyusun layanan E-SAMSAT JATIM, Dipenda Jatim bekerja sama dengan Pol-da Jatim, Jasa Raharja, dan Biro Hukum Provinsi Jatim, serta Perbankan.

E-SAMSAT JATIM mempunyai enam strategi, yaitu 1) perencanaan sistem; 2) pembangunan sistem; 3) legalitas; 4) uji coba; 5) layanan; dan 6) sosialisasi.

E-SAMSAT JATIM menghasilkan keluaran berupa:

1. terbentuknya paradigma baru bahwa membayar pajak itu mudah, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus ada kendala ruang, waktu dan jarak;
2. meningkatkan pencairan piutang pajak kendaraan bermotor;
3. mengatasi kendala yang bersumber dari kurangnya jumlah pegawai;
4. layanan pembayaran pajak lebih efektif karena tidak perlu melampirkan BPKB asli
5. efisiensi biaya bagi wajib pajak.

Untuk memfasilitasi pembayar pajak yang tidak memiliki rekening bank, KB SAMSAT Bojonegoro sejak tahun 2013 bekerja sama dengan perbankan membuat layanan *channel PPOB (Payment Point Online Bank)* yang merupakan layanan/loket pembayaran *online* yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, seperti pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM, dan pulsa elektronik.

17. East Java's SAMSAT – Service Without Distance, Space, and Time Boundaries.

Category	Encouraging Participation in Policy Making through Innovation
Agency	Jawa Timur Province
units of service innovation	UPT DIPENDA Jatim - Bojonegoro Email pajakdipendajatim@yahoo.co.id

East Java's Single Window Administration System (SAMSAT) which was inaugurated Public Service Exhibition 2011 inaugurated E-SAMSAT is an online payment system for Motorized Vehicle Tax in East Java Province.

Its development began in 2009 through Mobile SAMSAT and SAMSAT Payment Point in Bojonegoro Regency's SAMSAT Joint Office.

In building the electronic system, East Java's Local Revenue Office (Dipenda) worked in cooperation with East Java Police Departement, Jasa Raharja, and East Java Government Legal Affairs Bureau.

East Java's E-SMASAT utilizes six strategies that include 1) system planning; 2) system development; 3) legality; 4) trial run; 5) its actual service; and 6) socialization.

Its output includes:

- 1. The new paradigm in tax paying*
- 2. Improvement in the level of tax obedience*
- 3. Deal with the problem arises from Dipenda's employee turnover*
- 4. Reducing the number of documents required when taxpayers pay their tax*
- 5. Provide cost efficiency for taxpayers.*

To facilitate taxpayers who don't have a bank account, since 2013 Bojonegoro Regency's SAMSAT Joint Office in cooperation with banking community have been operating Online Payment Point in banks and other financial institutions.

18. Reformasi Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Unit Inovasi Pelayanan	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat
	Email anggraenidewi212@yahoo.com

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) yang dirintis sejak tahun 2004 merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Di Kabupaten Bandung Barat, PIK-R/M digerakkan oleh Formasi (Forum Remaja Sehat Ideal) yang merupakan tempat berhimpun para pengelola dan masyarakat yang peduli terhadap pengembangan PIK-R.

Pembentukan PIK-R/M diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan, ramah remaja dan ramah mahasiswa (*youth friendly*), peningkatan komitmen dengan *stakeholder*/mitra kerja, peningkatan pelayanan Kependudukan dan KB yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata, dan peningkatan kompetensi.

Strategi PIK-R/M adalah 1) advokasi; 2) promosi dan sosialisasi; 3) dukungan anggaran; 4) pemberdayaan; 5) fasilitasi; 6) konsultasi; 7) pelatihan; 8) orientasi, magang, dan studi banding; 9) pengembangan materi substansi; 10) kegiatan yang menarik; 11) sarana dan prasarana; 12) pembinaan; 13) pemanfaatan; dan 14) evaluasi berjenjang.

Pemangku kepentingan meliputi Pemkab sampai Kecamatan dan Kelurahan/Desa; BKKBN Pusat dan Daerah, Dinas terkait; pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, pimpinan organisasi keagamaan/kepemudaan, Kwartir Pramuka, Media massa, BUMN/BUMD, dan Apindo. Sumber daya meliputi pendanaan dari APBN dan APBD (BKKBN), SDM (peduli dan bertanggung jawab), teknis, kelembagaan (peraturan), serta sarana dan prasarana (kelengkapan infrastruktur kegiatan).

Keluaran PIK-R/M yang paling berhasil adalah

1. promosi melalui radio dan televisi
2. Rumah Remaja Batujajar dan Latanza Cipongkor sebagai wadah keberlanjutan
3. peningkatan kegiatan konseling remaja dari 10 kelompok pada tahun 2007 mejadi 171 kelompok pada tahun 2015
4. meningkatnya remaja dalam kegiatan PIK-R/M, akses dan kualitas layanan
5. terbentuknya *CoE (Center of Excellence)* PIK-Remaja yang mewadahi magang, studi banding, kajian, olah raga alam dan kegiatan seni-budaya.

18. Management Reform on Youth Counseling and Information Center

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Bandung Barat Regency
units of service innovation	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat
	Email anggraenidewi212@yahoo.com

Youth/College Students Counseling and Information Center (PIK-R/M) concept is started in 2004. It is a medium for GenRe Programs in preparing the youths for family life, with its operation run by the youths and college students themselves. It provides information and counseling services on family planning and other supporting activities.

The initiative of PIK-R/M and Teenager Problem Solving group comes from Ideal Teenager Forum (Formasi). Formasi is an assembly of society and management who are concerned with the development of PIK-R in West Bandung Regency.

The goals of PIK-R/M are the increase of management quality, youth friendly, increase of stakeholders and partner's commitment, improvement of civil registry and family planning and integrating it into fieldwork experience, and competency improvement.

PIK-R/M's strategies are 1) advocacy; 2) promotion and socialization; 3) budget support; 4) empowerment; 5) facilitation; 6) consultation; 7) training; 8) orientation, internships, and benchmarking; 9) developing substantive contents; 10) attractive events; 11) facilities and infrastructures; 12) public education; 13) utilization; and 14) layered evaluation.

Stakeholders include regency government to the level of sub-district and village; central and local family planning agency; related services; university top management; headmaster; leaders of religious/youth groups; Indonesia Scout; mass media, and business enterprises.

The noteworthy outputs of PIK-R/M are

- 1. Promotions through radio and television.*
- 2. BatuJajar Youth Base, Lanza Cipongkor as the manifestation of its sustainability*
- 3. The proliferation of youth counseling activity from 10 groups in 2007 increased to 171 groups in 2015*
- 4. The increase of youth participation in PIK-R/M activities, accessibility and service delivery*
- 5. The formation of PIK-R/M Center of Excellence/CoE (internship place, benchmarking, research, nature sports, arts, and culture).*

19. SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi - UPTD Puskesmas Sempu Email pkm_sempu@yahoo.co.id

Stop Angka Kematian Ibu dan Anak (SAKINA) merupakan serangkaian upaya mengurangi risiko kematian ibu hamil dan anak di Kecamatan Sempu.

Strategi pelaksanaan inovasi ini terdiri atas:

1. Penyediaan RUMAH SINGGAH di Jambewangi yang menjadi tempat transit ibu hamil yang akan melahirkan
2. Pengadaan ambulans khusus LAJU (Layanan Jemput Ibu) 24 jam gratis
3. Mendistribusikan stiker LAJU yang memuat tanda-tanda persalinan dan nomor hp yang bisa dihubungi
4. Pembentukan LASKAR SAKINA yang melakukan pendampingan dan konsultasi ibu hamil secara gratis
5. Melakukan sosialisasi melalui UPTD Pendidikan, Organisasi Wanita, Radio FM Al-Azhar, dan Jawa Pos Radar Banyuwangi

LASKAR SAKINA yang menjadi ujung tombak inovasi ini bertugas antara lain melakukan pelatihan tanda kehamilan, mengidentifikasi ibu hamil risiko tinggi, mensosialisasikan cara pengisian kartu skor Puji Rohyati, memandu praktik pemeriksaan kencing dengan *PP-test*, mendata ibu hamil di wilayah Kecamatan Sempu, melakukan kunjungan rumah, menempel stiker SAKINA di samping stiker P4K, menyusun laporan bulanan dan evaluasi, dan mengampu kelas bumil di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantutu, dan Polindes. Pendanaan SAKINA murni berasal dari dunia usaha, lembaga pendidikan kesehatan, produsen obat dan susu, serta perbankan.

Keluaran konkrit selama tahun 2014 meliputi terbentuknya Laskar SAKINA; terselenggaranya kegiatan PAK ADI BU SITI (Petugas Kesehatan, Anak, dan Ibu Bersama Untuk Solusi dan Tindak Lanjut); konseling pada setiap calon pengantin; jambore bumil dan kader kesehatan (243 peserta); konsultasi dan diskusi; kuis berhadiah; senam bumil; dan pemeriksaan golongan darah dan Hb. Program SAKINA mampu menggerakkan semua elemen masyarakat mulai dari PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga berbagai organisasi pemberdayaan wanita.

19. SAKINA (Stop Kematian Ibu dan Anak) / Stop Maternal and Infant Mortality

Category	The Improvement of Public Service Delivery
Agency	Banyuwangi Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi - UPTD Puskesmas Sempu Email pkm_sempu@yahoo.co.id

SAKINA was initiated 3rd of January 2014. It strives to provide excellence service in reducing maternal mortality and infant mortality. Team SAKINA utilizes a targeted, systematic, and efficient action plan. It dictates that LASKAR SAKINA is responsible for holding training on signs of pregnancy, high-risk pregnancy, methods for filling out Puji Rohyati score card; socializing methods for urine test for pregnancy; conducting census of pregnant women; performing home visits.

The strategies for SAKINA are:

1. SAKINA provides transit house for maternal patients in Jambewangi;
2. Free 24 hours ambulance service (LAJU/Mother's Pick up Service);
3. Distribute stickers containing information about LAJU, signs of labor, and emergency telephone number;
4. Formation of LASKAR SAKINA;
5. Education Task Units, Women Empowerment Organization, Al-Azhar Radio, and Jawa Pos' Radar Banyuwangi as its socialization medium.

Stakeholders include Banyuwangi Regency, Health Care Center, LASKAR SAKINA, societies, and mass media. Funding originated from business enterprises, health education organizations, and banks.

SAKINA has mobilized all element of the society (PKK, community leaders, religious leader, and Women Organization) to work together and ensure that maternal patients in Sempu Sub-district are well-taken care. It has shifted the society's mindset and culture set that had in the past revolved around the idea that fatality during childbirth was something a woman should be thankful for since it is considered a good death religiously. SAKINA gives new sense optimism to the society that fatalities can be averted if pregnancies are well checked, all preparations for emergencies are made, and only competent and trained birth attendants handle labors.

20. INTAN

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Email pusdatinpemalang@bpn.go.id

Guna menyelesaikan permasalahan terkait informasi pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang meluncurkan INTAN (Inovasi Pertanahan); sebagai sarana akses informasi pertanahan yang dikelola oleh sistem SMS *Center* +62 821 3561 3561 dengan dukungan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (SKKP) berbasis aplikasi *web* yang andal.

INTAN juga mencakup modul pelayanan Informasi Zona Nilai Tanah, Peta Tematik, Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kepentingan Izin Lokasi; penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; pelayanan nomor identifikasi bidang tanah (*checkplot*) dan layanan analisis *geo spacial* terhadap ketersediaan lahan; serta rencana tata ruang wilayah. Masyarakat cukup datang ke loket dengan menunjukkan letak lokasi, komputer segera menganalisis dan menghasilkan jawaban apakah lokasi sesuai/tidak, sudah bersertifikat/belum, nilai tanah dan analisis *geo spacial* lainnya.

Keluaran utama INTAN meliputi,

1. Jenis pelayanan pertanahan, persyaratan pensertifikatan tanah, dan pemantauan posisi berkas pelayanan
2. Penanganan pengaduan masyarakat dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan
3. Penyampaian saran, pendapat, dan penghargaan masyarakat kepada Kantor Pertanahan terkait dengan perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
4. Penyediaan informasi ZNT dan ZNEK untuk kepentingan rencana investasi; dan
5. Penyediaan informasi *geo spacial* tematik terkait informasi tanah terdaftar, batas administrasi wilayah yurisdiksi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan informasi sawah/lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pemangku kepentingan terdiri atas Pemda, Notaris, PPAT, Surveyor Berlisensi, Perbankan dan Masyarakat. Pendanaan kegiatan dilokasikan dari APBD.

INTAN merupakan inisiatif KPKP didukung Kanwil BPN Provinsi Jateng dan Pemkab Pemalang atas tuntutan mendapatkan layanan pertanahan yang cepat, tepat, transparan, dan anti korupsi. Penggunaan dan pengembangan modul baru, perbaikan kualitas layanan dan kemudahan layanan pada bagian *front* dan *back office*, mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan pertanahan, dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.

20. INTAN

Category	<i>The Improvement of Public Service Delivery</i>
Agency	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
units of service innovation	Land Office of Pemalang Regency e-mail pusdatinpemalang@bpn.go.id

Using information and communication technology for providing public service, Land Office in Pemalang Regency (KPKP) launched INTAN as a tool to access information about land managed by SMS Center +62 821 3561 3561 system with the support of Land Office Computerized System (LOCS) accountable web based application.

INTAN development was also conducted to the service module (Land Value Zone Information, Thematic Map and Land Technical Consideration for Location Permission Purpose), land location for development regarding public interest, land identification number service (check plot) and geospatial analysis service regarding the availability of land also the regional spatial plan.

INTAN main outputs are:

- 1. Land certification requirements and service file position tracking;*
- 2. Public complaints handling and service management system;*
- 3. Suggestion, opinion and appreciation from society to the Land Office regarding performance improvement and service quality improvement;*
- 4. Availability of ZNT and ZNEK information for investment plan purpose;*
- 5. Availability of thematic geospatial information regarding registered land, the administrative limit of jurisdiction area, control, ownership, and use of land and also information about paddy fields/sustainable agricultural field.*

The stakeholders are the local government, notaries, INTRAC (Analysis of Financial Transactions Reporting Centre), Licensed Surveyors, Banking Sector, and Society. INTAN resources consist of Human Resources (Leader's Commitment), funding, infrastructures, and technicality (use of information technology network).

INTAN was an initiative of KPKP and supported by the Central Java Regional Office of National Land Agency and Pemalang Local Government as an answer to society demand for fast, accurate and free from corruption land service. The use and development of a new module, improvement of service quality and simplicity of service in the front and back office could create efficiency and effectiveness of land service and increase coordination among stakeholders.

21. Sistem Penilaian Prestasi Kerja *Online* Kemenperin

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Kementerian Perindustrian
Unit Inovasi Pelayanan	Biro Kepegawaian - Setjen Kementerian Perindustrian Email heruwidi@gmail.com

Sistem Penilaian Prestasi Kerja *Online* (SPPKO) Pegawai Kemenperin merupakan sistem management kinerja berbasis internet di lingkungan Kemenperin. Sistem ini menggabungkan beberapa manajemen pegawai *online* yang sudah ada.

Tahapan penerapan SPPKO terdiri atas

1. pengembangan sistem intranet yang dapat diakses di mana saja dengan menggunakan internet
2. pengembangan infrastruktur, sistem dan portal intranet, Sistem Absensi Elektronik, SIPEG, dan *e-SPPD*
3. pengembangan sistem *e-Disposisi*, *e-Monitoring*, *e-Budgeting*, *e-SILK*, *e-Procurement*, dan *e-Lincesing* (2007-2009)
4. reorganisasi Kemenperin dengan memasukkan fungsi manajemen kinerja, *upgrading* dan standardisasi alat absensi
5. *upgrading* alat absensi *realtime* terkoneksi dengan Portal Intranet
6. pengembangan Sistem SKP *Online*
7. Penerapan Integrasi Sistem Absensi, Sistem Pembayaran Tunjkin, Sistem Penilaian Kinerja, dan Sistem SKP *Online*

Pemangku kepentingan internal meliputi jajaran unit kerja Kementerian terkait dan eksternal yang antara lain mencakup Kemen PANRB dan Kemenkominfo, Dunia Usaha/Swasta, dan masyarakat.

SPPKO Kemenperin dibiayai DIPA dengan pengelolaan swakelola. Beberapa hasil SPPKO adalah tersusunnya SKP Pegawai melalui sistem; tercatatnya aktivitas laporan kegiatan pegawai; efisiensi penggunaan bahan alat tulis perkantoran; terukurnya produktivitas pegawai; terpusatnya database absensi dan kinerja pegawai; terlaksananya proses manajemen kinerja di lingkungan Kemenperin; dan terintegrasinya sistem dan fitur-fitur pemanfaatan aktivitas pegawai secara *online* dan *realtime*; pembayaran tunjangan kinerja tepat waktu; sistem pengingat (*alert*) terhadap kelalaian; dan produktivitas kerja pegawai.

21. Online Performance Evaluation System of Ministry of Industry

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Kementerian Perindustrian
units of service innovation	Biro Kepegawaian – Setjen Kementerian Perindustrian e-mail heruwidi@gmail.com

Online Performance Evaluation System (SPPKO) for employees of Ministry of Industry is an internet based performance management system. The system is an integration of the several existing employee management system.

The implementation strategies of SPPKO are:

1. *Developing an intranet system that can be accessed everywhere by using internet (2005);*
2. *Development of infrastructure, internet system and portal, Electronic Attendance System, SIPEG and e-SPPD (2006);*
3. *Development of e-Disposition, e-Monitoring, e-Budgeting, e-SILK, e-Procurement, and e-Licensing (2007-2009);*
4. *Ministry of Industry reorganization by including performance management function, and Attendance tool upgrade and standardization (2010-2011);*
5. *Real-time attendance tool connected to the intranet portal;*
6. *Development of Performance Allowance Payment System based on attendance and performance (2012);*
7. *Development of SKP online system (2013);*
8. *Implementation of Integrated Attendance System, Performance Allowance Payment System, Performance Evaluation System and online SKP System (2014)*

The internal stakeholders consist of the lines of units in the related Ministry and external stakeholders consist of Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform, Ministry of Communication and Information, the business/private sector and the society.

SPPKO integrated the several systems. Employees are required to make Employee Working Target (SKP) Application System every beginning of the year. Every late attendance and early leave of employees can be shown in real time on the Performance Allowance cut. Administrative officers in every Work Unit from Aceh to Ambon upload employee attendance, and Human Resources Bureau Administrator receives data from every Unit gradually. The accuracy of employee attendance data is still doubtful since there are involvements of attendance administrator who alter the data before uploaded.

22. ODHALINK

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Unit Inovasi Pelayanan	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan Email retnodyah_lestari@yahoo.com

ODHA *link* (Orang Dengan HIV/AIDS *link*) merupakan akses yang disediakan RSUD Bangil bagi masyarakat umum dan pasien penderita HIV/IDS untuk mengetahui informasi, menyampaikan keluhan dan pengobatan.

Inovasi ini merupakan kelanjutan dari penyediaan Klinik VCT/VST yang telah dirintis sejak tahun 2012, dan terdiri atas:

1. *On Line SMS 24 Jam*, dengan strategi:
 - a. memberikan kartu nama dengan nomor telepon semua petugas VCT, CST dan Farmasi kepada Puskesmas, LSM, KPA, kelompok risiko tinggi, layanan klinik Spesialis, dan ruangan rawat inap
 - b. masyarakat dapat bertanya mengenai HIV/AIDS
 - c. follow up pasien yang akan test
 - d. test berkelanjutan untuk pasien indeterminate, pasien resiko tinggi, serta pasien yang memulai dan yang sudah mendapat ART
2. *Delivery Order*
3. *High Access*, dengan strategi

a. penyuluhan	c. edukasi	e. keterampilan, dan
b. promosi	d. pelatihan	f. mobile visit



Pemangku kepentingan terdiri dari jajaran internal RSUD Bangil dan eksternal (instansi di luar RSUD Bangil, Pemkab, Dunia Usaha, dan Swasta). Keberhasilan klinik VCT/CST antara lain berkat komitmen dan dukungan pimpinan serta kesungguhan petugas, Dinas Kesehatan, KPA, dan LSM. Sumber daya terdiri atas sumber Daya Keuangan (APBD), sumber daya manusia (keterampilan), teknis (pelayanan, sarana dan prasarana), dan kelembagaan (regulasi). Manfaat ODHA *link* (pelayanan 24 jam *online*, *delivery service*, dan *high access*), dinikmati pasien, kepuasan petugas, ketepatan waktu pelayanan, disiplin minum obat, kepercayaan pasien kepada rumah sakit, silaturahmi, dan keberlanjutan.

22. ODHALINK

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pasuruan Regency
units of service innovation	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan Email retnodyah_lestari@yahoo.com

ODHA link – is a system accessible to the public and patients with HIV/AIDS to find out information, file a complaint and treatment. The innovation is a continuance of VCT/VST clinic that was started since 2012.

ODHA Link implementation strategies are:

1. *Online SMS 24 hour, with the strategy:*
 - a. *Handing out name cards with the contact of all VCT, CST, and pharmacy official to the Health Care Center, NGO, KPA, high risks group, specialist clinic service, and inpatient;*
 - b. *Consultation on HIV/AIDS;*
 - c. *Following up on the patients preparing for a medical check up;*
 - d. *Continual testing for the indeterminate patient, high-risk patient, and patients that had started and received ART.*
2. *Delivery order;*
3. *High Access, with the strategy:*
 - a. *Counseling;*
 - b. *Promotion;*
 - c. *Education;*
 - d. *Training;*
 - e. *Skill; and*
 - f. *Mobile visits.*

The stakeholders consist of internal lines of Bangil Public Hospital and external (agencies outside of Bangil Public Hospital, local government, business sector, and private sector). The success of ODHA link could be seen from the increasing number of the VCT/CST clinic visits from 2012 until 2015 (counseling, treatment, referrals from public health centers and referral from other ART-referred hospitals across Indonesia), and Transexuals/Gay/MLM are already open-minded.

23. Cegah Kanker Serviks, Perempuan Tersenyum

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Badung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Email ptmbadung@yahoo.com

Bupati Badung sekaligus Penglingsir Puri yang sangat mengayomi Kramanya, bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Badung, meluncurkan program “Cegah Kanker Serviks, Perempuan Tersenyum” (CKSPT), berupa vaksinasi secara massal dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD.

Program CKSPT disertai penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) responsif gender, dan program Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) yang menyoal anak-anak sekolah dan masyarakat umum melalui penyuluhan kesehatan, pembuatan poster, lomba paduan suara, simulasi, serta pementasan drama tradisional.

Strategi pelaksanaan pencegahan kanker serviks meliputi penyuluhan langsung (tatap muka) dan tidak langsung (media cetak dan elektronik). Vaksinasi kanker serviks di Kabupaten Badung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2012 bagi 1.502 siswi kelas X SMAN se-Kabupaten Badung di tahun 2012. Di tahun 2013 dan 2014 jumlah siswi yang berhasil divaksinasi meningkat menjadi masing-masing 2.255 dan 2.150 orang.

Pemangku kepentingan meliputi Bupati dan Dinas terkait, RSUD, YKI, POGI, IDI, dan IBI Kabupaten Badung, teman sebaya, keluarga, dan remaja perempuan. Pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Badung. CSPKT berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan anak didik tentang pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi, menyediakan proteksi spesifik terhadap perempuan dari infeksi HPV, meningkatkan kepedulian; dan mengurangi beban masyarakat.

23. Prevent Cervix Cancer, Women Smile

Category	Supporting Gender Responsiveness in Providing Public Service
Agency	Badung Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Email ptmbadung@yahoo.com

As an anticipation, based on initiative of Badung Regent who is also a Ruler ([Penglingsir Puri](#)) who is really protective to his society (Krama), in synergy with Public Health Office and Indonesia Cancer Foundation (YKI) chapter Badung, on 12 November 2012 Badung Local government launched “Prevent Cervix Cancer, Women Smile”, in the form of mass vaccinations with full funding from the local government budget.

This program is conducted along with gender responsiveness Clean and Healthy Lifestyle (PHBS) implementation and the Ultimate Integrated Cancer Handling (PKTP) program that aim to create understanding for female students and society about the importance of early prevention of cancer. PKTP is targeting female students and society through health counseling, posters making, choir competition, simulation, traditional theatrical performance.

The strategy of cervix cancer prevention is conducted with action plan that consists of direct counseling (face to face) and indirect counseling (printed and electronic media) cooperation with Indonesia Obstetrics and Gynecologist Union (POGI) with the result of 2.117 women (2012), 3.492 women (2013) and 2.833 (2014).

The stakeholders are the Regent and related Office, Regional Hospital, YKI, POGI, IDI and IBI Badung Regency, peers, families and female youths.

The program brings benefit to Badung local government, (“healthy, future investment”, protection to female students), Community Health Care Centers (Puskesmas) in Badung Regency (gender responsiveness, access, benefit, participation, and control of economic and socio-culture resources), female youths (risk factors and initiation), YKI (synergy) and society (cost reduction).

24. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan – Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Email sidomulyopuskesmas@gmail.com

Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) merupakan usaha Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo (PRIS) dalam menghimbau masyarakat agar siaga terhadap munculnya masalah kesehatan jiwa dengan cara memberikan informasi tentang kesehatan jiwa.

Masalah utama yang harus diselesaikan adalah (1) penyuluhan tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat; (2) penyediaan ambulans agar tidak terjadi pasien jiwa putus obat; (3) pendataan pasien gangguan jiwa; (4) sosialisasi cara perawatan pasien gangguan jiwa *post* dirawat dan pengawasan terhadap pasien gangguan jiwa dalam minum obat; dan (5) peningkatan kepedulian kepada pasien gangguan jiwa.

Pemangku kepentingan terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan Kepala UPT PRIS, para Kepala Desa atau Toma, pemegang program kesehatan jiwa, dokter umum, petugas kesehatan, dan masyarakat pengguna layanan.

Sumber daya keuangan berasal dari Dana Jamkesmas dan Jamkesda, dan mulai tahun 2014 menggunakan Dana Kapitasi JKN.

Strategi pelaksanaan PKJM terdiri atas

1. penyusunan usulan PKJM oleh PRIS, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan RSJP Bandar Lampung
2. pelatihan petugas kesehatan PRIS
3. pembentukan Tim Penanganan Pasien Gangguan Jiwa di PRIS
4. kerja sama PRIS dengan RSJP Bndar Lampung (MoU 27 April 2011)
5. sosialisasi lintas sektoral tentang kesehatan jiwa
6. penyediaan ambulans untuk transportasi ke RSJP Bandar Lampung
7. pembuatan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) alur pengobatan pasien gangguan jiwa.

Terdapat empat keluaran utama PKJM, yaitu tercatatnya data pasien gangguan jiwa di desa; berkurangnya angka kekambuhan, terlaksananya pelayanan klinik konsultasi jiwa dan perawatan sederhana pasien gangguan jiwa, serta fasilitas mobil ambulans untuk merujuk pasien gangguan jiwa yang parah.

24. Community Mental Health Service

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Lampung Selatan Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan – Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Email sidomulyopuskesmas@gmail.com

The Leader of Inpatient Community Health Center of Sidomulyo (PRIS) South Lampung Regency launched Community Mental Health Services (PKJM). PRIS urged to be alert to the emergence of mental health problems in the community by providing information about mental health so that society know about mental disorders.

The main problems to be solved are (1) education about mental health to the public; (2) the provision of ambulances to avoid withdrawal of psychiatric patients; (3) collecting data of patients with mental disorders; (4) socialization about how to take care post-treated mental patients and control of mental disorders patients in taking medication; and (5) increasing concern to patients with mental disorders.

PKJM implementation strategies are:

- 1. Advocacy of proposal of PKJM (PRIS, District Health Office, and RSJP Bandar Lampung);*
- 2. Training of PRIS health workers,*
- 3. The formation of Mental Disorders Patient Management Team in PRIS;*
- 4. PRIS cooperation with RSJP Bandar Lampung (MOU 27 April 2011);*
- 5. Cross-sector socialization on mental health,*
- 6. Provision of ambulances to transport patients to RSJP Bandar Lampung;*
- 7. The making and implementation of the Standard Operating Procedures (SOP) of the treatment course for patients with mental disorders.*

Stakeholders are the Head of South Lampung Health Services, and Head of UPT PRIS, village head or Toma, holders of mental health program, general physician, medical staffs, and societies. Funding originates from Jamkesmas and Jamkesda fund and starting from 2014 it utilizes JKN Kapitasi Fund.

There are four outputs PKJM, they are: the data records of mental disorder patients in rural villages; reduced recurrence rate (due to withdrawal and take medication regularly), the implementation of clinical psychiatric consultation service and simple maintenance of patients with mental disorders; and facilities ambulance to refer patients to severe mental disorders. PRIS PKJM is sustainable and likely to be replicated.

25. SMS Sehat Bagi Masyarakat Jambi

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Provinsi Jambi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Email ummi2103@gmail.com

Dinas Kesehatan Provinsi (Dinkesprov) Jambi melaksanakan program penyuluhan inovatif yang murah, mudah dan populer, yaitu pemberian informasi kesehatan melalui media SMS (*short message service*) dengan nama “SMS Sehat” untuk mengatasi kesulitan melakukan mobilisasi massa, minimnya dana penyuluhan untuk promosi kesehatan, kurangnya jumlah tenaga promosi kesehatan yang kompeten, dan luasnya wilayah kerja.

Sasaran SMS Sehat adalah seluruh kader kesehatan, kader PKK Desa dan Kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

Alur pelaksanaan kegiatan SMS sehat adalah sebagai berikut:

1. Operator menyusun materi pesan yang akan disampaikan
2. Dari operator pesan disampaikan kepada pemegang kartu SMS Sehat, dan
3. Pesan akan dilanjutkan kepada kelompok-kelompok pengajian, dasawisma atau paguyuban yang ada di wilayahnya.

Strategi SMS Sehat dimulai dengan kajian akademis, pembahasan strategi pelaksanaan, penyiapan sarana dan SDM, koordinasi, sosialisasi, pendataan awal jumlah kader, daftar penerima pesan SMS, perjanjian kerja sama dengan Telkomsel, pembagian kartu telepon seluler, dan pendistribusian kartu melalui Puskesmas di Kabupaten/Kota.

Pemangku kepentingan meliputi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinkeskab/kot se-Provinsi Jambi, Bappeda, Tim Penggerak PKK (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa), Camat dan Lurah/Kepala Desa, Tokoh masyarakat, LSM, petugas promosi kesehatan, dan Telkomsel. Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jambi.

Keluaran yang paling menonjol meliputi cepatnya pencapaian pesan sehat, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS, penyebaran informasi pencegahan penularan penyakit sehingga memutus mata rantai penularan penyakit dan menurunkan angka kejadian penyakit di wilayah bermasalah. PHBS meningkatkan peran serta kader, tokoh masyarakat, tim penggerak PKK serta kepala desa dalam penyebarluasan informasi pesan kesehatan.

25. Healthy SMS for Society in Jambi

Category	<i>Promoting Collaborative Approach-Based Government in Information Era</i>
Agency	Jambi Province
units of service innovation	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Email ummi2103@gmail.com

Provincial Public Health Office (Dinkesprov) of Jambi implemented an innovative outreach programs are cheap, easy and popular, namely the provision of health information through SMS (short message service) using the mobile phone with the name of “Healthy SMS” to overcome the difficulties in mobilizing the masses, lack of counseling funds for health promotion, the lack of competent health promotion personnel, the extent of the work area, and the increasing number of mobile users in all over the province of Jambi.

Healthy SMS target is the entire health cadres, PKK village and sub-district cadres, village chiefs, and public figures.

Healthy implementation strategies are:

- 1. Operator composes messages material to be conveyed;*
- 2. Message is delivered to the SMS healthy card holder;*
- 3. The message will be delivered to the Islamic study groups, or existing mother groups or associations in its territory.*

Healthy SMS strategy begins with academic studies, discussions of implementation strategy, preparation of facilities and human resources, coordination, socialization, early identification number of cadres, the list of SMS recipients, and cooperation agreement with Telkomsel, the distribution of mobile phone cards, and card distribution through Public Health Centers in the Regency/City.

Stakeholders include Dinkesprov, Dinkeskab/Kota throughout Jambi, BAPPEDA, the PKK teams (provincial, regency, sub-district, and village), sub-district and village chief/head of the village, public figures, NGOs, health promotion officers, and Telkomsel.

Benefits of Healthy SMS significantly increase the participation of cadres, public figures, PKK and village chiefs in the dissemination of information, and public knowledge about PHBS, breaking the chain of transmission of the disease, reducing the incidence of disease, empowering communities, transparency, budget savings, and overcoming human resources limitations.

26. Layanan Tujuh Menit (Lantum)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Email bASNby2@yahoo.com

Layanan Tujuh Menit (Lantum) adalah pelayanan pertanahan terhadap pendaftaran Pengecekan Sertipikat dan Hapusnya Hak Tanggungan yang diselesaikan dalam waktu 7 menit. Layanan ini diberikan pada lokasi yang telah menggunakan Register Dokumen (Buku Tanah dan Surat Ukur) Elektronik.

Semua permohonan yang didaftarkan melalui Lantum diproses dan diselesaikan di loket pendaftaran serta ditandatangani oleh petugas Lantum.

Inovasi ini dicoba dalam 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu Pengecekan Sertifikat dan Roya dari Hak Tanggungan. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan basis kelurahan dan hingga saat ini sudah melibatkan 13 kelurahan. Pemangku kepentingan Lantum selain internal Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah masyarakat umum, PPAT/mitra kerja lain, dan seluruh pengguna aplikasi KKP.

Sumber daya teknis meliputi penyatuan penyimpanan Register Buku Tanah, *entry* data Buku Tanah dan Surat Ukur, plot peta, *scan* Buku Tanah dan Surat Ukur, validasi data digital, blokir Buku Tanah dan Surat Ukur yang tidak dapat divalidasi, penetapan penggunaan buku tanah digital, dan pelimpahan kewenangan kepada petugas.

Keluaran yang paling berhasil adalah perolehan informasi yang seketika dan akurat oleh masyarakat.

26. Seven Minutes Services (Lantum)

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
units of service innovation	Kantah, City Surabaya II e-mail bASNby2@yahoo.com

Seven Minutes Services (Lantum) is a land service given to the registration of Certificate Checking and Termination of Mortgage Rights that finished in 7 minutes. This service is provided at the location that has been using Electronics Document Register (Land Book and Measurement Certificate).

All the application filed by Lantum is only processed and completed at the registration counter and signed by the Lantum officer.

The initiative was tested in two (2) types of services, namely Certificate Checking and Termination of Mortgage Rights. Implementation is done gradually with the base of the village. Until now, 13 villages already received Lantum services. Involved in the implementation of Lantum, are the general public, PPAT officials/other partners, Land Office officers, and all users of the KKP application (Regency/City Land Office, regional offices or head office) who are digital document information users.

Technical resources include storage pooling of Land Book Register, Land Book data entry and Measurement Certificate, plot maps, scans of Land Book and Measurement Certificate, digital data validation, blocking of Land Book and Measurement Certificate that can not be validated, the determination of use of digital land books, and delegation of authority to the officer.

The most successful outcomes are: by using digital land books, the information can be obtained instantly and accurately. The public could find out whether the certificate filed for checking or termination of mortgage rights can/can not be processed immediately.

27. Model Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas Kampus Kota Palembang

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Palembang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kota Palembang Email khushhot@yahoo.co.id

Model Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (PKTI) di Puskesmas Kampus Kota Palembang adalah integrasi pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di Kota Palembang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan lewat model ini adalah:

1. menyelenggarakan pelatihan *akupresser* bagi dokter dan paramedis
2. pembinaan terhadap pengobat tradisional
3. pemberian bantuan bibit toga kepada 6 (enam) Puskesmas
4. studi banding ke *Mahidol University* dan *Golden Jubilee Hospital Thailand* dan B2P2TOOT (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional) Tawangmangu, Jawa Tengah.

Pemangku kepentingan internal mencakup Pemerintah Kota Palembang, DKKP, dan Puskesmas Kampus, sedangkan pemangku kepentingan eksternal terdiri atas LKTM (Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat)/UPT Kemenkes bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional, SP3T, Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, Dinas Pertanian Kota Palembang, Kader Posyandu, Tim Pengerak PKK Kota Palembang dan Kecamatan (lingkungan Puskesmas Kampus dan Kecamatan Ilir Barat II Palembang), serta dunia usaha/swasta, dan masyarakat/lembaga kemasyarakatan.

Sumber daya keuangan berasal dari APBD Kota Palembang. Keluaran yang paling berhasil adalah 1) meningkatnya kepercayaan masyarakat; 2) peningkatan kunjungan pasien; 3) pemberdayaan lahan dan tanaman toga; 4) kemitraan DKKP, Puskesmas, dan masyarakat; 5) *self care* rumah tangga terkait upaya kesehatan preventif dan promotif; dan 6) pemberdayaan masyarakat.

27. *Integrated Traditional Health Care in Campus Health Center of Palembang*

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Palembang City
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kota Palembang Email <i>khuskhot@yahoo.co.id</i>

Integrated Traditional Health Care Model in Campus Health Center of Palembang/PKTI is a model that promotes preventive health efforts, aimed to provide traditional health services integrated with conventional medical care that is safe to use, high quality, useful and reliable as well as provide protection for society.

The implementation strategies for the traditional health care center are:

- 1. Organizing acupuncture training for doctors and paramedics;*
- 2. Coaching for traditional healers;*
- 3. Toga seed aid to 6 (six) Public Health Centers;*
- 4. Comparative study to Mahidol University and the Golden Jubilee Hospital in Thailand and B2P2TOOT (Center for Research and Development of Medicinal Plants and Traditional Medicine) Tawangmangu, Central Java.*

The stakeholders include internal stakeholders (Local Government, DKKP, and Campus Health Center), and external stakeholders (Place of Society Traditional Health, LKTM) / Ministry of Health Unit of Traditional Healthcare, SP3T, Center for Development and Application of Traditional Medicine, Department of Agriculture of Palembang, cadres of neighborhood health center, and PKK teams of Palembang City and District (Campus Health Care environment and West Ilir II District of Palembang), business/private sector, and community/civic organizations.

The main benefit is after over a year of Healthy House providing services, patient visits increased. This indicates that public trust in the integrated traditional health care is starting to raise, the quality of the treatments and herbal remedies are safe to use, high quality, useful and reliable because it is managed by traditional health workers with medical education background.

28. Pelayanan *Online* berbasis aplikasi Web

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pertanahan Kota Semarang Email suport_permata@yahoo.co.id

Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (Permata) merupakan upaya percepatan pelayanan pertanahan berbasis *online* di Kantor Pertanahan Kota Semarang lewat pemanfaatan teknologi informasi yang diluncurkan pada bulan September 2014. Permata diaplikasikan pada sistem pelayanan pertanahan yang saat itu (April s.d. Mei 2014) masih menggunakan program aplikasi KKP *Desktop*. Kebijakan Pusdatin dan LPPB selanjutnya, agar KPKS melakukan migrasi data pertanahan dari KKP *Desktop* menuju KKP *WEB* (sejak Juni 2014).

Strategi pelaksanaannya terdiri atas perencanaan (*software* dan *hardware*, aplikasi, sosialisasi, dan pelatihan), dilanjutkan dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian. Pemangku kepentingan meliputi Kepala BPN, Walikota Semarang, KPKS, Kakanwil BPN Provinsi Jateng, Kapusdatin dan LPPB, Pengurus IPPAT, dan Bank BRI Cabang Pattimura Semarang.

Keluaran yang paling berhasil adalah:

1. berkurangnya intensitas dan waktu antrian
2. *user* dapat menginput data di mana pun berada
3. pembayaran melalui ATM BRI
4. pemohon memahami persyaratan pendaftaran, standar pelayanan, dan pengaduan
5. percepatan pelayanan secara keseluruhan

28. Online Web-based Application Service

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
units of service innovation	Kantor Pertanahan Kota Semarang e-mail suport_permata@yahoo.co.id

Land Office of Semarang initiated to collaborate with notary (PPAT) Officers in utilizing information technology (web-based services Computerized Land Office/Web KKP) so that it can actively participate in the acceleration of land services in the form of Independent Land Certificate Registration (PERMATA). The initiative launched on 24 September 2014 by the Head of National Land Agency. PERMATA was applied to of land services systems at that time (April to May 2014) which still used the Desktop KKP application program.

The implementation strategies for PERMATA are:

1. *Planning (software and hardware, applications, socialization, and training);*
2. *Implementation;*
3. *Monitoring;*
4. *Evaluation;*
5. *Control and management;*

29. GERBANG SERASAN

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Unit Inovasi Pelayanan	Setda Pemerintah Kabupaten Muara Enim Email zwesty_apryanti@yahoo.com

“Gerbang Serasan” (Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang) merupakan inovasi pelayanan publik dalam mempercepat program penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Muara Enim, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Gerbang Serasan, Pemkab Muara Enim tidak lagi secara langsung menyediakan dana untuk membantu permodalan UMKM dan Koperasi, tetapi hanya menyediakan dana APBD untuk subsidi suku bunga kredit, premi asuransi, dan penyediaan Tenaga KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) untuk mendampingi dan memfasilitasi UMKM agar memperoleh kredit dari Perbankan.

Strategi pelaksanaan inovasi ini terdiri atas:

1. pendataan UMKM dan Koperasi
2. penerbitan buku Pedoman Umum Implementasi Gerbang Serasan
3. penerbitan *leaflet* Kinerja Gerbang Serasan
4. Baliho Gerbang Serasan
5. sosialisasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik
6. pendampingan KKMB kepada UMKM dan Koperasi

Pemangku kepentingan internal mencakup Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Bank BRI dan Bank Sumsel Babel, KKMB, BUMN setempat, lembaga penyiaran, dunia usaha/swasta, dan masyarakat/lembaga kemasyarakatan (FKPPI dan Karang Taruna).

Sumber daya keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim. Keluaran yang paling berhasil adalah kelancaran implementasi, peningkatan jumlah kredit dan UMKM secara signifikan selama lima tahun terakhir, dan peningkatan keterampilan pengelola dan petugas Gerbang Serasan.

29. GERBANG SERASAN

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Muara Enim Regency
units of service innovation	Setda Pemerintah Kabupaten Muara Enim Email zwesty_apryanti@yahoo.com

“*Gerbang Serasan*” (Development Movement through Society Empowerment in the Land of Serasan Sekundang) is a strategic program of Muara Enim is an innovation of public service in order to boost poverty alleviation program in the regions particularly empowerment and strengthening of Small Medium Enterprises (SMEs) capital.

Gerbang Serasan strictly implied that Muara Enim Local Government would no longer provide Budget to help SMEs and Cooperatives capital but only provide budget for credit rate subsidy, insurance premium and provide Bank Partners Financial Consultant (KKMB) to assist and facilitate SMEs to get credit from Banks.

The implementation strategies for *Gerbang Serasan* are:

1. Data collection of SMEs and Cooperatives;
2. Publication *Gerbang Serasan* General Guidelines for Implementation;
3. Publishing of *Gerbang Serasan* leaflet;
4. *Gerbang Serasan* billboard-sized 4x6 meters in Muara Enim Downtown;
5. Socialization into the area through print and electronic media;
6. KKMB assistance to SMEs and cooperatives for both that have become participants or potential participants of *Gerbang Serasan*.

Stakeholders consist of internal stakeholders (Regent and Regency officials), BRI and Bank Sumsel Babel, KKMB, local State Owned Enterprises, broadcasting institutions, business/private sectors, and community/civic institutions (FKPPI and Youth Organization). The initiative was funded through Muara Enim Regency APBD.

The most successful outputs are smooth implementation, increasing the number of credit and SMEs significantly over the past five years, and an increase in skills of personnel and managers of *Gerbang Serasan*.

30. Pelayanan “Kios 3in1” Untuk Pencari Kerja Dalam Rangka Mengurangi Jumlah Pengangguran

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Kementerian Ketenagakerjaan
Unit Inovasi Pelayanan	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung Email heribudiman2002@yahoo.com

Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung ditujukan untuk mengurangi pengangguran. BBPLKDN terus menerus melakukan Continuous Improvement dengan membuat inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan. Produk layanan berupa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja, menyelenggarakan uji kompetensi, sertifikasi, dan konsultasi. Sebelum inovasi dirintis pada tahun 2007, pendistribusian informasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja dilakukan secara manual dan belum ada sistem yang terintegrasi antareleman organisasi. Dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.112/MEN/IV/2009 dibentuk “Kios 3in1” sebagai tempat pendistribusian informasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja yang diperlukan oleh para calon peserta, tenaga kerja, karyawan baik industri maupun lembaga yang memerlukannya secara langsung maupun dengan *webbase*.

Strategi pelaksanaan Kios 3in1 meliputi:

1. sistem manajemen pelayanan prima satu pintu,
2. pelayanan berbasis *web*,
3. perluasan cakupan wilayah,
4. efektivitas dan efisiensi pelayanan,
5. pemangkasan birokrasi,
6. pengurangan ketergantungan pada dokumen tercetak,
7. sosialisasi *website*,
8. penerapan ISO 9001-2008,
9. *update* informasi.

Pemangku kepentingan internal terdiri atas Kepala BBPLKDN dan jajarannya, Ditjen BinaLattas. Pemangku kepentingan eksternal meliputi Instansi Pemerintah terkait, Pemda, Industri, LSM, dan masyarakat luas. Kemendiknas, ATMI Solo, Polman Bandung, dan SMK menjadi partner dalam pelaksanaan Kios 3in1.

Keluaran Kios 3in1 meliputi penanganan calon peserta pelatihan berbasis web yang pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 3.728 peserta pelatihan pad 233 paket program. Kios 3in1 berhasil menciptakan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dan memudahkan dokumentasi dan penelusuran data.

30. 3 in 1 kiosk service for Job Seekers an initiative to reduce unemployment

Category	<i>Encouraging Collaborative Based Governance Approach in the Information Era</i>
Agency	Kementerian Ketenagakerjaan
units of service innovation	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung Email heribudiman2002@yahoo.com

Bandung Domestic Vocational Training Center (BBPLKDN) does Public Service Innovation Developments with the goal to help reduce unemployment. Continuous improvements through innovation are done by BBPLKDN to improve their quality of service. Services provided by the center are vocational training to improve job seekers skill, providing competency test, certification, and consultation. Prior to the innovation, in 2007, distribution of training information, certification, and job placements are done manually, moreover the integration of organization elements are non-existent. By the decree of Ministry of Labor Affair and Transmigration number Kep.112/MEN/IV/2009. 3 in 1 kiosk was formed as a place to distribute training information, certification, and job placement. The service was much needed by potential participants, work force, and employee of both industrial and institutions that needed it directly or through the web.

The strategies for 3 in 1 Kiosk are:

- 1. One-stop service of excellence;*
- 2. Web-based, improvement of coverage area;*
- 3. Effectiveness and efficiency of service;*
- 4. Bureaucracy trimming;*
- 5. Paperless;*
- 6. 3 in 1 kiosk website socialization (www.kios3in1.net);*
- 7. Implementation of ISO 9001-2008, and information update.*

Stakeholders include Head of BBPLKDN and its ranks, and Ditjen BinaLattas, related government institutions, local government, industry, NGO, and society.

3 in 1 kiosk outputs includes web-based management of potential participants, availability of training participants database, certification, job placement. The kiosk brought about effectiveness and efficiency of work, paperless, appliance of ISO 9001:2008, ease documenting and data tracing, and provides better information coverage.

31. Program Pengendalian Malaria Kabupaten Teluk Bintuni melalui sistem EDAT

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Email drakestar1208@yahoo.com



Sejak tahun 2004, Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan upaya terstruktur untuk menanggulangi tingginya angka kesakitan malaria di Kabupaten Bintuni dengan menggandeng mitra swasta dan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam program pengendalian malaria. Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan program dapat terlaksana bahkan sampai ke daerah terpencil yang kurang memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan melalui

Juru Malaria Kampung (JMK) yang direkrut dari masyarakat lokal setempat. Sistem penanggulangan malaria berbasis masyarakat di bawah koordinasi Puskesmas setempat memungkinkan hadirnya konsep pengobatan malaria yang spesifik, *Early Diagnosis And Treatment* (EDAT).

Strategi Pelaksanaan EDAT adalah:

1. Pengembangan kapasitas tenaga lokal untuk program malaria (2004-2005);
2. Peningkatan akses terhadap model program malaria (2006-2008);
3. Penerapan model pengendalian malaria di seluruh Kabupaten Teluk Bintuni dan penyempurnaan sistem *surveillance* malaria (2009-2011).

Pemangku kepentingan terdiri atas Bupati Teluk Bintuni, Dinkeskab Teluk Bintuni, Puskesmas se-Kabupaten Bintuni, Kader/Juru Malaria Kampung (JMK), Yayasan Sosial Agustinus, PT *Beyond Petroleum* dan perusahaan lain yang terlibat dalam inisiasi Juru Malaria Perusahaan, Dinkesprov Papua Barat, dan *Global Fund*.

Sistem EDAT bermanfaat bagi masyarakat umum (kemudahan akses terhadap obat malaria yang benar, pemenuhan standar pelayanan dan SOP, standar pelayanan, dan evaluasi program *surveillance* malaria melalui sistem *scoring* yang baku memudahkan evaluasi terhadap standar). Bagi pemerintah, bisa belajar tentang upaya inovatif dalam pemecahan masalah kesehatan berbasis masyarakat dan dapat diterapkan secara formal di tingkat yang lebih besar; dan bagi Lembaga terkait lainnya, pengembangan juru malaria perusahaan telah meningkatkan *coverage* pelayanan ke wilayah perusahaan.

31. Malaria Containment Program in Teluk Bintuni Regency through EDAT System.

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Teluk Bintuni Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Email drakestar1208@yahoo.com

Since 2004, Teluk Bintuni Regency had implemented various structured efforts, involving private partners and local communities to contain and deal with high number of malaria infection. Teluk Bintuni Regency's Health Affair Office recruited local individuals to become Village Malaria Staff (JMK). This community-based malaria containment system, under the coordination of local Health Care Centers, make it possible to a specific concept of malaria treatment called Early Diagnosis And Treatment (EDAT).

The strategies for EDAT are:

1. The development of local manpower for malaria containment program (2004-2005);
2. Improving the access to the program (2006-2008);
3. The implementation of malaria containment model all across Teluk Bintuni Regency and the completion of malaria surveillance system (2009-2011).

Stakeholders consist of Teluk Bintuni Regent, the Regency' Health Affair Office, Health Care Centers across the regency, Village Malaria Staff/Cadre, Agustinus Foundation, Beyond Petroleum Inc. and other business enterprises involve in the program, West Papua Provincial Government, and Global Fund. Funding came from the annual budget (APBD), BP Tangguh's malaria program fund, Global Fund's malaria containment fund, and societies.

EDAT is beneficial for the society because it provides ease of access towards proper treatment of malaria, it sets a clear SOPs, service standards, and evaluation of malaria surveillance program through standard scoring system that allows easier evaluation of the standard. The government gains benefit from this community-based respond to health problems in the society in the form of its innovation and its potential for larger scope implementation.

32. Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper).

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Yogyakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Email darsanapphi@gmail.com



Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper) merupakan wahana layanan komprehensif konsultasi terhadap gambar rencana izin bangunan/usaha sebelum didaftarkan, sehingga pada waktu pendaftaran dan pemrosesan izin tidak ada kendala (saat penelitian dan pengecekan lapangan) dan izin dapat diterbitkan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Inisiatif Klipper kreatif dan inovatif, Klipper difungsikan sama sebagai sarana layanan pencegahan atau mengatasi kendala yang timbul dalam pelayanan perizinan. Kedua, Klipper merupakan penyempurnaan dari sistem konsultasi perizinan di loket pelayanan yang dianggap masih kurang efektif dan akibat terbatasnya

waktu, banyak antrian pemohon yang ingin mendapatkan layanan yang sama. Ketiga, cara-cara baru yang diterapkan dalam forum Klipper.

Strategi penerapan Klipper adalah:

1. Pemohon izin mengajukan permohonan pencermatan awal secara tertulis dilampiri dokumen pendukung permohonan izin kepada Kepala Dinas untuk difasilitasi melalui Klipper;
2. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pelayanan agar dilakukan pencermatan awal dokumen pendukung permohonan izin oleh Tim Klipper;
3. Pemohon menyampaikan paparan permasalahan secara menyeluruh dan dibahas secara bersama antara pemohon dan Tim Klipper melalui serangkaian diskusi mendasarkan data, fakta, dan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan;
4. Tim Klipper kemudian memberikan catatan berkaitan dengan syarat-syarat secara administrasi dan teknis yang harus dipenuhi pemohon.

Pemangku kepentingan Klipper meliputi Kepala DPKY (bersama pejabat struktural dan staf), pemohon, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Badan teknis terkait di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

eluaran layanan Klipper adalah pelayanan cepat, lancar, dan tepat waktu, dan catatan berkaitan dengan syarat-syarat perizinan baik secara administrasi maupun teknis yang harus dipenuhi pemohon.

32. Licensing Service Clinic (Klipper)

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Yogyakarta City
units of service innovation	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Email darsanapphi@gmail.com

Licensing Service Clinic is a comprehensive consulting service on a blueprint for building/business permit. Thus helping to minimize problems during registration, permit processing (site check up) and the permit can be issued in a timely manner.

Klipper is unique mainly as firstly, it provides facility/service to prevent or overcome potential problems arising in permit issuance. Secondly, Klipper is an improvement of the counsel system at the registration/help desk, information related to permit prerequisite are clearer, comprehensive, complete, and accurate. Thirdly, new methods are implemented in Klipper Forum.

The strategies for Klipper are:

- 1. Applicants propose a written request of counsel (and attach the administrative documents) to the Director of DKPY to be facilitated by Klipper Team;*
- 2. The director refers it to the Head of Service Division to provide the initial analysis of the prerequisite documents by the Klipper Team;*
- 3. Applicant presents an overview of the problem to be discussed between the applicant and Klipper Team;*
- 4. Based on data, facts, regulation pertaining to permits, a solution is provided to the applicant in regards to the administrative and technical prerequisite that needs to be fulfilled by the applicant.*

Klipper stakeholders include DKPY (Director, structural official, and staff), applicants, SKPD, related institutions in Yogyakarta Municipality.

Klipper most notable outputs are swift, smooth, and timely services, and notes pertaining to administrative and technical prerequisite that needs to be fulfilled by the applicants.

33. Gebrakan SuSi (Suami Siaga) turunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Lumajang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang -Puskesmas Gucialit Email gucialitpuskesmas@gmail.com



Pada Tahun 2010 Puskesmas Gucialit menciptakan “Gebrakan SuSi, Turunkan AKI dan AKB!” menurunkan AKB dan AKI Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di puskesmas dan peran serta masyarakat termasuk lintas sektor dan lintas program Melalui inisiatif tersebut dilakukan pembinaan khusus tidak saja bagi seorang istri tetapi juga pada suaminya, guna mengurangi risiko kematian ibu pada masa persalinan dan kematian bayi pada awal kehidupannya.

Strategi pelaksanaan SuSi adalah:

1. Kegiatan minilokakarya yang merekomendasikan Pelatihan SuSi secara berjenjang;
2. Pembuatan Modul, SK SuSi, dan protap SuSi, musyawarah dan gotong royong;
3. Bimbingan teknis ABG (Advokasi, Bina Suasana, Gerakan Pemberdayaan);
4. Pendanaan melalui dana BOK (Biaya Operasional Puskesmas);
5. Sosialisasi 5 Pilar STBM melalui Minlok Triwulanan melibatkan lintas sektor

Pemangku kepentingan terdiri atas Pemkab, tenaga kesehatan persalinan Puskesmas, Dinkes Kabupaten Lumajang, Dinkes Provinsi, Kemenkes, Keluarga/PKK, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat luas.

Keluaran SuSi adalah AKI nol, AKB turun signifikan, peningkatan partisipasi suami, peningkatan Desa UCI dan Desa STBM, peningkatan kunjungan persalinan, kesepakatan suami/keluarga, kader, dan tenaga penolong persalinan.

33. SuSi: a Breakthrough to Reduce Maternal Mortality and Infant Mortality

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Lumajang Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang -Puskesmas Gucialit Email gucialitpuskesmas@gmail.com

In 2010 Gucialit Health Care Center initiated a new breakthrough called “SuSi (Alert Husband/Suami Siaga): Reducing AKI and by optimizing all its resources and involving public participation as well as utilizing cross-sectorial and cross-program collaboration. Husbands need to be given proper knowledge regarding various aspects of pregnancy in order to provide support for their wives. With such collaboration, it is expected that maternal mortality and infant mortality can be avoided.

The strategies for SuSi are:

1. SuSi was started with a mini-workshop that recommended training in stages;
2. The creation of modules, decree on SuSi and permanent program, dialogs and cooperation, technical support called Advices, Conditioning, and Empowerment (ABG);
3. Funding through Health Center’s Operational Budget (BOK);
4. Socialization on 5 Pillars of STBM through Quarterly Minlok.

The stakeholder of SuSi includes Regency Government, health and labor staffs in Guciali Health Care Center, Lumajang Health Affair Office, Provincial Health Affair Office, Indonesian Ministry of Health Affair, Family/Family Empowerment Groups (PKK), community leaders, and the general public.

SuSi’s outcomes are zero maternal mortality, a drastic decline in infant mortality, improvement of husband’s participation, the increasing number of UCI and STBM villages.

34. Dari Lahan Kritis Menuju Hutan Kota Impian

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kota Banda Aceh
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kota Banda Aceh Email mirza_dkp@yahoo.com



Hutan Kota BNI Tibang dibangun di Desa Tibang, diatas lahan kritis, gersang dan tandus, bekas tambak yang rusak akibat tsunami yang melanda Banda Aceh 26 Desember 2004. Hutan Kota BNI Tibang merupakan hutan kota pertama dibangun oleh Bank BNI dengan dana CSR mereka, sehingga layak menjadi percontohan bagi kerjasama antara pemerintah daerah dan BUMN dalam pelestarian lingkungan hidup.

ga layak menjadi percontohan bagi kerjasama antara pemerintah daerah dan BUMN dalam pelestarian lingkungan hidup.

Strategi pelaksanaan Hutan Tibang Kota adalah:

1. Penyiapanan lahan dan infrastruktur dasar serta penanaman pohon;
2. Pembangunan jalur sirkulasi, Plaza utama dan Pemeliharaan Pohon);
3. Pembangunan Taman Tematik, Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial);
4. Pemasangan instalasi Listrik dan Papan Informasi, finishing dan menanam pohon langka.

Pemangku kepentingan terdiri atas Pemko Banda Aceh (Walikota, Wakil Walikota, dan Sesda), DK3, Dinas Perikanan, Pertanian, Perkebunan Aceh, Masyarakat Gampong Tibang/ Kelompok Ibu, Dermawan, dan Kelompok Peduli Lingkungan.

Hutan Kota BNI Tibang, memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan, kelestarian lingkungan, masyarakat setempat, dan warga kota. Terhadap kualitas lingkungan (meningkatkan kualitas atmosfer kota, menghasilkan 37 ton oksigen/hari; penyegaran udara, menurunkan suhu kota, dan mengurangi polusi udara); kelestarian lingkungan (menunjang tata guna dan pelestarian air dan tanah); masyarakat setempat (membuka lapangan kerja, meningkatnya kesuburan lahan warga, dan mengurangi salinitas air tanah); dan terhadap warga kota (tersedianya sarana untuk belajar di alam, rekreasi, bersosialisasi dan sarana olahraga).

34. From Barren Land to the Ideal Urban Forest

Category	Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism
Agency	Banda Aceh City
units of service innovation	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kota Banda Aceh Email mirza_dkp@yahoo.com

BNI Tibang Urban Forest was built on a barren, arid, and critical land, formerly a fishpond destroyed by the Banda Aceh Tsunami on December 26th, 2004. BNI Tibang Urban Forest was the first urban forests built by BNI through its CSR funds. Thus, it is worthy to be a collaboration model between local government and state-owned enterprise (SOE) in the environment preservation.

The strategies for Tibang Urban Forest are:

- 1. Land procurement, basic infrastructure, and tree planting;*
- 2. Building the circulating route, main plaza, and tree maintenance;*
- 3. Building the thematic park, public facilities and social facilities.*
- 4. Electricity installation, signage, finishing, and the planting of rare plants and trees.*

Stakeholders are Banda Aceh local government (mayor, deputy mayor, and local secretary), DK3, Fisheries, Farm and Agriculture Services, Gempong Tibang Society/groups of a mother, philanthropist, and environment concerned institutions.

BNI Tibang urban forest creates a better quality of living and environment for locality and the citizen. It increases the city atmosphere quality by providing 37 ton of oxygen daily, reduces air pollution, provides fresh air, and decreases the temperature. The urban forest helps sustain the environment through the sustenance of land and water, and support system. It helps in providing work fields, increases the fertility of the land, and reduces the ground-water salinity. Lastly, it provides means to learn in nature, recreation, socialize, and sports facilities.

35. Layanan Bus Sekolah Gratis Asa Kasea

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Email mastaty_manik@yahoo.com



Kabupaten Pakpak Bharat membuat kebijakan terobosan berupa “Layanan Bus Sekolah Gratis Asa Kasea” (LBSGAK), solusi atas masalah sulitnya akses untuk memperoleh pendidikan. Kondisi Geografis dan aspek perekonomian masyarakat yang secara umum masih minim, menjadi pertimbangan kuat bagi

Pemkab untuk menyediakan LBSGAK.

Strategi pelaksanaan LBSGAK adalah:

1. Reviu projek dan perencanaan;
2. Pelatihan untuk pengemudi;
3. Uji coba.

Pemangku kepentingan terdiri atas 1) Bupati (arahan dan anggaran), 2) Dinas Pendidikan (menyosialisasikan petunjuk teknis LBSGAK dan memonitor kelangsungan operasionalisasi bus); 2) Sopir dan pembantu sopir (antar jemput peserta didik sesuai rute yang ditentukan setiap harinya; menjaga dan memelihara bus; melaksanakan perawatan rutin dan berkala bus; menjaga keamanan penumpang bus; menandatangani daftar hadir setiap hari kerja; dan melaporkan secara berkala kecelakaan/gangguan teknis bus untuk penjadwalan perbaikan); dan 4) Peserta Didik (berperan serta menjaga keamanan bus, mematuhi waktu dan rute yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan merokok, dan mengotori bus).

Keluaran yang paling berhasil adalah 1) peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan menarik hati masyarakat, 2) kenyamanan peserta didik dalam kegiatan pendidikan (disiplin dan budaya tertib), peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab, menurunnya pengeluaran rumah tangga, dan meningkatkan tabungan.

35. Free School Bus Service Asa Kasea

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pakpak Bharat Regency
units of service innovation	Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Email mastaty_manik@yahoo.com

Pakpak Bharat Regency's Education Office as the front liner of education service in the Regency creates a policy on Free School Bus Service Asa Kasea (LBSGAK); a solution for society's difficulties to access education. The main consideration for this initiative is Pakpak Bharat Regency's geographic and economic condition.

The strategies for LBSGAK are:

- 1. Project review and planning;*
- 2. Training for the drivers;*
- 3. Trial run.*

Stakeholders consist of 1) Pakpak Bharat's Regent for advice and budgeting; 2) Education Office who socializes the technical guidelines for LBSGAK and monitors its operation; 3) drivers and co-drivers who operate the bus according to certain routes and schedules, perform the bus' routine maintenance, ensure the safety of their passengers, and filing reports if the bus needs repairmen or in case of accident; 4) students who are expected to refrain from any action that can cause damage to the bus, and obey other rules for the passengers such as not smoking and litter.

The most successful outcomes are 1) the improvement of student's participation; 2) student's comforts, discipline, and obedience to rules; 3) the improvement of society's trust in the government; 4) society's (parents') ability to save their income.

36. “KEUR” Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu-lintas

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Denpasar
Unit Inovasi Pelayanan	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Denpasar Email dwstarja@gmail.com

Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan terobosan pelayanan dengan inovasi pelayanan publik: “Keur” Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu-lintas (penuhisan selanjutnya, “Keur 26 Menit”). KEUR 26 Menit merupakan pengujian kendaraan bermotor Kota Denpasar untuk menghasilkan “*excellent service*” (pelayanan terbaik), dengan meningkatkan disiplin pegawai, mengubah *mind set* (pola pikir) dan budaya kerja (*culture set*) pegawai dan masyarakat, didukung penerapan sistem *Drive Thru*. Dengan inovasi tersebut pengujian kendaraan bermotor dapat terlaksana lebih singkat dan praktis (dari 60 menit menjadi 26 menit).

Strategi pelaksanaan KEUR adalah:

1. Studi banding ke kantor Samsat Polda Metro Jaya mengenai sistem *Drive Thru*;
2. Penyusunan alur dan mekanisme prosedur
3. Penerapan ISO 9001:2008

Pemangku kepentingan terdiri dari Dinas Perhubungan, UPT PKB, penguji kendaraan bermotor, staf administrasi, pihak perbankan, bendahara pembantu, dan SKPD terkait. Sumber daya keuangan didukung dana APBD.

PKB berbasis *Drive Thru* adalah pengembangan sistem PKB yang telah ada, di mana keunggulan pengujian adalah pelanggan tidak perlu turun dari kendaraan sehingga mempersingkat waktu pelayanan. PKB berbasis *Drive Thru* merupakan inovasi kreatif dan inovatif, membawa paradigma baru, efektif dan efisien, dan berdampak signifikan yakni waktu pelayanan menjadi makin singkat (60 menit menjadi 26 menit) dan merupakan inovasi pertama di Indonesia.

36. “KEUR” only 26 Minutes to Traffic Safety

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Denpasar City
units of service innovation	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Denpasar Email dwstarja@gmail.com

Denpasar Local Government initiates a public service breakthrough by launching the “KEUR” 26 Minutes to Traffic Safety Initiative (KEUR 26 Minutes). KEUR 26 Minutes is an effort to produce service of excellence through improving employee’s discipline, changing the mindset and culture of employee and society, supported by a Drive Thru system. With the innovation, the service time for PKB has been greatly reducing from previously 60 minutes to 26 minutes.

Implementation strategies for KEUR, are:

1. Benchmarking was done with the Metro Jaya SAMSAT office to study the drive-thru system;
2. From the benchmark, a flow chart and procedure was drafted;
3. Implementation of ISO 9001:2008

Stakeholders include Transportation Service, PKB UPT, official testing motor vehicle, administration staff, banking sectors, assistant treasurer, and related SKPD. Funding was received from the local budget (APBD).

Drive Thru PKB is a development of the existing PKB service; the customers do not need to step down from their respective vehicle, thus reducing the service time. This situation also helps with the limited area of parking, as the customers would not need to park the vehicle during the service. The initiative introduces a new paradigm, effective and efficient, and significantly reduces the service time (previously from 60 minutes it was reduced to 26 minutes) and it’s the first innovation of its kind in Indonesia.

37. e-Health

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Surabaya
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Email novi.setiowati@surabaya.go.id

Komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang terbaik mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemko Surabaya. Salah satunya dengan memanfaatkan TIK untuk mempercepat pelayanan e-Health, yaitu aplikasi yang memudahkan warga untuk mempersingkat antrean di puskesmas atau rumah sakit. Melalui penggunaan aplikasi e-Health, pemohon tidak perlu datang langsung ke loket pelayanan, cukup mendaftar di rumah bagi yang mempunyai koneksi internet atau di kios yang tersedia di seluruh kantor kelurahan, kecamatan dan puskesmas Kota Surabaya, sehingga lebih efisien, pemrosesan berkas menjadi lebih cepat, di samping ramah lingkungan karena pengurangan penggunaan kertas.

Strategi pelaksanaan *e-health* adalah:

1. Perencanaan sistem (pembuatan konsep aplikasi *e-Health*);
2. Perancangan sistem (pembuatan dan pengembangan sistem aplikasi *e-Health*);
3. Uji coba (sistem aplikasi *e-Health*, pelatihan, dan pendampingan SDM);
4. Implementasi (*launching*, sosialisasi, dan implementasi *e-Health*).

Pemko Surabaya melalui SKPD, yaitu Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas Kominfo selaku *leading sector* di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK, Dinas Dukcapil untuk integrasi data kependudukan, dan Pasien

Dampak positif yang dapat diambil adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di kota Surabaya menjadi positif, sehingga dengan *mind set* yang positif tersebut warga nantinya bisa ikut membantu pemerintah dengan berkontribusi baik ide, pemikiran, maupun tenaga menuju pelayanan kesehatan yang ideal untuk warga kota Surabaya.

37. e-Health

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Surabaya City
units of service innovation	Dinas Komunikasi dan Informatika Email novi.setiowati@surabaya.go.id

The commitment to continuously provide the best services for the society drives forward the improvement of public service quality in Surabaya City Government. One improvement is through the utilization of Communication and Information Technology to accelerate e-Health service -an application that allows shorter waiting lines in health care centers or hospitals. This service allows more efficient and quicker processing of documents while at the same time preserves the environment with the reduction of paper consumption.

The strategies for e-Health are:

- 1. System planning, in which the concept for the application was constructed;*
- 2. System design that included the construction and the development of the system;*
- 3. Trial run that included system trial, training and assistances for system operators;*
- 4. System implementation including launching, socialization, and its actual implementation.*

Stakeholders include Surabaya City Government, health care centers, Health Affair Office, hospitals, Communication and Information Office, Head of Civil Registration Office, patients.

The positive impact of the initiative is found in the increased confidence that the public have on the service provided by the government. The positive mindset is expected to serve as a catalyst for public's participation in government's efforts to improve its health care service: contributions in the form of suggestions, ideas, and manpower.

38. Emas Hitam dibalik Tumpukan Sampah

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kota Malang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Email banksampahmalang@yahoo.com

Bank Sampah Malang (BSM) adalah lembaga berbadan hukum koperasi yang pendiriannya difasilitasi oleh Pemko Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) membantu pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam pengolahan sampah dari sumbernya (rumah tangga). BSM kemudian menjadi mitra Kota Malang dalam membina, melatih, mendampingi dalam pengolahan sampah 3R (*reduce, reuse, and recycle*) masyarakat Kota Malang yang mandiri dilihat dari biaya operasional yang dapat dibiayai sendiri.

Strategi pelaksanaan Bank Sampah Malang adalah:

1. Persiapan pendirian BSM;
2. *Launching* oleh pada 16 Agustus 2011;
3. Operasional kantor mulai 15 November 2011;
4. sosialisasi dan pembinaan program (melibatkan pemangku kepentingan, SKPD, CSR Swasta, PKK, Pengurus RT/RW, kelurahan, kecamatan, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan) didukung penggiat lingkungan; penerapan sistem manajemen profesional (kompetensi, kesejahteraan, dan proses bisnis);
5. Melibatkan DKP dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian BSM.

Pemangku kepentingan terdiri atas DKP (pelaku utama), Pemko Malang (DKP, Dinkes, Disdik, Badan LH, dan Bagian Hukum/Organisasi Setda, Organisasi Sosial (RT, RW, PKK, remaja masjid, karang taruna, dan kader lingkungan); Swasta (CSR PLN dan program “Bayar Listrik dengan Sampah”); ASN kompeten dipekerjakan di BSM, perguruan tinggi, dan media massa.

Keluaran yang mendukung keberhasilan inovasi BSM adalah perubahan *mindset* masyarakat (pemilahan sampah rumah tangga), pemahaman nilai ekonomis sampah, budaya menuju hidup bersih dan sehat, peduli lingkungan, dan partisipasi masyarakat.



38. *Black Gold underneath the Scrap Heap*

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Malang City
units of service innovation	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Email banksampahmalang@yahoo.com

Malang Waste Bank (BSM) is a legal institution founded by Malang Municipality through the Cleanliness and Landscaping Service (DKP); with the goal to help empower society to participate in household waste management. BSM was further appointed as Malang Municipal partner to provide counsel, training, and assisting the society in the 3R of waste management (reduce, reuse, recycle). This situation is resulting in an independent waste management by Malang society as seen by the self-sustained operational funding.

The strategies for Malang Waste Bank are:

- 1. Preparation for establishing BSM;*
- 2. Launching of the initiative on August 16th, 2011;*
- 3. Operation running on November 15th, 2011;*
- 4. Socialization and program counsel involving stakeholders, SKPD, private CSR, PKK, RT/RW management, village, sub-district, education institution, and religious institution, and was supported by environmental activist;*
- 5. The implementation of professional management system (competent, welfare, and business process);*
- 6. Involves DKP in providing counsel, development, supervising, and controlling BSM.*

Stakeholders include DKP as the main stakeholder, Malang Local Government (DKP, DinKes, DisDik, Environmental Agency, Local Secretariat Legal Division); local organizations (RT, RW, masjid teens, Karang Taruna, and environment cadre); private sectors (CSR PLN, and “pay your electric bill with trash”); skilled civil servant stationed to BSM to assist, universities, and mass media

The positive impact of the initiative are its success in changing society’s paradigm in waste management (household waste sorting), understanding the waste materials economic value, a clean and healthy lifestyle, increased concern over environment, and encourage society participation.

39. Memanfaatkan Facebook Untuk Percepatan Pelayanan Publik

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Unit Inovasi Pelayanan	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Dengan internet para penyuluh dapat mengirim laporan aktivitas terkini dalam hitungan detik sekaligus bisa menjawab berbagai permasalahan yang sedang dihadapi para petani secara cepat dan tepat. Strateginya dengan membuat kantor di dunia maya menggunakan media sosial *Facebook*. Dari kantor ini, pimpinan dan para penyuluh spesialis segera bisa merespons cepat laporan penyuluh dari semua lokasi.

Strategi pelaksanaan Forum Penyuluh Aceh Tengah [Back Office] adalah::

1. Membiasakan penyuluh untuk memberdayakan teknologi;
2. Sosialisasi adanya forum;
3. Meningkatkan koordinasi antar penyuluh dan pimpinan;
4. Meningkatkan diskusi dan komunikasi antar penyuluh dan petani.

Pemangku kepentingan adalah Kepala BPKPKAT, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, para Kepala BPP, staf, dan 164 orang penyuluh yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, serta petani

Manfaat inisiatif ini adalah sebagai media pengawasan terhadap penyuluh secara tidak langsung, petani akan didatangi oleh penyuluh tanpa harus dipanggil. Kini, penyuluh kembali menjadi sahabat petani, wadah *sharing* dan diskusi, tanpa disadari para penyuluh telah terbekali dengan pengetahuan baru yang memadai melalui wall grup sehingga pengetahuan itu akan disampaikan kepada petani binaannya, wadah komando, tersedia informasi terkini tentang cuaca dan jenis tanaman yang kurang cocok ditanam saat curah hujan diatas normal. Petani beruntung atas informasi itu, sehingga memperkecil terjadinya gagal panen.

39. Utilizing Facebook for the Acceleration of Public Service

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Aceh Tengah Regency
units of service innovation	Email syukritakengon@gmail.com

In present days, with the help of Internet connections, counselors can file their reports on their latest activities in seconds and with the same manner provide responds to problems faced by farmers accurately. The technique used is by providing virtual farming consultation counter in the form of a Facebook Group. With this media, office leaders and specialist counselors can quickly give respond to counselors' inquiries.

The strategies for Central Aceh Farming Counselor Team [Back Office] are:

- 1. Familiarizing the counselors with the technology;*
- 2. Socialization of the forum;*
- 3. Improvement of coordination between counselors and BPKPKAT offices;*
- 4. The improvement of discussion and communication between the counselors and farmers.*

Stakeholders include Head of BPKPKAT, its Secretary, its Division Heads, Sub Division Heads, Section Heads, BPP Heads, staffs, the whole 164 counselors who are assigned across Central Aceh Regency, and the farmers.

The benefits of the initiative are serving as a medium for monitoring and information sharing, improve of usefulness of farming counselors in the eyes of the farmers, the group's function as a forum for discussion and sharing, the ability of the counselors to forward the information gathered and shared in the group to the farmers under their guidance, and the Group's role to shorten the chain of command.

40. MENDORONG PEMERINTAHAN BERBASIS PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM ERA INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PETIK

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kabupaten Sinjai
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Email kk.dhirman@gmail.com

Pemkab Sinjai melalui Disdikpora mengembangkan sistem informasi yang bisa digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan pengembangan wilayah geografis, diberi nama “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pendidikan” disingkat “*SIG Petik*”. SIG Petik tidak hanya menyajikan informasi terkait data kependidikan seperti profil sekolah dan data sarana-prasarana, namun dintegrasikan dengan peta konvensional lokasi lembaga pendidikan. Melalui SIG Petik, data dapat diakses secara *online* dan terbuka oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi penyelesaian masalah, yaitu peningkatan manajemen dan tata kelola pendidikan, perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan. SIG Petik bersifat kolaboratif (*google maps*, data profil sekolah, sarana-prasarana sekolah. Pelaksanaan strategi melalui empat tahap, yaitu 1) identifikasi awal (penentuan skala prioritas, data dasar, profil sekolah, dan peta geografis sekolah); 2) pengumpulan data (data spasial dan non spasial dengan cara *tracking* dan *Global Positioning System* (GPS) dan survei GPS; 3) pengolahan data (penggabungan data, membuat data base *MySQL*, *import* data base, membuat file koneksi, membuat *form login*, serta membuat tabel menu; dan 4) analisis dan kesimpulan (aplikasi dan akses publik).

Pemangku kepentingan adalah Disdikpora, Diskominfo, SKPD terkait, DPRD, komunitas IT, Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI), relawan TIK, dan masyarakat. Sumber daya keuangan berasal dari APBD Sinjai.

Keluaran dari program ini adalah Disdikpora dapat dengan mudah memetakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan persebaran jangkauan Sekolah. SIG Petik membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (pelayanan menggunakan standar pelayanan, sistem informasi pelayanan, terpadu, cepat dan tepat, biaya terjangkau, dan melibatkan partisipasi masyarakat) waktu, biaya ringan, dan cara sederhana yang dilakukan secara *online*.

40. PETIK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Sinjai Regency
units of service innovation	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Email kk.dhirman@gmail.com

Sinjai local government through Disdikpora (Education and Sports Agency) develop information systems that can be used for planning, implementation and control related to the development of the geographical area, named “Education Mapping Geographic Information Systems” abbreviated “SIG Petik”. SIG Petik not only present the information related educational information such as school profiles and data infrastructure, but also integrate it with a conventional map of the education institution location. Through SIG Petik, data can be accessed online and open to the public by utilize the information and communication technology.

Implementation of strategies through four stages, namely: 1. Initial identification (priorities scales set up, basic data, school profiles, and geographical maps of the school); 2. The collection of data (non-spatial and spatial data by tracking and Global Positioning System (GPS) and GPS survey; 3. data processing (merging the data, creating MySQL database, importing the database, creating a connecting file, creating a login form, and creating menu table; and 4. Analysis and conclusion (application and public access).

The stakeholders are Disdikpora, Diskominfobudpar (Department of Communication Information Culture and Tourism), related SKPD (local government units), parliament, IT community, Linux User Group of Indonesia (KPLI), ICT volunteers, and society. Financial resources come from Sinjai Regional Budget.

The output of the program includes that Disdikpora could easily map education facilities and infrastructure development, and distribution range of schools. SIG Petik made fundamental changes in the organization of public services (services using standards of services, service information systems, integrated, fast and precise, affordable, and participatory) timely, low cost, and with simple way by doing them online.

41. Pengembangan Potensi Pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan)

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kabupaten Badung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Email program.distanbunhut@gmail.com



Pengembangan Potensi Pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan)” dengan pendekatan *One Village One Product (OVOP)*, *Bringing the spirit of the village into the city*, bertujuan meningkatkan pendapatan petani di Badung Utara, dengan menanam sayuran Asparagus sebagai komoditas unggul baru yang mampu menjadi titik ungkit ekonomi. Upaya ini ditempuh dengan bermodalkan kesesuaian lahan dan iklim (*location driven*) sehingga sangat berisiko.

Tiga prinsip OVOP, yaitu (1) pikirkan produk secara global, sedangkan kegiatan produksi secara lokal (*Local yet Global*); (2) semua usaha dilakukan secara mandiri dengan inisiatif dan kreativitas yang maksimal (*Self-reliance and Creativity*); dan (3) jangan lupakan peran masyarakat dan sumber daya manusia, dan oleh karena itu perlu diperhatikan pola peningkatan pengetahuan dan perkembangan sumber daya manusia yang ada (*Human Resources Development*). Sasaran kegiatan adalah petani di Badung Utara, khususnya di desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Strategi yang ditempuh : (1) menghasilkan produk lokal berdimensi global; karena Asparagus dibutuhkan oleh hotel dan restoran dan juga untuk ekspor; (2) membangun kemandirian, sehingga petani terampil dan kreatif; dan (3) menumbuhkan ikon unggulan, dengan uji mutu, promosi dan advokasi.

Setelah empat tahun, inisiatif ini mampu meningkatkan pendapatan petani lebih dari 5 kali lipat dari Rp. 4.125.000,- menjadi Rp. 21.586.600,-/25 are/tahun. Dengan demikian terlihat nyata dampak ekonomi sebelum (*before*) dan sesudah (*after*). Hal ini juga mampu menarik minat generasi muda, karena Asparagus adalah komoditas bernilai ekonomi tinggi (*cash crop*). Inisiatif ini juga menunjukkan hal yang unik, kreatif dan inovatif karena berproses: (1) dari tidak ada menjadi ada; (2) mengangkat citra sayuran lokal karena ikon Asparagus; (3) membuka peluang kerja dan minat generasi muda; (4) menjawab sinergitas pertanian-pariwisata; (5) meningkatkan pendapatan petani; dan (6) membangun citra Badung Utara.

41. Asparagus Grown, Economy Improved in North Badung

Category	Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism
Agency	Badung Regency
units of service innovation	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Email program.distanbunhut@gmail.com

Development of Agriculture Potential in North Badung (Asparagus Grown, Economy Improved), with the approach of One Village One Product (OVOP), bringing the spirit of the village into the city, aims to increase the income of farmers in North Badung, with growing vegetables Asparagus as a new competitive commodity capable of being an economic tipping point. This effort is implemented with land suitability and climate (location-driven) as the capital therefore very risky.

OVOP three principles are (1) think of the product globally, while production activities are managed locally (Local yet Global); (2) all effort is made independently with maximum initiative and creativity (Self-reliance and Creativity); and (3) do not forget the role of society and human resources, and therefore it is important to pay attention to improvement of the knowledge and the development of existing human resources (Human Resources Development). The targets of the program are farmers in North Badung, especially in Pelaga Village, Petang District.

The strategies implemented are: (1) producing local products with global dimensions; because Asparagus is needed by hotels and restaurants and also for export; (2) building self-reliance, so that farmers are skillful and creative, and (3) fostering flagship icon, with the quality testing, promotion and advocacy.

After four years, this initiative can increase farmers' income by more than five times that from IDR 4.125.000, - to IDR 21.586.600, -/25 acre/year. Thus, the tangible economic impact before (before) and after (after) is shown. It is also able to attract the younger generation because Asparagus is a high-value commodities (cash crop). This initiative also unique, creative and innovative due to the process of: (1) from not exist to exist; (2) raise the image of local vegetables as Asparagus become icons; (3) open employment opportunities and interests of young people; (4) answer to synergy of agriculture and tourism; (5) increase the income of farmers; and (6) create the image of North Badung.

42. Unit Pelaksana Teknis - Pekerjaan Umum Tingkat Kecamatan (UPT-PU Kecamatan) di Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Solusi Penyelesaian Infrastruktur Daerah

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Email nicko_jbg@yahoo.com

UPT-PU di Tingkat Kecamatan dilengkapi personil yang mumpuni dan perlengkapan yang diperlukan berupa alat berat, bahan bakar yang diperlukan, dan kebutuhan material yang diperlukan sehingga semua kegiatan infrastruktur yang berada di tingkat desa dan kelurahan bisa diselesaikan dan langsung diputuskan oleh Camat dengan koordinasi cukup di Kepala UPT PU masing-masing kecamatan. Dengan adanya UPT PU di Tingkat Kecamatan maka segala aduan dan persoalan di bidang infrastruktur yang masih bisa ditangani, bisa segera direspons dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan UPT PU Tingkat Kecamatan yaitu 1) menjadikan UPT-PU Kecamatan sebagai filter pertama segala aduan dan keluhan persoalan pembangunan infrastruktur; 2) memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit dengan pelayanan terpadu di level kecamatan; 3) UPT-PU dengan fasilitasi pihak kecamatan dapat menggandeng BUMN/ BUMD/Swasta (dana CSR) dalam melakukan proses perbaikan atau pembuatan infrastruktur di desa/kelurahan; dan 4) UPT-PU Kecamatan berfungsi dalam menyusun *database* terkait kebutuhan infrastruktur di desa/kelurahan. Pendekatan yang dilakukan, 1) kelembagaan (wadah untuk menyampaikan keluhan dan aduan persoalan infrastruktur sekaligus solusi bagi persoalan infrastruktur di desa/kelurahan dengan lebih cepat, tepat dan efektif); dan 2) pendekatan sistem (pilar utama bagi terwujudnya kemandirian pembangunan infrastruktur di perdesaan);

Pemangku kepentingan terdiri atas Bupati didukung jajarannya sampai ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dunia usaha/swasta, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat (tani, nelayan, pengusaha, dan perorangan yang semangat melakukan perubahan). Keuangan diperoleh dari APBD Kabupaten melalui Dinas PU dan kemitraan dana CSR.

Beberapa keluaran konkret UPT-PU Kecamatan selama setahun adalah pembukaan jalan baru (65 km), perbaikan dan perawatan jalan (100 km), pelebaran jalan eksisting (23 km), pematangan dan/atau *cut and fill* lahan (76.374 m² dan 13.082 m³), pembersihan dan/atau pembuatan saluran air dan irigasi (3.927 m), pembuatan/revitalisasi tambak atau penampungan air/polder (1 Ha), dan pengelolaan *Water Treatment Plant* Pedesaan (di 5 desa, kapasitas air 2 ltr/detik dengan metode *Reverse Osmosis*, karena airnya asin).

42. Unit of Public Works in District Level in Penajam Paser Utara Regency as a Solution for Regional Infrastructure

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Penajam Paser Utara Regency
units of service innovation	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Email nicko_jbg@yahoo.com

Units of Public Works at District Level equipped with qualified personnel and equipment in the form of heavy equipment, fuel, and material required so that all infrastructure activities in the village and sub-district level can be completed and immediately decided by the Head of District with sufficient coordination with Head of Units of Public Works in each district. With the existence of Units of Public Works at District level, all the complaints and problems in the infrastructure that still can be handled, can immediately be responded and followed up faster.

Strategies implemented are: 1) making UPT-PU at District Level as the first filter of all complaints of infrastructure development issues; 2) cut the course of long and convoluted bureaucracy with integrated services at district level; 3) UPT-PU facilitated by the district can cooperate with state/local enterprises/Private sector(CSR funds) in the process of repair or development of infrastructure in rural/village area; and 4) UPT-PU at District Level serve in creating a database related to infrastructure needs in rural/village area. The approach taken are as follow 1) institutional (media to deliver complaints about infrastructure problems as well as solutions to the problem of infrastructure in rural/village area more quickly, precisely and effectively); and 2) systems approach (the main pillar for self-reliance in the development of infrastructure in rural areas).

Stakeholders consist of the Regent supported by staffs to District and Village, business/private sector, civil society organizations (Community Service Organization (LPM) and Village Consultative Body), and society (farmers, fishermen, businessmen, and individuals whose passion to make changes). Funding was obtained from the Regency Budget (APBD) through the Department of Public Works (PU) and partnerships of CSR funds.

Some concrete outputs of UPT-PU at District Level during the year was the opening of a new road (65 km), repair and maintenance of roads (100 km), widening the existing road (23 km), cut and fill area (76 374 m² and 13 082 m³), cleaning and/or construction of drainage and irrigation (3,927 m), the construction/revitalization of the pond or reservoir water/polder (1 ha), and Management of Rural Water Treatment Plant (in 5 villages, the water capacity of 2 liters/sec with the method of Reverse Osmosis, because the water is salty).

43. Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Mempawah
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh Email etywiyanti@yahoo.com

Penggunaan Simulator Risiko Karies (PSRK) adalah program interaktif sebagai alat komunikasi antara petugas kesehatan dan orang tua murid. Karies merupakan penyakit jaringan keras gigi (*email, dentin, sementum*) yang disebabkan aktivitas jasad renik ditandai adanya proses demineralisasi jaringan keras gigi diikuti kerusakan unsur-unsur organik. Kebersihan mulut pada anak usia sekolah lebih jelek dibandingkan orang dewasa, karena anak-anak sering makan makanan manis dan melekat. PSRK ditujukan pada kelompok sasaran di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh (PRISP), yaitu siswa-siswi PAUD, TK, SD, SMP, SMU, Pondok Pesantren, balita dan orang tua di Posyandu, dan orang tua murid TK binaan, yang jumlahnya mencapai 13.216 jiwa.

Inovasi PRSK dilakukan dengan pendekatan interpersonal, konsultasi untuk efektivitas dan pemecahan masalah sendiri, dan keikutsertaan masyarakat. Instrumen pelaksanaan menggunakan simulator karies tentang kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator tingkat pH kuman pada plak, kebersihan gigi dan mulut, konsumsi makanan dan minuman, dan karakteristik keluarga. Poli gigi PRISP menggunakan aplikasi simulator sejak Mei 2011, dimana pada awalnya merupakan sebuah *software* dan pada 2014 penerapan dan penggunaannya dipermudah dengan versi manual.

Pemangku kepentingan adalah PRISP, Pemkab, Dinkes, Disdik, SKPD terkait, Sekolah, dan Masyarakat. Pendanaan PSRK diperoleh dari APBD Kabupaten dan swadana masyarakat.

Perpaduan alat (simulator deteksi karies) dengan metode (pendekatan interpersonal) mampu mengubah paradigma masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut.

43. Utilization of Caries Risk Simulator (Cavities) through Interpersonal Approach in Dental Clinic

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Mempawah Regency
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh Email etywiyanti@yahoo.com

Caries Risk Simulator (PSRK) is an interactive program as a means of communication between health workers and parents. Caries is a disease of dental hard tissues (enamel, dentin, cement) which caused the activity of microorganisms characterized by demineralization of dental hard tissue damage followed by organic elements damage. Oral hygiene in children of school age is worse than adults because children often eat sweet and sticky foods. PSRK program is developed aiming at the target groups in the region of Inpatient Public Health Center of Sungai Pinyuh (PRISP), including students in early childhood, kindergarten, elementary, junior high, high school, boarding school, toddlers and parents in Neighborhood Public Center, and parents of kindergarten students, amounted to around 13.216 people.

PRSK Innovation is performed using an interpersonal approach, consulting for effectiveness and self-problem-solving, and community involvement. The implementation instrument uses a caries simulator of habits in daily life with a pH level indicator of bacteria in plaque, oral hygiene, food and beverage consumption, and family characteristics. PRISP dental clinic has been using the simulator application since May 2011, initially as software and in 2014 the implementation is facilitated with the manual version.

Stakeholders are PRISP, local government, public health office, and education department, related SKPD, Schools, and Society. PRSK is funded by the local budget and community-based financing.

The combination of tools (caries detection simulators) with the method (interpersonal approach) can change the paradigm of society to be more concerned about the health of the teeth and mouth.

44. Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang (PaKSi Pinrang)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pinrang
Unit Inovasi Pelayanan	KP2T Kabupaten Pinrang Email : nas_sstpm@yahoo.co.id



PaKSi Pinrang terdiri atas 4 kebijakan investasi, yaitu (1) Kebijakan Insentif Daerah (KID), (2) Kebijakan Kemudahan Daerah (KKD), (3) Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan (4) Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). PaKSi Pinrang bertujuan, (1) meningkatkan realisasi investasi daerah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang, (2) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten

Pinrang dari berbagai golongan atau kelompok sosial, dan (3) menciptakan daya tarik dan minat investasi bagi calon investor.

Strategi untuk memastikan PaKSi Pinrang berjalan dengan konsisten meliputi: (1) promosi peluang dan potensi investasi (*one on one meeting*, pameran, dan komunikasi nonformal dengan pengusaha lokal untuk mengajak investor lainnya); (2) calon investor akan dijemput di bandara atau pertemuan di Jakarta atau daerah lain untuk memperkenalkan peluang investasi; (3) ekspose calon investor yang dihadiri oleh Bupati dan beberapa SKPD terkait termasuk PLN; (4) peninjauan lahan atau rencana lokasi; (5) penandatanganan nota kesepahaman (MoU) calon investor dengan Pemda Pinrang; (6) pengurusan perizinan dan kemudahan lainnya; (7) *plant groundbreaking*; (8) rekrutmen tenaga kerja lokal ; dan (9) operasi komersial (peresmian).

Pemangku kepentingan atau pelaksana PaKSi Pinrang terdiri dari (1) Bupati Pinrang (inisiator PaKSi Pinrang); (2) BP2TPM (membuat desain 4 kebijakan investasi dan memastikan PaKSi Pinrang dilaksanakan secara konsisten); (3) SKPD teknis (fasilitasi PaKSi Pinrang seperti infrastruktur, insentif daerah, pembinaan dan pengawasan, dan bantuan teknis/modal); (4) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memastikan PaKSi Pinrang sesuai ketentuan perundang-undangan; (5) SIPS Project, Kerjasama LSM *Canadian International Development Agency/CIDA* Kanada dan KPK (*support* peningkatan pelayanan publik). Pendanaan PaKSi Pinrang diperoleh dari APBD Kabupaten Pinrang dan SIPS *Project*.

Keluaran PaKSi Pinrang sampai saat ini berupa kehadiran investor (PMDN/PMA) untuk investasi di Kabupaten Pinrang antara lain industri galangan kapal, pembangkit listrik tenaga air, pembangunan property/perumahan, pembangunan sarana niaga BBM, dan industri pengolahan rumput laut.

44. Investment Policy Package of Pinrang Regency

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pinrang Regency
units of service innovation	KP2T Kabupaten Pinrang Email : nas_sstpmm@yahoo.co.id

Investment Policy Package of Pinrang Regency (PaKSi Pinrang) consists of four investment policy, namely (1) Regional Incentive Policy (KID), (2) Ease of Regional Policy (KKD), (3) One Stop Services Policy (PTSP), and (4) Electronic Information and Investment Licensing Service System Policy (SPIPSE). PaKSi Pinrang aims to, (1) increase the realization of the regional investment that will affect economic growth of Pinrang, (2) provide job fields for Pinrang society of various classes or social groups, and (3) create attraction and investment interest for potential investors.

Strategies to ensure consistent running of PaKSi Pinrang include: (1) promotion of investment opportunities and potential (one on one meeting, exhibition, and informal communication with local entrepreneurs to encourage other investors); (2) prospective investors will be picked up at the airport or a meeting will be held either in Jakarta or other areas to introduce investment opportunities; (3) exposure of potential investors, attended by the Regent and some related SKPD including PLN; (4) a review of the land or site plan; (5) the signing of a memorandum of understanding (MOU) between potential investors with the Pinrang Local Government; (6) the licensing and other conveniences; (7) plant groundbreaking; (8) the recruitment of local workforce; and (9) of commercial operations (inauguration).

Stakeholders or those involve in implementation of PaKSi Pinrang consist of (1) Pinrang Regent (initiator of PaKSi Pinrang); (2) BP2TPM (designing 4 investment policies and ensure consistent implementation of PaKSi Pinrang); (3) technical SKPDs (facilitation of PaKSi Pinrang such as infrastructure, local incentives, guidance and supervision, and technical/capital assistance); (4) Civil Society Organizations (CSOs) to ensure PaKSi Pinrang appropriate statutory provisions; (5) SIPS Project, NGO Cooperation with Canadian International Development Agency/CIDA Canada and the Corruption Eradication Commission (KPK) (supporting improvement of public services). Financial resources are obtained from the Pinrang local budget and SIPS Project.

PaKSi Pinrang output to date is in the form of the presence of investors (domestic/foreign) for investment in Pinrang include shipbuilding industry, hydroelectric power plants, construction of property/housing, construction of commercial vehicle fuel, and industrial processing of seaweed.

45. Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Pekalongan
Unit Inovasi Pelayanan	Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Email agustina.psi@gmail.com

Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan memiliki fungsi untuk 1) menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan serta pelanggaran terhadap Hak Perempuan, Anak dan Remaja; 2) memberikan perlindungan, pembelaan dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja dan/atau korban kekerasan; dan 3) memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan/atau korban kekerasan serta ketidakadilan. Program LP-PAR meliputi advokasi dan bimbingan, pendidikan publik, penelitian dan dokumentasi, pengumpulan dana, pembentukan tenaga relawan perempuan, anak dan remaja di Kecamatan, Kelurahan dan di sekolah (PIK-KRR), dan pemberian informasi dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) dengan pelayanan selama 24 jam.

LP-PAR mempunyai strategi jejaring dalam pelayanan kekerasan terhadap gender dan anak yaitu melalui jejaring ahli dan profesional. Dukungan diperoleh dari pemangku kepentingan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), SKPD terkait, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengacara/Penasehat Hukum, Psikolog, Rumah Sakit, Kemenag, Relawan/Pekerja Sosial, LBH, Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ormas Keagamaan (Muslimat NU, Aisyiah, dan lain-lain). LP-PAR mempunyai strategi pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban melalui Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan yaitu, yaitu membangun relawan, komitmen pribadi, solid dan loyal, kesepakatan dan kesepahaman bersama, koordinasi, dan pertemuan rutin.

Keuangan LP-PAR sebagian besar berasal dari APBD Kota Pekalongan dan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM). LP-PAR Pekalongan juga melakukan berbagai cara pengumpulan dana, seperti membuka dompet kepedulian, nara sumber, pelatih fasilitasi atau moderator; dan kerja sama organisasi.

Sejak berdiri tahun 2005, LP-PAR telah menangani banyak kasus, yaitu kekerasan terhadap perempuan (243 kasus), anak (19 kasus), dan laki-laki (5 kasus). Laporan penanganan kekerasan secara rutin triwulanan dikirim ke Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan format yang sudah ditentukan.

45. Institute for Women Children and Youth Protection of Pekalongan

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Pekalongan City
units of service innovation	Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Email agustina.psi@gmail.com

Institute for Women Children and Youth Protection, (LP-PAR) of Pekalongan, provide services to 1) accommodate issues related to crimes of violence and violation of the Rights of Women, Children, and Youth; 2) provide protection, advocacy and assistance to women, children and youth and/or victims of violence; and 3) provide guidance and legal services, psychological and mental-spiritual counseling for women, children and troubled youths and/or victims of violence and injustice. LP-PAR programs include 24-hour advocacy and counseling, public education, research and documentation, fundraising, organizing volunteers of women, children and youth in the districts, villages and schools (PIK-KRR), and the provision of information and consultation on adolescent reproductive health (KRR).

LP-PAR has a networking strategy in providing the service of violence against gender and children which is through a network of experts and professionals. Supports are obtained from the stakeholders such as Indonesian Midwives Association (IBI), related local government units (SKPD), the Indonesian Doctors Association (IDI), Lawyer/Legal Counsel, Psychologists, Hospitals, Ministry of Religious Affairs, Volunteer/Social Worker, Legal Aid Institution (LBH), Universities, Public Prosecutor, State Court, the Religious Court, Police, the PKK team, the Institute for Community Empowerment (LPM), Religious Organizations (the Muslimat NU, Aisyiah, etc.). LP-PAR has a strategy of prevention, management, and protection of the victim through the Professional Team of LP-PAR of Pekalongan such as organizing volunteers, personal commitment, solid and loyalty, agreements and mutual understanding, coordination, and regular meetings.

Financial resources of LP=PAR mainly comes from Pekalongan Budget and Society Based Family Welfare Development Acceleration Program (PAPKS-BM). In addition, LP-PAR of Pekalongan also performs various ways of collecting funds, such as opening the wallet of concern; provide keynote speakers, coaches' facilitation or moderator; and organizations cooperation.

Since its establishment in 2005, the LP-PAR has handled many cases such as violence against women (243 cases), children (19 cases), and men (5 cases). Reports of violence handling are regularly sent every quarter to Central Java province by using the specified format.

46. Pelayanan Penjangkauan (Outreaching) Melayani Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Sosial
Unit Inovasi Pelayanan	BBRSBG Kartini Temanggung Email bbrsbg@yahoo.co.id

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (BBRSBG) Kartini Temanggung berinisiatif memberikan pelayanan di luar balai (penjangkauan/*outreaching*) agar semakin banyak penyandang



disabilitas terlayani tanpa keterbatasan kapasitas asrama. Inisiatif ini diwujudkan dengan menyelenggarakan pelayanan berbasis keluarga dengan nama Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK) tahun 2010 dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas dengan nama Kampung Peduli tahun 2011. RSBK dan Kampung Peduli merupakan pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dilakukan di lingkungan keluarga masing-masing dengan kegiatan pokoknya bimbingan

mental, sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas intelektual agar mencapai kemandirian.

Strategi pelaksanaan mencakup pemetaan sosial (klarifikasi data dan mengidentifikasi permasalahan penyandang disabilitas serta potensi yang ada di masyarakat). Bantuan BBRBSBG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RSBK dan Kampung Peduli.

Pemangku kepentingan meliputi Kemensos, BBRBG Kartini Temanggung, pekerja sosial, KSM, penyandang disabilitas intelektual dan keluarga, kader pendamping, aparat Desa, SKPD terkait, tokoh masyarakat, dan unit usaha. Sumberdaya meliputi SDM (relawan, pemuda, pekerja sosial, tenaga BBRBSBG, aparat desa, dan tokoh masyarakat), keuangan (BBRSBG, pemda, CSR, dan sumbangan masyarakat), sarana-prasarana (gedung kantor Desa/RW/RT, gedung khusus).

Keluaran konkret RSBK dan Kampung Peduli adalah masyarakat mampu menyelenggarakan bimbingan keterampilan, berkembangnya sentra kegiatan ekonomi produktif, dan penyandang disabilitas intelektual dapat membantu keluarganya. Hasil evaluasi menunjukkan, 90,06 persen penerima manfaat RSBK dalam waktu satu tahun berhasil melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan mengembangkan usaha produktif. Hasil penelitian mandiri oleh peneliti Puslitbangsos Kemensos menyatakan bahwa RSBK 99% berhasil. Sementara dampak nyata Kampung Peduli adalah peran aktif pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mampu mengelola kelembagaan sebagai wahana berbagai aktivitas pemberdayaan penyandang disabilitas.

46. *Outreaching Service for Persons with Disabilities in the Society*

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Kementerian Sosial
units of service innovation	BBRSBG Kartini Temanggung Email bbrsbg@yahoo.co.id

The Rehabilitation Center-Family Based (BBRSBG) Kartini Temanggung initiates to provide services outside the hall (outreaching) so that more people with disabilities can be served without capacity constraints. This initiative is realized by organizing family-based services under the name of Family-Based Social Rehabilitation (RSBK) in 2010 and the Community-Based Social Rehabilitation Care in 2011 with the name of Kampung Peduli. RSBK and Kampung Peduli are services that involve the active participation of the society and conducted in each of the family environment the main activity of mental guidance, social and intellectual skills for persons with disabilities so that they can be independent.

Implementation strategies include social mapping (clarification of data and identify problems of persons with disabilities as well as the potential that exists in the society). BBRSBG assistance is adjusted to the needs of each RSBK and Kampung Peduli.

Stakeholders are including the Ministry of Social Affairs, Kartini BBRBG Temanggung, social workers, KSM, persons with intellectual disabilities and families, assistant cadres, village officials, related SKPD, public figures, and business units. Resources include human resources (volunteers, youth, social workers, BBRSBG personnel, village officials, and public figures), financial (BBRSBG, local governments, CSR, and public donations), facilities and infrastructure (office buildings of Village/RW/RT, special buildings).

RSBK and Kampung Peduli concrete outputs are a community that is capable of organizing counseling skills, the development of productive economic activity centers, and persons with intellectual disabilities can help their family. Evaluation results show that 90.06 percent of RSBK beneficiaries within one year managed to perform daily activities and develop productive business. The results of an independent study by researchers from the Puslitbangsos Ministry of Social Affairs stated that RSBK is 99% successful. While the real impact of Kampung Peduli is an active role of the administrators of Society Self-Empowerment Group that can manage the institution as a platform for empowerment activities of persons with disabilities.

47. Klinik Koperasi dan UMKM

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Email mumtazalramanda@yahoo.co.id

Klinik Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) didirikan pada tanggal 13 Maret 2008 dengan tujuan untuk mengeliminir berbagai permasalahan yang dihadapi K-UMKM. Klinik K-UMKM awalnya menyediakan 4 (empat) jenis layanan (konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi, dan *short course*). Layanan kemudian dikembangkan meliputi layanan akses pembiayaan, akses pemasaran produk, pusat pustaka *entrepreneurship*, dan mobil klinik.

Strategi pelaksanaan dimulai dengan perencanaan dan MoU Dinas K-UMKM dengan ITS dan beberapa universitas (menyediakan tenaga pendidik profesional yang akan memberikan materi dalam *Short Course Managerial* dan *IT Entrepreneur*). Instruktur *Short Course Product* diisi oleh praktisi/pelaku K-UMKM yang ahli dalam pembuatan produk dimaksud. Pelaksanaan dan sosialisasi Klinik KUMKM, menggunakan *website* diskopumkm@jatimprov.go.id dan untuk melengkapi Akses Pemasaran, Dinas K-UMKM telah membangun 2 (dua) layanan, yakni Galeri Cenderamata dan Galeri Batik.

Pemangku kepentingan terdiri atas Klinik K-UKM, Dinas K-UKM, SKPD terkait, Lembaga Penyedia Jasa Layanan Pengembangan Usaha/Konsultan BDS, Perguruan tinggi negeri dan swasta, pelaku UMKM, perbankan, dunia usaha/industri, mass media dan televisi, instruktur, pegawai tidak tetap, mobil K-UKM, dan masyarakat. Sumber daya anggaran, tahun 2011-2014 mencapai Rp. 10 miliar. SDM Dinas K-UMKM dan mitra.

Keluaran Klinik K-UKM 2010-2014 adalah peningkatan jumlah KUKM yang menghadiri konsultasi, *short course* (umum, produk, manajerial, dan *IT entrepreneur*), pusat pustaka, pemasaran, pembiayaan, mobil klinik, dan kunjungan. Terjadi pengembangan jenis layanan, animo masyarakat, dan menarik perhatian banyak lembaga.

47. Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises Clinic

Category	Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism
Agency	Jawa Timur Province
units of service innovation	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Email mumtazalramanda@yahoo.co.id

Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (K-UMKM) was established on March 13, 2008. K-UMKM Clinics at first only provided four (4) types of services (business consulting, business information, advocacy, and short course). The service then developed, including the service of access to funding, access to product marketing, entrepreneurship literature center, and a mobile clinic.

The implementation strategy begins with the planning and the MOU of Department of K-UMKM with ITS and some other universities (providing professional educators who will provide the material in the Short Course Managerial and IT Entrepreneur). Instructors of Short Course Product are practitioners / K-UMKM actors who are experts in the manufacture of the particular product. Implementation and socialization of K-UMKM Clinic are conducted through the website of diskopumkm@jatimprov.go.id and to complete access to product Marketing, Department of K-UMKM have developed two (2) services, namely Souvenirs Gallery and Batik Gallery.

Stakeholders consisting of K-UMKM Clinic, Department of K-UMKM, related local government units, Institute for Business Development Service Provider/Consultant BDS, public and private universities, SMEs actors, banking, business/industry, mass media and television, instructors, temporary employees, mobile K-UMKM, and society. Budgetary resources, in 2011-2014 reached IDR 10 billion. Human resources are Department of K-UMKM and partners.

The outputs of K-UMKM Clinic during 2010-2014 are increasing number of KUKM who attended the consultation, short course (general, product, managerial, and IT entrepreneur), the central library, marketing, finance, mobile clinics, and visits. Improvements to types of service, the public interest, and attracted the attention of many institutions.

48. Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Melalui Forum Komunikasi BBLKI Serang dan Stakeholders

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Kementerian Ketenagakerjaan
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten - BBLKI Serang Email tuti.haryanti.1975@gmail.com

Forum Komunikasi BBLKI Serang dan *Stakeholders* (FK-BBLKI) adalah wadah komunikasi resmi untuk mendiskusikan dan memformulasikan solusi tentang kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja yang belum sesuai dengan pasar kerja dan menjadi “satu tempat” yang dituju oleh *stakeholders* untuk menyampaikan informasi, keluhan dan saran. FK-BBLKI merupakan inovasi terbaru dalam memfasilitasi komunikasi antara BLK dan pemangku kepentingan, dan menjadi yang pertama di Indonesia.

Ada tiga pendekatan strategis FK-BBLKI. Pertama, menjadikan FK-BBLKI sebagai tujuan langsung pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyampaikan dan meminta informasi tentang kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan saran pengembangan pelatihan tenaga kerja. Kedua, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan *stakeholders* dan BBLKI Serang. Ketiga, FK-BBLKI mengupdate database Kios3in1 yang dimiliki BBLKI Serang dengan informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan oleh industri, dengan mengakses (www.kios3in1.net/002).

Anggota FK-BBLKI terdiri dari industri, pemda, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan pemerintah (sekolah) dan swasta serta Lembaga Latihan Swasta (LLS). Keanggotaan forum bersifat sukarela dan anggotanya telah berkembang dari 30 orang (2013) menjadi 205 orang (2014). Pengurus forum bekerja sukarela (tanpa dibayar) walaupun telah menyita waktu produktifnya karena merasakan manfaat dari forum yang memudahkan industri memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai.

Pemangku kepentingan dari FK-BBLKI terdiri dari BBLKI Serang, Disnakertrans, Disdik, SKPD terkait, Pemda (Pemprov Banten sampai ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan), industri, sekolah, Lembaga Latihan Swasta (LLS), dinas terkait, KADIN, APINDO dan organisasi kemasyarakatan. Keuangan diperoleh dari APBD BBLKI Serang, Swasta, dan dana CSR.

Keluaran FK-BBLKI yang berhasil antara lain, peningkatan penempatan lulusan pelatihan BBLKI Serang (62% pada 2008 ke 72% pada 2014), *on the job training*, pemagangan, jumlah pendaftar dan jumlah peserta pelatihan 1:2 (kerja sama dengan satuan kerja tingkat kecamatan dan kelurahan/desa), sinergitas kegiatan BBLKI dengan *stakeholders*, program pelatihan didasarkan hasil *Training Needs Analyst* (TNA), database pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang terintegrasi dalam program “Kios3in1”.

48. Promoting Participation of Stakeholders in Placement of Manpower

Category	<i>Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism</i>
Agency	Kementerian Ketenagakerjaan
units of service innovation	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten - BBLKI Serang Email tuti.haryanti.1975@gmail.com

Communication Forum of BBLKI Serang and Stakeholders (FK-BBLKI) is the official communication forum to discuss and formulate solutions on competency of job seekers and workers who have not been in accordance with the labor market and become “one place” designated by the stakeholders to convey information, complaints and suggestions. FK-BBLKI is the latest innovation in facilitating communication between BLK and stakeholders and became the first in Indonesia.

There are three strategic approach of FK-BBLKI. First, make FK-BBLKI as the immediate objectives of stakeholders and the public to submit and ask for information about the needs of the labor competencies and workforce training development advice. Second, synergy and synchronization of activities of Stakeholder and BBLKI Serang. Third, FK-BBLKI update the database of Kios3in1 that owned by BBLKI Serang with the information of workforce competencies that is required by industry, by accessing (www.kios3in1.net/002).

Members of the forum consist of industry, local government, community organizations, government and private educational institutions (schools), and Private Training Institutions (LLS). Membership is voluntary, and forum members have grown from 30 people (2013) to 205 people (2014). The forum administrators are working voluntarily (unpaid) although it has spent their productive time because they experienced the benefits of the forum that allowed the industry to meet the need of workers with appropriate competencies.

Stakeholders consist of BBLKI Serang, Department of Manpower, Education Department, related SKPD, local government (local government of Banten up to the district and village), industries, schools, Private Training Institutions (LLS), related offices, Chamber of Commerce (KADIN), APINDO and community organizations. The fund is obtained from the budget of BBLKI Serang, Private, and Corporate Social Responsibility fund.

The successful output of FK-BBLKI include the increase of BBLKI Serang training graduate placement (62% in 2008 to 72% in 2014), on the job training, internship, the number of applicants and the number of training participants 1:2 (in collaboration with the unit in districts and sub-district/village level), synergy of BBLKI activities with stakeholders, training program based on the Training Needs Analysis (TNA), a database of training, certification and placement that integrated in the program “Kios3in1”.

49. Klinik Lansia Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Jambi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kota Jambi - Puskesmas Putri Ayu Email pkm.putriayu@yahoo.com



Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi membuka klinik lansia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan secara tersendiri dan terpisah bagi para lansia dari poli umum yang ada. Sasaran utama Klinik Lansia adalah pasien berumur di atas 56 tahun. Terbentuknya Klinik Lansia merupakan inovasi karena merupakan satu-satunya Puskesmas yang memiliki klinik khusus lansia di Kota Jambi. Pelayanan kesehatan dilakukan secara tersendiri di mana pelayanan loket, pengobatan, dan apotik dilak-

sanakan di satu ruangan di lantai satu.

Kronologi rencana aksi pelaksanaan Klinik Lansia di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi adalah mencari ruangan khusus dengan kriteria letak ruangan mudah dijangkau, luas ruangan memenuhi syarat pelayanan kesehatan dasar, dan kenyamanan. Kegiatan di Klinik Lansia tidak terbatas hanya pelayanan kesehatan di dalam ruangan, tetapi berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok lansia telah dilaksanakan di luar ruangan, sehingga membuat antusiasme pasien makin tinggi.

Pelaksanaan Klinik Lansia tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, antara lain: 1) Kepala Puskesmas Putri Ayu, dr. Hj. Rini Kartika Handayani, M.Kes (inisiator Klinik Lansia); 2) tenaga kesehatan, terdiri dari dokter, perawat, petugas rekam medik, dan asisten apoteker (memberikan pelayanan); 3) masyarakat kelompok lansia (mengakses layanan di Klinik Lansia); dan 4) tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat umum (promotor/pemberi informasi bagi pasien lansia yang belum mengetahui keberadaan Klinik Lansia di Puskesmas Putri Ayu).

Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari berbagai sumber, namun untuk persiapan ruangan tidak memerlukan dana karena hanya menata kembali ruangan dengan sarana yang sudah ada. Dana kegiatan senam lansia berasal dari BPJS Kesehatan, sedangkan untuk penyuluhan dan posyandu lansia berasal dari dana BOK.

Keluaran Klinik Lansia yang paling berhasil adalah ruangan yang nyaman, mudah dijangkau, pelayanan cepat, meningkatnya interaksi sesama lansia, dan lancarnya berbagai kegiatan Klinik Lansia.

49. Elderly Clinic of Putri Ayu Public Health Center in Jambi

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Jambi City
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kota Jambi - Puskesmas Putri Ayu E-mail pkm.putriayu@yahoo.com

Public Health Center of Putri Ayu opened an elderly clinic aiming to provide basic and advanced health services separately and apart from the general clinic in the past. The main target of Elderly Clinic is patients aged over 56 years. The next step is to prepare the health personnel who will be on duty, room and issued the Head of Public Health Center Decree. Elderly Clinic is an innovative formation because it is the only health center that has a special clinic for elderly in Jambi City. Health services are performed separately where the service counter, treatment, and pharmacy are conducted in one room on the first floor.

Chronology of the action plan implementation of Elderly Clinic in Putri Ayu Public Health Center of Jambi city is looking for a special room with layout criteria which easily accessible, spacious room that qualified for primary health care, and convenience requirements. Activities in the Elderly Clinic are not limited to health care in the room only, but also a variety of activities that involve the elderly group that was conducted outdoors, therefore increasing the patient enthusiasm.

Elderly Clinical implementation is inseparable from the contribution of stakeholder, such as 1) Head of Putri Ayu Public Health Center, dr. Hj. Rini Kartika Handayani, M.Kes (the initiator of Elderly Clinic); 2) Medical personnel, consisting of doctors, nurses, medical records clerk, and pharmacists assistant (providing services); 3) elderly community (accessing services in the Elderly Clinic); and 4) other health professionals and the general public (promoter/conduit of information for elderly patients who don't know the existence of the Elderly Clinic in Putri Ayu Public Health Center).

Source of funding for the activities are from various sources; the preparation of the room does not require funds because it only rearrangement of the room with the existing facilities. Funds for the elderly gymnastic activities come from Health Care Provider (BPJS), while for counseling and the neighborhood health center for the elderly come from other funds.

The most successful outputs of Elderly Clinic are convenient and easily accessible room, fast service, increasing interaction among the elderly, and the smoothness of the various activities of the Elderly Clinic.

50. Meningkatkan Pelaksanaan Lelang yang Efisien, Kompetitif, dan Adil Melalui Pelaksanaan e-Auction

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Keuangan
Unit Inovasi Pelayanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Email endi.subangy@gmail.com

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membangun sistem pelaksanaan lelang elektronik (*e-Auction*), dimana peserta lelang tidak perlu berkumpul di suatu tempat, dan peserta lelang menyampaikan permohonan dan penawaran secara *online*. Pada tahap awal ini, DJKN c.q Direktorat Lelang memperkenalkan lelang elektronik dengan metode lelang *email*, dan berikutnya diharapkan dengan lelang internet. Pelaksanaan *e-Auction* menggunakan media internet dilakukan dengan mengakses alamat domain DJKN <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> dan Aplikasi Lelang Email (ALE).

Strategi pelaksanaan terdiri atas penyesuaian proses bisnis, pembangunan ALE dikerjakan secara mandiri oleh pegawai DJKN selama 6 bulan, berisi dua subsistem: peserta lelang (*front-end*) dan petugas KPKNL (*back-end*); ALE memperoleh *Quality Assurance* dari Pusintek Kemenkeu; pendaftaran alamat domain lelang email berbasis *secure* ("*https*"); sertifikat keamanan alamat domain lelang email diberikan oleh lembaga "*Comodo CA*"; aplikasi mudah dan nyaman; menggunakan *mobile gadget* seperti laptop dan telepon pintar; kemitraan strategis dengan perbankan; penyetoran uang jaminan lelang menggunakan *Virtual Account (VA)*.

Pemangku kepentingan terdiri dari DJKN, Direktorat Lelang, KPKNL, Kemenku, dan pihak-pihak yang terkait dengan lelang elektronik. Pihak internal (DJKN, Direktorat Lelang, Kantor Wilayah DJKN, dan KPKNL) dan pihak eksternal terdiri dari sejumlah pihak. Kalangan perbankan yang menjadi mitra KPKNL dalam mengelola uang jaminan lelang merupakan mitra kerja yang strategis dalam pelaksanaan lelang. Masyarakat luas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengguna jasa lelang selaku peserta lelang, sepanjang tidak nyata-nyata dilarang mengikuti lelang oleh ketentuan yang berlaku.

Lelang elektronik bersifat inovatif karena memiliki sejumlah keunggulan: mudah (proses lelang dapat diikuti kapanpun dan dimanapun peserta lelang berada, memanfaatkan *gadget* (PC, komputer tablet, dan *smartphone*) dan jaringan internet; cepat (transaksi penyetoran uang jaminan maupun penawaran lelang dengan cepat diterima petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)); efisien (peserta lelang dapat mengikuti lelang di seluruh KPKNL pada saat yang bersamaan); dan uang jaminan secara cepat segera dikembalikan kepada peserta yang kalah lelang melalui pemindahbukuan.

50. Improving Efficient, Competitive, and Fair Auction through e-Auction

Category	Improvement in Delivering Service to Society
Agency	Kementerian Keuangan
units of service innovation	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara email endi.subangy@gmail.com

The Directorate General of State Assets Management (DJKN) Ministry of Finance establish a system of electronic auction (e-Auction). It allows bidders to bid without gathering in one place. The bidders only need to submit bidding document and do the bid by online. Implementation of e-Auction uses the Internet to access the DJKN domain addresses <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> and Email Bid Applications.

Implementation strategy consists of the following phases. First, the adjustment of business processes and the development of e-auction independently by DJKN employees for six months. The application contains two subsystems: the auction participants (front-end) and KPKNL officer (back-end); Second, the application obtains Quality Assurance of Information Technology Center of Ministry of Finance (Pusintek Kemenkeu). Third, the registration of domain address for auction via email is highly secured. Fourth, security certificate of auction domain address for auction via email is provided by the respected third party; Fifth, the application is easy and convenient. Sixth, laptops and smartphones can access the application. Seventh, strategic partnerships with banks. Eighth, auction deposit is using the Virtual Account.

Stakeholders consist of DJKN, Directorate of Auctions, KPKNL, Ministry of Finance, and parties related to the electronic auction. Internal parties (DJKN, Directorate of Auctions, DJKN Regional Office, and KPKNL) and external parties, those consist of a number of parties. The bank who is KPKNL partner in managing auction deposit is a strategic partner in the implementation of the auction. Society at large has an equal opportunity to be the users of auction service as the auction participants, as long as s/he is clearly not banned to join the auction based on the existing regulations.

Electronic auction is innovative because it has a number of advantages: easy (the auction process can be followed whenever and wherever bidders are by using the gadget (PCs, tablets, and smartphones) and Internet networks; fast (deposit transaction or tender offer is quickly accepted by the officers in State Property and Auction Office (KPKNL); efficient (bidders can participate in the auction throughout KPKNL at the same time); and deposit can quickly be returned to participants who lost the auction through transfer.

51. Program Kartu Insentif Anak dan Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Surakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Email bagorska@yahoo.co.id

Hingga tahun 2009 terdapat 45% warga dan 40% anak di Kota Surakarta yang belum memiliki akta kelahiran. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran disebabkan oleh:

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat
- 2) kurang informasi yang memadai
- 3) ketidakjelasan sistem operasional dan prosedur pengurusan akta kelahiran
- 4) ketakutan warga karena kesan birokratis dan mahal
- 5) kurang efektifnya Sistem Pencatatan Kelahiran



Program Kartu Intensif Anak dikembangkan secara *online* dengan sistem jemput bola. Sistem Pencatatan Kelahiran direlasikan dengan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Aplikasi dan data base program telah terintegrasi dengan Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan dan Kementerian Dalam Negeri.

Program ini memberikan manfaat langsung bagi anak, dan mendorong orang tua dan anak untuk mendaftarkan diri/anaknya untuk memiliki akta kelahiran serta menjadi peserta. Kartu Intensif Anak diterbitkan secara gratis dengan sistem terpadu kemudian dikembangkan menjadi Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran, yang terelasi dengan pendidikan, kesehatan dan sosial. Data anak dilengkapi 34 item untuk kepentingan analisis kebijakan insentif.

Dampak Kartu Intensif Anak yang paling utama yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, terciptanya pelayanan publik berkualitas dan integrasi sistem aplikasi data penduduk.

51. Children Incentive Card Program and Birth Record Relation System

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Surakarta City
units of service innovation	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Email bagorska@yahoo.co.id

Up to 2009, there are 45% of residents and 40% of children in Surakarta Central Java who does not have a birth certificate. This situation occurs because the following factors:

1. Lack of society awareness.
2. Lack of adequate information.
3. The obscurity of operating system and procedures of making birth certificate.
4. Fear of citizens in because of bureaucratic and costly impression.
5. Ineffective Birth Registration.

Children Incentive Card Program has been developed with proactive and online systems. Birth Registration System is connected to Education, Health, and Social Affairs Systems. Applications and database of programs have been integrated into the Population Administration Information System and the Ministry of Home Affairs.

This program provides direct benefits for children and encourages parents and children to enroll themselves/their children to have a birth certificate and become a participant. Children Incentive Card is issued for free, integrated and developed into Birth Record Relation System that are connected to education, health and social. Data of children are equipped with 34 items for analysis of incentives policy.

The most successful outcomes include increased community participation, high quality of public services; and an integrated population data applications system.

52. Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Berbasis Web (SPKOnline)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Badan Pusat Statistik (BPS)
Unit Inovasi Pelayanan	Email ratihpp@bps.go.id

Badan Pusat Statistik pada tahun 2005 mengembangkan aplikasi Sistem Pencarian Kode dan pada tahun 2011 menerapkan SPKOnline untuk mempermudah pengguna data melakukan pencarian kode klasifikasi statistik. Sistem berbasis desktop sempat dibangun namun tidak lagi digunakan.

SPKOnline dibangun atas ide awal Ratih, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang menyadari bahwa pengguna adalah internal dan eksternal sehingga sistem akan lebih bermanfaat dalam bentuk *website* yang bisa diakses secara *online*. Hasil penelitian ini diimplementasikan di <http://spkonline.bps.go.id>. dan terus dikembangkan sampai sekarang.

SPKOnline mempunyai enam fitur, yaitu:

- 1) *Sistem berbasis web*
- 2) *Pencarian kode klasifikasi* berdasarkan kata kunci tertentu/kode klasifikasi
- 3) *Tabel kesesuaian*
- 4) *Tanya kode dan kontribusi*
- 5) *Unduh*
- 6) *Manajemen data*

SPKOnline mulai diimplementasikan di BPS pada tahun 2011 dengan rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. pembahasan dan ujicoba
2. penyusunan buku pedoman penggunaan sistem
3. sosialisasi sistem
4. implementasi SPKOnline

Sistem SPKOnline didukung fitur manajemen data, selain itu juga tersedia aplikasi SPKOffline untuk membantu pengguna di daerah yang kesulitan koneksi jaringan internet.

Dampak SKP Online yaitu memfasilitasi sumber informasi dan rujukan klasifikasi, membangun komunikasi antara BPS dengan pengguna klasifikasi serta pencarian kode klasifikasi secara akurat.

52. Web-based Statistic Classification Code Searching System

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Badan Pusat Statistik (BPS)
units of service innovation	Email ratihpp@bps.go.id

Central Bureau of Statistic developed Code Searching System application in 2005 and in 2011 implemented SKP Online to assist data user to search the statistic classification code. The desktop-based system was developed once but is no longer used.

SPK Online was developed with the initial idea of Ratih, a student of Academy of Statistic. She realized that the users are from internal and external users. Therefore, the system will be more useful in the form of website that can be accessed online. Ratih's research is implemented in <http://spkonline.bps.go.id> and continues to be improved until now.

SPK Online has six features that include:

1. Web-based system
2. Classification code searching based on particular keywords/classification code)
3. Table of Match
4. Ask for Code and Contribution
5. Downloads
6. Data management

SPK Online started to be implemented in BPS on 2011 with series of implementation activity that include:

1. discussion and trial
2. preparation of system handbook
3. socialization of
4. Implementation of SPK

SPK Online is supported by data management feature and availability of SPK Offline to assist users in the area with Internet network difficulty.

The output of SPK Online include facilitating the source of information and classification references; establishing communication between BPS and classification users also provide accurate search of classification code.

53. Pelayanan Maternal Penderita HIV Positif (AIDS) di RSUD Kardinah dalam Mendukung Program MDG'S di Kota Tegal

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Tegal
Unit Inovasi Pelayanan	RSUD Kardinah Kota Tegal Email rsukardinahtegal@gmail.com

Penderita HIV positif (AIDS) utamanya ibu hamil di Kota Tegal menjadi masalah tersendiri karena tidak tersedia fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani mereka. RSUD Kardinah berinisiatif memberikan pelayanan maternal bagi ibu hamil penderita HIV positif dengan tujuan:

1. efisiensi biaya dan waktu
2. meningkatkan keselamatan ibu dan bayi
3. mengurangi risiko penularan virus dari ibu hamil ke bayi.

RSUD Kardinah telah menyelesaikan masalah ibu hamil dengan HIV positif melalui pelayanan langsung. Pelayanan Maternal Penderita HIV Positif merupakan pelayanan terpadu dimulai sejak deteksi dini kehamilan, pendidikan terhadap keluarga penderita, dan proses melahirkan bayi di rumah sakit sampai dengan pelaksanaan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa bayi tidak tertular infeksi HIV.

Pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan strategis berupa:

1. pelaksanaan serangkaian tes kesehatan
2. pendidikan dan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, keluarga dan masyarakat
3. pelayanan konseling, pengobatan dan tindakan medis
4. pemantauan tingkat infeksi virus HIV, dan
5. pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah perawatan dari rumah sakit

Pelaksanaan program ini telah membawa dampak positif dan mendapat respons positif dari masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara sukarela.

53. Maternity Service for HIV Positive (AIDS) Patients in Kardinah Public Hospital

Category	Promoting Gender responsiveness in Providing Service to Society
Agency	Tegal City
units of service innovation	RSUD Kardinah Kota Tegal Email rsukardinahtegal@gmail.com

HIV-positive (AIDS) patient, especially pregnant women in Tegal Central Java has become a particular problem because of the inadequate health facilities for them. Kardinah Public initiated to provide maternal care for HIV-positive pregnant women with the aim of:

1. *Efficiency of cost and time*
2. *improving the safety of mothers and babies*
3. *Reducing the risk of virus transmission to babies from mothers.*

Kardinah Public Hospital has overcome the issue of pregnant women with HIV-positive by providing direct services. Maternity Service for HIV Positive is an integrated service that began in the early detection of pregnancy. It is followed by the process of education to the patient's family, and the process of giving birth in the hospital. Afterward, as the final step, the implementation of a series of examination is conducted to ensure that the baby is not infected by the HIV infection.

This service is conducted with strategic approaches of:

1. *Implementation of a series of medical test.*
2. *Education and health counseling for pregnant women, families and society.*
3. *Counseling, medication and medical treatment to pregnant women, and*
4. *Monitoring the of HIV infection level.*
5. *Monitoring the health of mothers and babies after treatment from the hospital.*

This program has brought positive impact and has received a positive response from the society of Tegal and surrounding areas that are indicated by the increasing awareness of the public to consult voluntarily.

54. SPOTS (Sistem Perizinan *Online* dan Tracking System)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Siak
Unit Inovasi Pelayanan	BPMP2T Kabupaten Siak Email tsantous@yahoo.com



Kabupaten Siak terletak pada posisi strategis kawasan *Hinterland area* kerjasama Ekonomi Regional Singapura, Johor dan Riau serta termasuk dalam kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle*.

Melihat kondisi dan peluang investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Siak mengembangkan Sistem Perizinan *Online* dan *Tracking System* yang dapat diakses melalui internet.

Langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi yaitu terlebih dahulu melakukan registrasi yang akan dikonfirmasi melalui *email*. Setelah dikonfirmasi, maka proses pendaftaran perizinan secara *online* sudah dapat dilakukan. Selain itu semua perizinan yang telah selesai akan diinformasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui *SMS Gateway*.

Manfaat yang dirasakan, diantaranya adalah meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun, tidak adanya pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan meningkatnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Siak.

Kendala utama yaitu kurangnya infrastruktur internet sampai ke desa-desa sehingga masyarakat harus mencari warung internet atau datang ke Kantor Camat untuk melakukan pendaftaran *online*.

Direncanakan nantinya sistem ini akan dilengkapi dengan *early warning system* untuk memberikan peringatan melalui *SMS Gateway* bahwa perizinan akan segera *expire* sehingga harus dilakukan perpanjangan.

54. Online Licensing System and Tracking System

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Siak Regency
units of service innovation	BPMP2T Kabupaten Siak Email tsantous@yahoo.com

Siak Regency is located in the Hinterland area of Regional economic cooperation covering Singapore, Johor, and Riau, also included in the area of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth.

Siak Regency considers the conditions above and the existence of investment, both of Domestic Investment and Foreign Direct Investment. Thus, the Integrated Licensing Service and Investment Agency of Siak Regency developed Online Licensing System and Tracking System that can be accessed through internet.

Steps to utilize the application are to register first to be confirmed via email. After confirmation then the online licensing application process can be performed. In addition to the traceability through the tracking system, all the permissions that have been completed will be informed to the public and businesses actors via SMS Gateway.

The benefits obtained include increasing rate of Community Satisfaction Index every year, the absence of complaints related to licensing services and the increase in the value of investment into Siak.

The main constraint is the lack of internet infrastructure to villages therefore society should find internet cafes or come to the District Office to perform online licensing registration.

The future plan is that the system will be equipped with an early warning system. It is useful to give a warning through SMS Gateway that licenses will expire soon therefore an extension is required.

55. Gempungan Di Buruan Urang Lembur

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Setda - Bagian Humas Email humas_pwk@yahoo.com



Nenek Moyang orang Sunda mengatakan bahwa setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Konsep ini diterjemahkan dalam Program “Gempungan Di Buruan Urang Lembur” (Berkumpul Di Halaman Rumah Masyarakat di Perdesaan) di Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2008.

Inisiatif ini merupakan solusi ampuh pelayanan publik, jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan pembangunan partisipatif. Warga satu desa bisa ikut bertatap

muka, bercengkrama dengan pemimpinnya..

Setiap warga bisa menyampaikan keluhannya kepada jajaran pemerintah daerah yang hadir. Pada tahun 2010 Gempur makin intens digelar didukung dana APBD dan dilengkapi berbagai perlengkapan pelayanan publik, diantaranya:

1. Pelayanan Kependudukan, pembuatan KTP, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan Massal dan Sunatan Massal
3. Pelayanan pendaftaran baru dan rutin Program Keluarga Berencana serta Pemeriksaan Kehamilan
4. Pelayanan Pemberian Bibit Pohon Produktif dan Pupuk Organik
5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak, Pemberian Bantuan Hewan Ternak dan Inseminasi Buatan
6. Pelayanan Pembuatan Perizinan Terbatas
7. Pelayanan Perpustakaan Keliling
8. Pelayanan Pemberian Paket Sembako
9. Pelayanan Transfusi/Donor Darah

Dampak yang sangat menonjol adalah pelayanan publik makin baik, kesadaran masyarakat meningkat, serta kepedulian dan partisipasi masyarakat makin tumbuh.

55. Initiative Gembur in Purwakarta

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Purwakarta Regency
units of service innovation	Setda – Bagian Humas Email humas_pwk@yahoo.com

The Ancestor of the Sundanese people says that each region has a different character. This philosophical concept is translated to the Program of “Gempungan Di Buruan Urang Lembur” (Gather in Society House Yard in the Village) in Purwakarta West Java since 2008

It is a powerful solution for public services; bridging the communication between the society and the government, and also participatory development. Residents of the village can come face to face and talk to the leader. Gembur is a form of local government that is responsive to receive information about input on society needs.

Every villager can express the complaints to the ranks of the local government who attend the meeting. In 2010, it became increasingly intense supported by local funds and featuring a variety of public services such as:

1. *Population Service, ID card, birth certificate, Certificate of Marriage and Family Card*
2. *Medical Check-Up Service, Mass Medical Treatment and Circumcision*
3. *New Membership and routine Family Planning Program Service and Pregnancy Examination*
4. *Provision of Productive Tree Seedlings and Organic Fertilizer*
5. *Animal Health Inspection Service, Providing cattle, and artificial insemination*
6. *Registration of Limited Licensing Services*
7. *Mobile Library*
8. *Provision of Basic Needs Packages*
9. *Blood Transfusion/Donor*

The most successful outputs are improved the quality of public services, increased public awareness, and growing community awareness and participation.

56. MaKinTerLayani pegawai On-Line

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Unit Inovasi Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Email Perprog@yahoo.com

Manajemen Kinerja Terpadu Pelayanan Pegawai *on-line* merupakan sistem manajemen pengukuran kinerja pegawai yang terintegrasi dengan kebijakan pemberian tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, diklat dan hukuman disiplin serta aplikasi pelayanan kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sistem ini mendorong perubahan budaya dan pola kerja pegawai dengan menggunakan teknologi informasi. Budaya kerja rutinitas dan penilaian kinerja subyektif berubah menjadi bekerja untuk mencapai target dan penilaian kinerja obyektif.

Sistem ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya beberapa program pembangunan dan belum optimalnya kualitas pelayanan. Pengukuran dimodifikasi lebih realistis dengan langkah-langkah:

1. *one man one report*
2. *self assesment*
3. *integrated application*
4. *Continous improvement* dan membangun *awaraness* terhadap pekerjaan

Sistem ini bukan semata-mata aplikasi *on-line* untuk mengukur kinerja namun untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai. Dampaknya antara lain sistem penilaian kinerja pegawai yang terukur dan mampu ditelusuri; data dan informasi sasaran kerja pegawai serta kebijakan pengelolaan dan pelayanan *on-line* kepegawaian.

Manfaat utama bagi individu pegawai yaitu disiplin dan peduli terhadap pekerjaan dan perilaku kerja. Bagi unit kerja yaitu pengawasan dan pengendalian, pembenahan kelembagaan, perilaku pegawai, serta pemberian penghargaan dan sanksi.

56. Integrated Performance Management of Employee Services Online

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Jawa Barat Regency
units of service innovation	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Email Perprog@yahoo.com

Online Integrated Performance Management of Employee Services is an employee performance assessment management system integrated with policies to provide performance allowance, grade promotion, position promotion, education and training and disciplinary punishment and employee affairs services applications in West Java local government. This system encourages a change of cultural and working patterns by using information technology. Routine work culture and subjective performance evaluation transformed to achieve the targets and objective performance assessment.

This system was motivated by the failure in some of the development programs and low quality of service. Assessment is modified to be more realistic with implementation strategies of:

1. *One man one report.*
2. *Self-assessment.*
3. *Integrated application.*
4. *Continuous improvement and building awareness of task.*

This system is not merely an on-line application to measure employee performance, but also to change the mindset and working culture of employees. The outcomes include measurable and traceable employee performance assessment system. In addition, it is the data and information about working target and Human Resources management policies and on-line employee affairs service.

The main benefits for the individual employee are discipline and concern about the job and working behavior. For units are supervision and control, institutional reform, employee behavior, rewards, and sanctions.

57. Gender Infrastruktur PU dan Permukiman

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Inovasi	Nama PUG PU
Pelayanan	Email marwati@pu.go.id

Sebelum Gender Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman diterapkan seringkali timbul kesulitan dan ketidaknyamanan dalam pemanfaatan infrastruktur oleh kelompok sasaran.

Kesulitan tersebut antara lain:

1. Untuk bangunan gedung, lift tidak dilengkapi huruf Braille, tidak tersedia ruang laktasi di dan fasilitas taman penitipan anak di gedung perkantoran, tidak tersedia ramp dan pemandu jalan serta toilet yang terpisah.
2. Untuk bangunan pelengkap jalan, trotoar kurang aman dan nyaman, jaringan pedestrian terputus dan tidak tersedia fasilitas penyebrangan.
3. Partisipasi masyarakat kurang terfasilitasi dalam penyediaan pemukiman
4. Pemuda kurang dilibatkan dalam penyediaan ruang publik.

Strategi yang diusulkan antara lain Penerapan/Review/Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria agar lebih responsif gender; gender statistic; gender budgeting; gender training dan gender audit.

Pendekatan kreatif dan inovatif dilakukan dengan menanamkan pemahaman bahwa infrastruktur tidak netral gender; mengembangkan tools untuk meningkatkan kualitas, memasukkan informasi gender infrastruktur dalam media sosialisasi; mencontoh best practices; dan menginisiasi peluang kesempatan kerja bagi tenaga kerja konstruksi penyandang disabilitas.

Manfaat konkrit pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yaitu terpenuhinya kebutuhan spesifik gender di bangunan gedung di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

57. Gender Public Work and Settlement Infrastructure

<i>Category</i>	Promoting Gender Responsiveness in Providing Service to Society
<i>Agency</i>	Kementerian Pekerjaan Umum
<i>units of service innovation</i>	Name PUG PU Email marwati@pu.go.id

Before Gender Public Works and Settlement Infrastructure applied, difficulties and inconvenience in infrastructure utilization by target group often arise.

These difficulties such as:

1. For building, the elevator is not equipped with Braille, unavailability of lactation room and daycare facility in office, unavailability of ramp and street guides and unavailability of separated toilet.
2. For roads, sidewalks are less safe and convenient for users, pedestrian walk is interrupted and unavailability of crossing facilities
3. community participation is less facilitated in the provision of housing facilities and infrastructure
4. youths are less involved in the provision of public space

Strategies proposed include the Application/Review/Preparation of Norm, Standard, Procedures and Criteria to establish gender responsive guidelines/standards; gender statistics, gender budgeting, gender training, and gender audits.

Creative and innovative approach is conducted to internalize the understanding that infrastructures are not gender neutral. It develops tools to improve the quality. Also, it incorporates the gender-infrastructure information in socialization media. In addition, it follows the best practices. And it initiates employment opportunities for construction workers with disabilities

Tangible benefits of the implementation of gender mainstreaming strategies include the fulfillment of gender-specific needs in the building of the Ministry of Public Works.

58. Penyimpangan "Positif" Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui program BLC (*Broadband Learning Center*)

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kota Lubuklinggau
Unit Inovasi Pelayanan	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau Email winanoa@gmail.com



Broadband Learning Centre adalah program pelatihan komputer dan internet kepada masyarakat yang dilaksanakan di gedung perpustakaan dengan fasilitas yang memadai, dan tidak dipungut biaya.

Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau bekerja sama dengan PT Telkom sudah mengembangkan program ini sejak Juli 2013. Telkom menyediakan perangkat computer, jaringan internet dan proyektor, sedangkan Perpustakaan menyediakan tempat, program pelatihan, dan pelatih.

Peserta akan mendapatkan pengetahuan yang cukup di bidang computer, menggunakan internet dalam menjangkau informasi, media sosial, dan pemasaran. Peserta pelatihan yang sudah menyelesaikan pelatihan memperoleh sertifikat. Perekrutan peserta pelatihan dilakukan pihak perpustakaan secara langsung, *online* dan melalui iklan koran lokal. Peserta dikelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pemahaman dasar tentang computer dan teknologi informasi komunikasi.

Dampak yang utama yaitu peningkatan pemahaman warga terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan para lulusan pelatihan berhasil dalam kegiatan usaha. Manfaat pelatihan adalah masyarakat makin akrab dengan perpustakaan, meningkatnya gemar membaca, warga melek computer dan internet, mencerdaskan warga, dan membuka kesempatan usaha warga sekitar perpustakaan.

58. Broadband Learning Center Program in Library

Category	Promoting Collaborative Approached Government in Information Era
Agency	Lubuklinggau City
units of service innovation	Name BPAD Kota Lubuklinggau Email winanoa@gmail.com

Broadband Learning Centre is a computer and internet training program to society that is conducted in the library building equipped with proper facilities and free of charge.

Library, Archive and Documentation Agency of Lubuklinggau City South Sumatera in cooperation with PT Telkom has already developed this program since July 2013. Telkom provided the computer set, Internet network, and projector while the Library is providing the place, training program, and mentor.

The participants will get sufficient knowledge in the field of the computer, using Internet to get information, social media, and marketing. The participants who finished the training acquire a certificate. The training participant's recruitment is by direct invitation, online and local newspapers advertisement. Participants are grouped according to their educational background and basic understanding of computer and communication information technology.

The most successful outcome is the improvement of society understanding about the utilization of information technology, and the training graduates are successful in their business. The benefits of training are society being more familiar with the library, increasing the passion for reading, computer and internet-aware society, improving society knowledge and opening business opportunity for people living near the library area.

59. "One Stop Service Toilet SMKN 3 Wonosari" (Pelayanan Terpadu bagi Siswa, Guru, dan Karyawan Putri Dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Kesehatan Reproduksi di SMKN 3 Wonosari)

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul SMKN 3 Wonosari Email edca_16@yahoo.com

One Stop Service Toilet SMKN 3 Wonosari merupakan program pelayanan terpadu terhadap warga sekolah terutama perempuan agar kebutuhan saat haid bisa terpenuhi. Penyediaan toilet bagi kebutuhan siswi haid harus dibarengi kegiatan edukasi pentingnya kesehatan reproduksi. dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi.

Toilet Bersih Sehat Jujur dilengkapi majalah dinding yang memberikan informasi seputar haid dan kesehatan reproduksi yang terus diupdate setiap bulan. Untuk edukasi kepada siswi, diusulkan kegiatan studium general kesehatan reproduksi dan *coaching clinic* kesehatan reproduksi.

Tujuan program yaitu:

1. membangun kepedulian siswi terhadap kebersihan toilet
2. mengakomodir kebutuhan siswi akan toilet yang
3. mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan pada Standar Kompetensi Lulusan
4. meningkatkan pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi
5. pendampingan untuk mencegah risiko berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi

Dampak program ini yaitu terbentuknya Komunitas Pecinta Toilet Bersih, menurunnya jumlah siswi yang tidak mengikuti pelajaran saat haid, meningkatnya pengguna toilet Bersih Sehat Jujur, studium general kesehatan reproduksi dan *coaching clinic*.

Manfaat utama OSST adalah memberikan kemudahan akses pemenuhan kebutuhan haid di sekolah dan memperoleh informasi kesehatan reproduksi; edukasi siswi dalam menggunakan toilet dengan benar, dan melatih kejujuran.

59. Integrated Reproductive Health Services at Wonosari High School)

Category	Promoting Gender Responsiveness in Providing Service to Society
Agency	Gunungkidul Regency
units of service innovation	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul SMKN 3 Wonosari Email edca_16@yahoo.com

One Stop Service Toilet of SMKN 3 Wonosari Yogyakarta is an integrated services program for the school community, especially women to fulfill their needs during menstruation. This program should be hand in hand with an education program to raise awareness of reproductive health.

The honest Healthy Clean toilet is equipped with a bulletin board that provides information about menstruation and reproductive health and updated monthly. General study on reproductive health and reproductive health coaching clinic activities are proposed to educate the female students.

The objectives are:

- 1. Building student awareness about the hygiene of the toilet.*
- 2. Accommodating the needs of female students for clean toilets.*
- 3. Implementing the National Education Standards of the Graduate Competency.*
- 4. Improving the understanding of the importance of reproductive health.*
- 5. Assistance to prevent the risks associated with reproductive health issues.*

Some outputs of this program are the following. First, Clean Toilet Lovers Community is established. Second, the number of students who skip classes during menstruation decreases. Third, the number of Honest Healthy Clean toilet users increases. Fourth, the general study of reproductive health and coaching clinic exists.

The main benefit of are to provide easy access to fulfilling the menstruation necessity in school and obtain reproductive health information; to educate the female student in using the toilet properly, and practice honesty.

60. Pro Investasi (Implementasi PTSP) Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Boyolali
Unit Inovasi Pelayanan	BPMP2T Kabupaten Boyolali Email bpmp2t@boyolalikab.go.id

Pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebelum tahun 2010 berbelit-belit, biaya sangat tinggi, dan tidak transparan, sehingga minat investor untuk menanamkan investasi sangat rendah.

Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan perizinan investasi dalam rangka pengembangan sistem “*One Stop Service*” dan membuka pusat informasi didukung peningkatan infrastruktur. Upaya awal Pro Investasi dilakukan dengan perubahan regulasi yang berpihak pada investor, percepatan proses perizinan dan transparansi perizinan, pembenahan sarana-prasarana kantor perizinan.

Pendekatan Strategi yaitu:

1. PTSP dilaksanakan pada satu tempat
2. peraturan adalah atributif, Kepala BPMP2T Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan penuh menandatangani seluruh perizinan
3. terdapat 2 jenis perizinan, yaitu perizinan yang tidak dikenakan retribusi (44 jenis) dan perizinan yang dikenakan retribusi daerah
4. Pelayanan dan pengaduan secara *online*
5. Petugas memberikan pelayanan prima dan menaati kode etik pelayanan perizinan

Pada tahun 2015 akan diterapkan sistem perizinan *online*, SMS Gateway, *touchscreen*, *electronic document*, sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, mobil keliling perizinan, ATM di gedung BPMP2T, layanan pengaduan secara *online*, dan survey IKM secara rutin.

Manfaat Pro Investasi adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkualitas.

60. Pro Investment (PTSP Implementation) Boyolali Regency, Central Java Province

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Boyolali Regency
units of service innovation	BPMP2T Kabupaten Boyolali Email bpmp2t@boyolalikab.go.id

Prior to 2010 permits issuance in Integrated Licensing Service and Investment Agency of Boyolali was complicated, high cost, and was not transparent. These conditions significantly contribute to investors' interest in investing in Boyolali.

Pro investment is a concept to ease service and investment permit issuance through the development of one-stop service and opening information center supported by infrastructure improvement. Through pro-investment, investors begin to invest in Boyolali. Strategic efforts are done support pro-investment are done through revising regulations that complicate investment process, accelerating permits issuance process, transparency of process, the improvement of permit office infrastructure.

Strategic approaches are:

1. One stop service are delivered in one location
2. Attributive regulation, the Head of BPMP2T is given full authority to legalize permits issuance
3. There are two types of permits, subjected to levy, and non-levy
4. Online service and complaints
5. Officials provide excellent service and comply with a code of ethics in permits issuance.

Online permits application, SMS Gateway, touchscreen, electronic documents, joint socialization with Employment Social Insurance Agency, mobile permits, ATM in BPMP2T building, and online complaint service are expected to be implemented in 2015

Pro investment outcome is the high quality of Integrated One-Stop Service.

61. Balee Inong (Rumah Perempuan Kota Banda Aceh)

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Banda Aceh
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
	Email gender.ppkb@yahoo.com



Berbagai persoalan yang dihadapi perempuan mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam berbagai bidang pembangunan. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh berinisiatif membentuk “Balee Inong” (Rumah Perempuan).

Balee Inong merupakan lembaga komunitas perempuan di bawah koordinasi KP3AKB di mana anggotanya terdiri dari perwakilan perempuan masing-masing gampong. Balee Inong bertujuan mewujudkan masyarakat perempuan yang mandiri, produktif, sejahtera, dan partisipatif

Sampai dengan saat ini telah terbentuk 18 Balee Inong di Kota Banda Aceh. Balee Inong mampu mengatasi persoalan perempuan yang selama ini belum teratasi, yaitu a) kemandirian dan partisipasi; b) terbukanya akses perempuan terhadap berbagai informasi pembangunan; c) terbukanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas perempuan; d) menjadi perwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan e) mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Strategi Balee Inong ditempuh melalui:

1. persiapan pembentukan
2. pembentukan Balee Inong melalui musyawarah perempuan di tingkat gampong
3. sosialisasi ke berbagai pihak
4. penguatan kapasitas pengurus dan anggota Balee Inong melalui pelatihan, seminar, dan workshop

Manfaat yang dihasilkan dari inisiatif ini yaitu kemudahan memperoleh informasi, pemahaman, wawasan, dan transfer iptek, dan peningkatan kegiatan perempuan pada setiap SKPD.

61. Balee Inong: Women Empowerment House in Banda Aceh City

Category	Promoting Gender responsiveness in Providing Service to Society
Agency	Banda Aceh City
units of service innovation	Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Email gender.ppkb@yahoo.com

The improvement of women participation in development has been continuously halted by various problems. Banda Aceh City Government's Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning initiated Balee Inong (Women's House).

Balee Inong is a women empowerment groups and community under the coordination of KP3AKB, of which member comes from women representative of every gampong in Banda Aceh City. Its objective is to realize women's productivity, prosperity, and participation in the society.

Banda Aceh City currently has 18 active Balee Inong. Its success includes: a) women's increasing participation and independence in gampong level; b) better access to development information for women; c) more chances for women to improve their capacity; d) its ability to represent women in development planning forum; and e) encouraging gender mainstream in the development.

Balee Inong's strategy consists of:

1. Preparation for its formation
2. Formation of the actual Balee Inong in which two representatives from all 90 gampongs in Banda Aceh city are invited to attend a women discussion forum
3. Socialization to various parties
4. Empowerment of members and organizers through gender perspective training, seminars, and workshops.

The benefits from this initiative are: ease of access to information, understanding, perspective, and information and technology sharing, as well as the improvement of women involvement in every government task units.

62. Penggunaan Media *Online* **Sabilulungan.go.id** untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung (Inovasi Pelayanan Publik *Online* Pemerintah Kota Bandung)

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kota Bandung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandung Email abah1129@gmail.com

Pada 2007-2012 Pemko Bandung dilanda masalah hukum terkait penyaluran Dana Hibah dan Bansos, karena banyak penyimpangan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat/ organisasi masyarakat. Peruntukan dana hibah dan bansos sering kurang tepat sasaran.

Ide kreatif “Hibah Bansos *Online* Sabilulungan” mendapatkan respons positif masyarakat. Melalui program ini setiap organisasi di Kota Bandung yang ingin mengajukan proposal hibah bansos cukup mendaftarkan melalui aplikasi dan mengirimkan kelengkapan dokumen secara langsung. Seluruh informasi tahapan proses HBOS dapat dilihat oleh masyarakat secara *online* setiap saat. Masyarakat dapat memonitor setiap tahapan dan melaporkan langsung apabila terjadi penyimpangan.

Strategi pelaksanaan melalui tahapan usulan pengajuan dana hibah dan belanja bansos dari calon; pengadministrasian dan pemeriksaan kelengkapan proposal; disposisi Walikota, evaluasi oleh SKPD terkait, rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pertimbangan, persetujuan Walikota, dan pembuatan Perda APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD oleh Walikota.

Manfaat utama HBOS, yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja, manajemen perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik, pelayanan cepat, tepat, mudah, dan murah.

62. Bandung Municipal innovation on Online Public Service Delivery

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Bandung City
units of service innovation	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandung Email abah1129@gmail.com

In 2007-2012 legal issues concerning the distribution of grant and social assistance hit Bandung Municipality due to deviations in the process. Often, allocation of grants and social assistance were misplaced.

Sabilulungan Online Grant and Social Assistance was well received by the society. With this program, organizations residing in Bandung can apply for the help through an online application and send in the document requirements. The public can monitor the whole process online. Societies could monitor each stage and file a report if a deviation was detected.

Implementation strategy includes process on submission of grant/social assistance from potential recipients; verification and administration of proposal; Mayor's referrals; evaluation by related SKPD; recommendation from the local budget team (TAPD), inputs and counsel; Mayor's approval, and formulation of local and Mayor regulation on budget breakdown.

The notable outcomes include change in mindset and culture, transformation management, improvement of the condition; fast, accurate, easy and inexpensive delivery of service.

63. Campus Social Responsibility

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Surabaya
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Sosial Kota Surabaya Email atiyunindhira@yahoo.com

Campus Social Responsibility merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan kepada anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah di mana satu orang mahasiswa mendampingi satu orang adik asuh.

Dinas Sosial berinisiatif menyusun satu program kerja sama “*Campus Social Responsibility*” yang memfasilitasi para mahasiswa untuk melakukan kegiatan KKN Tematik dalam bentuk pendampingan kepada Anak PMKS. Pendampingan kepada anak mengakibatkan transfer ilmu, pengetahuan, dan wawasan dari mahasiswa kepada anak bermasalah sosial. Pelibatan perguruan tinggi bersifat memberikan jaminan keberlangsungan program Dinas Sosial juga melibatkan Jawa Post yang bertujuan sebagai sarana pemberitaan kepada publik tentang kegiatan CSR.

Penerapan strategi ini, yaitu pendataan, sosialisasi program, pemetaan data, *gathering* kakak damping dan adik damping, bimbingan teknis, proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi, dan *youth competition* (penghargaan).

Manfaat utama CSR adalah mengembalikan anak bermasalah sosial yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Dampak CSR adalah menurunnya angka jumlah anak putus sekolah, menurunnya angka kenakalan remaja, kesadaran arti penting pendidikan, orang tua mengerti pendidikan menjadi prioritas utama, apresiasi terhadap mahasiswa yang melakukan pendampingan, dan pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat.

63. Campus Social Responsibility

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Surabaya City
units of service innovation	Dinas Sosial Kota Surabaya Email atiyunindhira@yahoo.com

Campus Social Responsibility is a program initiated by Surabaya City's Social Affair Office, in cooperation with universities in its area to conduct mentoring for children at risk of or is dropping out from schools. The program assigns one college student as foster brother for one child

Surabaya Social Affair Office initiates to make Campus Social Responsibility to facilitate universities to mobilize students in a field work study as a patron. Through Campus Social Responsibility program, college students can transfer knowledge, skills, and life perspective, and inspire children under their patronage. Universities' direct involvement ensured the sustainability of the program. Surabaya City's Social Affair Office also invite Jawa Post to get involve in disseminating the information about the program to the public.

The strategy for the implementation of the program includes identification, socialization, data mapping, gathering between foster brother and children, technical assistance, the actual counseling, monitoring and evaluation, and youth competition.

The main benefit that the society gets from CRS is the return of the children to school, the reduction of juvenile delinquencies, public's overall awareness of the importance of education, parents attitude on the education of their children, college student's appreciation for various aspects of social responsibility, and universities' ever increasing role in society's empowerment.

64. Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Hukum dan HAM
Unit Inovasi Pelayanan	Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum (Ditjen AHU) Email amienfajar@yahoo.com

Pengesahan Badan Hukum Versi AHU *Online* adalah layanan Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum KemenkumHAM kepada Notaris dan Masyarakat. Dengan AHU*Online*, pengesahan kurang dari 1 (satu) jam dan tidak lagi dilakukan proses koreksi oleh Pegawai Ditjen AHU.

Program ini dijalankan dengan sistem *online* penuh, pelayanan 1 jam, kepastian waktu, kemudahan bagi Notaris/Pemohon, dan menghindari korupsi. Proses permohonan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu SK MenkumHAM dapat langsung dicetak Notaris.

Perubahan setelah penerapan inovasi: 1) Notaris membuka *online* PBHV-AHU*Online* (ahu.go.id); 2) Mengisi format data yang telah disediakan pada sistem; 3) Tidak dilakukan pemeriksaan data; 4) Pembayaran langsung ke Bank BNI dengan menyebutkan nomor bukti transaksi PBHV-AHU*Online*.; dan 5) Setelah pembayaran, Notaris dapat mencetak SK MenkumHAM tentang pengesahan badan hukum.

Manfaat utama SPBH-AHU*Online*: peningkatan pelayanan kepada Notaris/Pelaku usaha, pegawai profesional dan akuntabel, efektivitas dan efisiensi, dan pelayanan cepat. Dari sisi pemohon: mengurangi biaya transportasi, ekonomis (biaya ringan, prakti, gunakan internet), menghilangkan praktik KKN dan pungli, dan kepastian waktu kurang dari 1 (satu) jam. Dari sisi Ditjen AHU, pekerjaan lebih mudah, efisiensi waktu, dan efisiensi berkas.

64. Online Administration of General Law Legalization for Legal Entity

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Kementerian Hukum dan HAM
units of service innovation	Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum (Ditjen AHU) Email amienfajar@yahoo.com

Online Administration of General Law (AHU online) legalization for a legal entity is a service provided by Directorate General of Legal Entity Administration for the notary and the society. With AHU online the process would only take 1 hour to complete, and the employee of Ditjen AHU is not responsible for the verification process

This program is run with the system fully online, 1-hour service, provides a certainty of time, ease for notary/applicants and helps prevents corruption. The application process can be done anytime and anywhere. Moreover, the Decree of MoLHR can directly be printed by the Notary.

The changes that can be felt post of the innovations are: 1) notary access PBHV-AHU Online (ahu.go.id); 2) fill out the data as demanded by the system; 3) data verification are not done by Ditjen AHU employees; 4) direct payment to BNI by stating the PBHV-AHU online transaction receipt number; 5) after completing the payment, notary would gain access to print the MoLHR Decree on the legalization of the law entity.

Benefits of SBH-AHU online are an improvement of services to notary/business society, professional and accountable employee, effectiveness and efficiency, and quick services. For the applicants: reducing fare, economist, abolishing corruption, collusion, and nepotism, and extortion practices, and time certainty. For the Ditjen AHU perspective: help to simplify the task, time and documents efficiency.

65. Inovasi Pala Sambutan untuk mendukung Rehabilitasi Kebun Pala Rakyat yang terserang Penyakit di Kabupaten Aceh Selatan

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Email ufazulfsp@yahoo.co.id

“Inovasi Pala Sambutan untuk mendukung Rehabilitasi Kebun Pala Rakyat yang terserang penyakit di Kabupaten Aceh Selatan” merupakan lanjutan kegiatan Forum Pala Aceh yang telah dilakukan pada 2012-2013.

IPSAS adalah program peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bibit unggul pala Sambutan dan pola pengelolaan tanaman pala yang ramah lingkungan. Strategi yang dikembangkan, yaitu:

1. menjadikan tanaman pala Sambutan sebagai tanaman unggulan yang dibudidayakan oleh petani pala secara mandiri
2. membudayakan metode *epicotyl grafting* untuk pengembangan bibit pala Sambutan kepada petani pala
3. mengembangkan lokasi pembibitan tanaman pala Sambutan di setiap kecamatan.
4. melakukan uji laboratorium terhadap kualitas minyak pala yang dihasilkan pala Sambutan.

Terdapat dua hasil penting IPSAS, yaitu 1) pemulihan 551,72 hektar kebun pala rakyat yang tersebar di 11 kecamatan; dan 2) ditemukannya bibit unggul pala Sambutan yang memiliki tiga kelebihan dibandingkan pala biasa.

IPSAS bermanfaat sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit JAP dan pelibatan/partisipasi masyarakat secara besar-besaran sehingga dapat memotivasi dan menimbulkan gairah petani pala untuk bertani pala kembali setelah hampir 30 tahun tanaman pala mereka diserang oleh JAP.

65. Nutmeg Plantation Innovations in South Aceh Regency

Category	<i>Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism</i>
Agency	South Aceh Regency
units of service innovation	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Email ufazulfsp@yahoo.co.id

Sambutan Nutmeg Innovation to Rehabilitate Infested Nutmeg Peasant Plantation in South Aceh Regency is the follow-up of Aceh Nutmeg Forum from 2012-2013.

IPSAS is a program to improve peasant's knowledge on Sambutan nutmeg and the farming methods that environmentally friendly

The strategy to reach that goal includes:

- 1. Encouraging farmers to cultivate independently Sambutan nutmeg as their main variety;*
- 2. Educating the farmers to perform epicotyl grafting on their own*
- 3. Establishing sapling cultivation facilities in every sub-districts in South Aceh Regency*
- 4. Continuously conduct laboratory test on the quality of nutmeg oil produced from Sambutan nutmeg.*

There two important results of IPSAS: 1) the successful rehabilitation of 551.72 hectares of peasants' plantation that are spread across 11 sub-districts; and 2) the invention of Sambutan nutmeg as the new variety that has 3 advantages compared to the common nutmeg

IPSAS benefits the society in its ability to provide disease-free plants. The mass involvement of farmers in its implementation motivates them to continue their plantation after 30 years of constant threat from diseases, especially the white root fungi.

66. HoT (HOSPITAL on TABLET), Modifikasi Rekam Medis Elektronik Rawat Inap Menggunakan Tablet di RS Paru Jember

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	UPT RS Paru Jember Email sigitkusumajati@yahoo.co.id

RS Paru Jember pada 2005 merupakan satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang berani menerapkan aplikasi sistem rekam medis elektronik rawat inap (SIMRS). SIMRS menghadapi banyak masalah, Salah satu penyebab, ketidakmauan dokter mengisi rekam medis elektronik rawat inap. Pada tahun 2011 SIMRS dimodifikasi secara *mobile* melalui *tablet*.

Manajemen RS Paru Jember menghasilkan inovasi *Hospital on Tablet*. Strategi pelaksanaan selama 2009-2013 yaitu:



1. SIMRS dihentikan
2. Migrasi *database* dan menyusun program *update* aplikasi
3. Tahun 2013, aplikasi digunakan secara *mobile* melalui *tablet*, dan HoT mengganti SIMRS.

Tahun 2015, aplikasi pembayaran *voucher* prabayar menggunakan *magnetic card*, membuat konten pendaftaran mandiri, pendaftaran pasien rawat inap *via* internet, penyusunan *website* terintegrasi dengan sistem dan program *paperless* di rawat inap.

Langkah kunci keberhasilan pelaksanaan rekam medis elektronik rawat inap:

1. Kesungguhan manajemen RS Paru Jember menyosialisasikan manfaat dari pelaksanaan rekam medis elektronik rawat inap
2. Melibatkan secara langsung dokter melalui Komite Medis

Manfaat utama HoT: meningkatkan kemauan dokter untuk mengisi rekam medis elektronik secara benar, lengkap dan tepat waktu; menggunakan *tablet* kapanpun dan di manapun, memberikan kemudahan kerja; pelayanan berkualitas; meningkatkan PAD RS Paru Jember; dan Indeks Kepuasan Masyarakat naik.

66. Hospital in Tablets at Paru Jember Hospital

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	East Jawa Province
units of service innovation	UPT RS Paru Jember Email sigitkusumajati@yahoo.co.id

Jember Lung Hospital in 2005 was the only one in Indonesia that dares to apply the inpatient electronic health record system (SIMRS). It faces many challenges in its implementation. The cause of it was the unwillingness of doctors to fill in the inpatient electronic health record. In 2011, SIMRS was modified to enabling to be mobile, and records could be completed through a tablet device. The hospital's data was able to be stored inside a mobile computer (tablet).

The Jember Lung hospital management made the Hospital on Tablet (HoT) initiative. The roadmap strategy 2009-2013 was as follow:

- 1. Usage of SIMRS was halted.*
- 2. Database migration and the formulation of program update for the software.*
- 3. In 2013, the new software was launched, the software can be mobile accessed using a tablet device, and thus SIMRS was discontinued and was replaced by HoT.*

The key steps in the success of electronic health records are:

- 1. The seriousness of Paru Jember Hospital management in continually socializing to the doctors, the benefit of utilizing electronic health records.*
- 2. Directly involving doctors through medical.*

HoT increase doctors willingness to accurately, completely and fills up the electronic health records in a timely fashion; utilizing tablet anywhere and anytime, it facilitate the work process; excellent service; increases Paru Jember Hospital local revenue, and improve the Society Satisfaction Index.

67. Taman Budaya Jambi

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Provinsi Jambi
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi - UPTD Taman Budaya Jambi Email Sripurnamaema@yahoo.co.id

Taman Budaya Jambi merupakan laboratorium; tempat pelatihan, bimbingan, pameran, dan pagelaran; festival, lomba, dan sayembara seni budaya; ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi dan temu karya di bidang seni budaya; dokumentasi seni budaya, perpustakaan, informasi seni, promosi, dan sosialisasi seni budaya; untuk visi Jambi Emas. Taman Budaya Jambi mendorong kegiatan kelompok dan sanggar seni-budaya; wadah kerja sama antarpelaku seni kreatif, penggiat seni-budaya; dan menghasilkan konsep baru pengembangan seni-budaya lokal; sekaligus menjadi destinasi pariwisata seni-budaya.

Promosi Taman Budaya Jambi dilakukan dalam bentuk penginformasian, baliho, spanduk, brosur, leflet, media TV lokal, website, facebook, dan media sosial.

Taman Budaya Jambi memberikan kemudahan akses pelayanan untuk pelaksanaan pagelaran dan pameran; memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada semua sanggar seni-budaya dan seniman; kerja sama antarseniman dan sanggar seni; dan ruang publik untuk berbagai kegiatan. Strategi pelaksanaan kegiatan berisi kegiatan menginformasikan program kepada sanggar seni dan seniman; fasilitasi kegiatan sanggar seni dan seniman; menyediakan ruang publik bagi pelaku kreatif seni-budaya

Manfaat utama adalah ruang publik promosi industri kreatif, promosi seni-budaya lokal, dan terselenggaranya berbagai kegiatan seni-budaya dan seni rupa, dan wadah komunikasi pelajar dan mahasiswa.

67. Jambi Cultural Park

Category	<i>Promoting Participation in Policy Making Process through Innovative Mechanism</i>
Agency	Jambi Province
units of service innovation	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi - UPTD Taman Budaya Jambi Email Sripurnamaema@yahoo.co.id

Jambi Cultural Park is a laboratory; a place for training, counseling, exhibition and performance; a facility for art and culture festival and competition; a medium for speeches, gathering, conference, colloquia, and discussion of art and culture; a library and the center for art and culture documentation, library, information, promotion, and socialization; to strive for Jambi Emas. Jambi Cultural Park encourages the activity of art groups and studios; serves as medium for collaboration between artists and other parties involve in creative economy; produces the new concept of local art and culture development; and is one of tourism destination in Jambi.

The promotions for the Park is done through socialization, posters, banners, leaflets, local TVs, website, and Facebook pages and other social media.

Jambi Cultural Park is giving ease of access to services on art performance and exhibitions; in facilitating and giving chances to all art studios and artists; collaborating the artists and art groups; providing public space for various art-related activities. Implementation strategy consists of socializing the Park's programs to art groups and artists; facilitating the activity of art groups and artists; providing the public area for art related activities.

The main benefits are the availability of public areas for the promotion of creative industry, the promotion of local art and culture, the presence of various art and culture events; and used for communication media for students.

68. Layanan Rakyat Istimewa Untuk Sertifikasi Tanah (LARIS)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Agraria & Tata Ruang - BPN
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Email sppbASNleman@yahoo.co.id

Layanan Rakyat Istimewa Untuk Sertifikasi Tanah (LARIS) adalah layanan penyiapan dokumen pertanahan yang diperlukan untuk pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi dan Manajemen Tata Kelola Kantor Pertanahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memprioritaskan Pembangunan Sistem Tata Kelola Dokumen Pertanahan dengan strategi pelaksanaan yaitu:

1. Pembahasan Rencana Pembangunan
2. Sosialisasi LARIS kepada staf
3. Pelaksanaan Penataan Ruang Penyimpanan Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah;
4. Pemasangan Lemari dan Rak, labelisasi lemari, rak dan album/kotak dokumen pertanahan
5. Pemberian Kode pada tempat penyimpanan masing-masing dokumen
6. Penempatan alat pemadam kebakaran
7. Pemasangan Finger Print pada pintu masuk ruang penyimpanan dokumen pertanahan
8. Pembuatan Aplikasi LARIS
9. Pemasangan perangkat komputer dan kamera
10. Instalasi Aplikasi LARIS berbasis *web* di *Server*
11. Uji Coba Aplikasi LARIS di Komputer *Client*
12. Pelatihan dan Simulasi
13. Implementasi.

Keluaran yang paling berhasil dari LARIS adalah tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hasil dari LARIS berdampak langsung kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen secara cepat dan akurat di manapun berada.

68. Special Service for the Society on Land Certification

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Kementerian Agraria & Tata Ruang - BPN
units of service innovation	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Email sppbASNleman@yahoo.co.id

Special Service for the Society on Land Certification (LARIS) is a service to assist the public in preparing related land documents for land certification. LARIS utilize e-governance of land registry office under the subsystem scope

Sleman Land Office prioritizes the development of Land Documents Management System with the Implementation strategies as follow:

- 1. Discussion pertaining LARIS development*
- 2. LARIS socialization throughout the staffs*
- 3. Setting up the archive room*
- 4. Installation of facilities, shelves, cabinets, and album labeling*
- 5. Codification of the archive room*
- 6. Installation of fire extinguisher*
- 7. Fingerprint installation on the entry of land document archive room*
- 8. Development of LARIS*
- 9. Computer and camera installation*
- 10. Installing web-based LARIS on the server*
- 11. LARIS trial on client computer*
- 12. Training and simulation*
- 13. Implementation.*

The most notable output of LARIS is good land administration as well as facilitating the society to a land registry services. Land registry documents are well organized, well kept, and digitalized documents create an ease of service in land registry services. LARIS helps accelerates bureaucracy reforms through the development of electronic documents system. LARIS brought direct impact to the quality improvement of public services and helped the user to access quickly and accurately the needed documents, as it is web based and online.

69. Menjemput Impian Wajib Pajak Dengan Layanan “Delivery Service Km.0 – Km.15 = 0”

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri Email pajakdipendajatim@yahoo.co.id

Layanan “*Delivery Service Km.0 – Km.15=0*” (disingkat DSK-0150) adalah jenis pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana wajib pajak yang berada di radius maksimal 15 km dari pusat layanan Samsat Keliling Kantor Bersama (KB) Samsat Kediri Kota dapat menitipkan pembayaran PKB yang terlambat kepada petugas yang datang menyampaikan surat tagihan pajak. Petugas pelayanan membayar kepada petugas samsat keliling, menerima bukti pembayaran, dan disampaikan kepada wajib pajak, tanpa biaya. Layanan dilaksanakan sejak awal tahun 2013 di wilayah Kediri Kota, bermitra dengan Polresta Kediri Kota dan PT Jasa Raharja.

Strategi Pelaksanaan inovasi DSK-0150 adalah pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana, sosialisasi dan diseminasi, rencana aksi, pelatihan, pengumpulan berbagai surat pajak, *pick up service* menerima uang pembayaran pajak untuk diteruskan kepada layanan Samsat Keliling.

Keluaran DSK-0150 adalah efektivitas dan efisiensi kerja, pembayaran tepat waktu, peningkatan pembayaran PKB, dekatnya pemerintah dengan masyarakat, meningkatnya kepuasan masyarakat, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan PAD.

Manfaat utama DSK-0150 adalah makin dekatnya pemerintah dengan masyarakat, meningkatnya kepercayaan masyarakat, penegakan nilai-nilai *good*, perubahan paradigma dan kepraktisan.

69. Realizing Taxpayers' Dream through Delivery Service

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
units of service innovation	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri Email pajakdipendajatim@yahoo.co.id

Delivery Service Km. 0-15=0 (DSK-0150) is motorized vehicle tax collection system in which taxpayers within 15kilometers the proximity the mobile unit of Kediri City's Integrated Service Joined Office can deliver their tax payment to the Office's mobile staffs. These mobile unit staffs will receive payment received on behalf of the taxpayers, and deliver it back to them free of charge. This service is delivered since the beginning of 2013, in collaboration with Kediri Police and Jasa Raharja Inc.

The implementation strategy for DSK-0150 includes the formation of directing and executing teams, socialization and information dissemination, action plan, training, the collection of tax documents, pick up service in which payments are received by collection staffs that send it to KB Samsat's mobile unit.

The output of DSK-0150 are the effectiveness and efficiency of work, on time payment, increase in PKB payment, close relationship between government and society, increasing society satisfaction and increase in society satisfaction index and local government income.

The main benefit of DSK-0150 are the improvement of the relationship between the government and the society; the implementation of good governance; civic awareness; changes in apparatus's paradigm, mindset, culture set, working spirit, togetherness, and service excellence; and practicalities.

70. AyoKerja

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Email bdr_lkp3k@yahoo.com

Inovasi “AyoKerja berbasis pemanfaatan teknologi informasi” dibuat untuk menghadapi permasalahan pengangguran, ketidakcocokan kualifikasi dan belum maksimalnya komunikasi antara disnakertransduk provinsi, pemerintah kab/kota dengan perusahaan.

Inovasi ini ternyata *mempercepat informasi dan proses penempatan tenaga kerja*, mampu mendorong bertambahnya perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan tenaga kerja sesuai kebutuhan, unik dan *mampu mempercepat reformasi birokrasi dan menuju layanan berbasis e-government*.

AyoKerja mewujudkan kecepatan informasi lowongan kerja dan pendampingan dan konsultasi untuk mengarahkan pencari kerja untuk memahami dunia kerja. AyoKerja menyediakan menu informasi kerja terkini yang selalu terupdate, konsultasi karir dan *job matching* secara terpadu baik langsung maupun *online* serta *gratis*.

Manfaat AyoKerja cukup banyak, yaitu pendekatan baru untuk meningkatkan pelayanan dalam bentuk pelayanan yang proaktif, informatif, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi; efektif dan efisien pencarian bagi pencari kerja, jaminan dan perlindungan, pelibatan pejabat fungsional, mendorong pembuatan SOP pada setiap disnaker kabupaten/kota, replikasi AyoKerja, akurasi data informasi lowongan kerja, peningkatan kepedulan perusahaan, pendampingan dan rujukan, dan yang terpenting menjadi satu-satunya model layanan informasi kerja dan konsultasi pekerjaan di tingkat provinsi yang berstandar ISO 9001:2008.

70. Let's Work (Ayo Kerja)

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
units of service innovation	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Email bdr_lkp3k@yahoo.com

The innovation of “AyoKerja an Information Technology based innovation” was initiated to face unemployment problems, qualification mismatch, and not maximal communication between Province Employment Transmigration and Civil Registry Service, municipality/regency, and companies.

It turns out that the initiative accelerates information distribution and the placement of labor, encourage the increase of company participating in the distribution of needed employment, unique and helps accelerates good governance towards e-governance service.

AyoKerja accelerates the information on vacancies, assistance and counsel in directing job seekers to understand better the working world. AyoKerja information menu provides updated vacancy information, a free online career counsel and integrated job matching.

There are plenty of outcomes from AyoKerja, new approach are used in improving the quality of service such as proactive services, informative, participative, and IT-based; effective and efficient, job matching for job seekers, guarantee, and protection, involving functional officials, encourages the formulation of SOP in each municipality/regency Employment Agency, replication of AyoKerja, accurate data on job vacancies, improving the concerns of the company, assistance and referrals, and most important, the only job placement and work consultation service at the provincial level with a standard of ISO 9001:2008.

71. ICT based VALEMO

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Malang
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Kota Malang - SMK Negeri 4 Malang

SMK Negeri 4 Malang mempunyai permasalahan cukup serius, yaitu sarana prasarana utama dan pendukung pembelajaran terbatas dan belum mengikuti perkembangan teknologi informasi. Guru hanya jadi fasilitator, dinamisator, dan motivator di kelas. Pembelajaran berputar di dalam kelas dan belum dirasakan implikasinya bagi masyarakat. Solusinya adalah menerapkan inovasi *ICT based Varied Learning Models* (VALEMO). VALEMO mengembangkan aneka model pembelajaran di kelas pada setiap setiap pembelajaran (model sosial menekankan pembelajaran *cooperatif learning*, pelajaran MIPA menekankan *contextual teaching and learning*).

Pendekatan strategi yaitu:

1. inventarisasi perangkat IT
2. pendataan jumlah guru yang belum linier dan guru yang berlatar belakang non kependidikan.
3. 24 model pembelajaran oleh 143 guru untuk pelajaran normatif, adaptif dan produktif
4. pengabdian masyarakat
5. meningkatkan keterserapan lulusan di dunia usaha/dunia industri

Manfaat utama inovasi yaitu pembelajaran makin bergairah; masyarakat UKM terbantu dalam promosi produk; sosialisasi makin lancar; guru makin profesional dan siswa makin serius; terbangun citra positif dan reputasi sekolah; minat siswa baru untuk belajar di SMKN Negeri 3 makin tinggi; dan masyarakat mulai melek komputer.

71. ICT-based VALEMO

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Kota Malang
units of service innovation	Dinas Pendidikan Kota Malang - SMK Negeri 4 Malang

Malang State Vocational School 4 had faced a serious problem where the infrastructures and main facilities were very limited, and its operation had not adopted the latest development in information technology. Teachers were only acting as facilitator and motivator. Education process is bound in classrooms, and the result had not been felt by the societies.

A solution was formalized in the form of Information, and Communication Technology based Varied Learning Models (VALEMO). It develops distinctive learning models in classrooms for a different subject where social subjects use cooperative learning and science subjects give emphasis on contextual teaching and learning.

Strategic approach includes:

- 1. Identification of IT equipment*
- 2. Identification of non-linear teachers and those with non-educational background*
- 3. The finalization of 24 learning models by 143 teachers for normative, adaptive, and productive subjects*
- 4. The implementation of social services*
- 5. Increasing absorption of graduates in business/industrial field*

The main benefit of the program includes increasing enthusiasm of all parties involved; small and medium business enterprises are help with promotion; better socialization; teachers' increased professionalism and students' improved commitment to study; the improvement of school's image and reputation; students' enthusiasm to study is increasing; the society starts to be familiar with computer technology.

72. Analisis Kemiskinan Partisipatif (Pendataan dari Si Miskin, oleh Si Miskin dan untuk Si Miskin)

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Unit Inovasi Pelayanan	BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Pendataan kemiskinan dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif merupakan pendataan yang melibatkan masyarakat desa secara aktif. Pendataan metode AKP menghasilkan data kuantitatif (*by name, by address*) dan data kualitatif (sebab/kondisi kemiskinan). Metode AKP ditujukan untuk menyediakan data kemiskinan yang mencerminkan kondisi lokal dan sebagai data pembandingan terhadap data kemiskinan dari basis data terpadu BPS.

Pendekatan AKP dipandang sebagai solusi oleh Pemkab Gunungkidul untuk memecahkan permasalahan kemiskinan. Fokus AKP: elaborasi pemetaan kemiskinan, siapa si miskin, di mana si miskin tinggal, apa penyebab kemiskinan, apa yang dimiliki oleh si miskin, bagaimana strategi bertahan, dan apa hambatan si miskin.

Pada awalnya metode AKP merupakan bagian dari program *Strategis Alliance for Poverty Alleviation* Kemenkokesra, kemudian diterapkan di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan dilakukan dengan menitikberatkan pada:

1. penyusunan indikator kemiskinan lokal,
2. menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif
3. pelibatan masyarakat miskin
4. olah data kemiskinan

Keluaran konkrit antara lain peningkatan partisipasi masyarakat; dihasilkannya data kemiskinan yang menunjukkan penyebab dan kondisi kemiskinan; Data kualitatif sebagai bahan perencanaan pembangunan; indikator yang mencerminkan standar kemiskinan lokal; dan pengolahan data melalui aplikasi SID.

72. Participative Poverty Analysis

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
units of service innovation	BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Poverty data collection using the Participative Poverty Analysis (AKP) is a data collection that actively involves Data collection using the AKP method resulted in quantitative data (by name, by address) and qualitative data (reason/poverty condition). AKP method is expected to provide poverty data that reflects the local condition and as comparative data to the integrated Statistics Indonesia poverty data.

AKP approach is viewed by Gunungkidul Regency as a solution for handling poverty. AKP focus are: elaborate poverty mapping, the people who are considered poor, the location where these people lives, reasons on why they fell into poverty, the possession of the poor, the strategy for surviving, and the challenges that the poor people faced.

Previously AKP method was a part of Strategies Alliance for Poverty Alleviation program, done by Coordinating Ministry of Public Welfare, it was then implemented in Gunungkidul regency. The approach are done by emphasizing on four things, which are:

1. The formulating local poverty indicator
2. Producing quantitative and qualitative data
3. Involving the poor
4. Poverty data processing

Concrete outputs are increase in society participation; qualitative data on poverty was produced, and it was able to show the cause and the condition of poverty; qualitative data as a base for development planning; poverty indicators that reflect the local standard of poverty; Data processing through SID.

73. Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Inovasi Pelayanan	BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah

Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah menggunakan teknologi *website* sehingga dapat diakses berbagai perangkat keras yang terhubung dengan *internet*. Masyarakat dapat mengakses tanpa harus *login*, sedangkan SKPD mempunyai akses sebagai admin masing-masing SKPD.

Pendekatan strategis diusulkan:

1. pengembangan tool (sistem) guna keseragaman pengisian format
2. sinkronisasi data
3. fasilitas kontrol dalam menjamin ketersediaan, kebenaran dan ketepatan waktu data
4. adanya fasilitasi
5. kontrol memungkinkan dilakukan pemeringkatan kinerja proses pelaporan SKPD yang obyektif
6. fasilitas ringkasan eksekutif
7. transparansi fasilitas publikasi

Beberapa inovasi dalam SIMPPD:

1. Sistem *Online* berbasis *Web*
2. Sinkronisasi dan Integrasi Data SIMDA Keuangan
3. Laporan Eksekutif berbentuk tabulasi/grafik
4. Sistem Berbasis Kolaborasi seluruh SKPD
5. Penyediaan laporan-laporan SKPD dalam format PDF
6. Memanfaatkan fasilitas penyedia pada jaringan *cloud/internet*.

Manfaat utama SIMPPD yaitu pengambilan keputusan cepat, akurat dan *up-to-date*, memudahkan proses kerja dan mempercepat proses pelaporan, memudahkan instansi pemeriksa dalam proses audit fisik dan keuangan, evaluasi kinerja secara cepat dan menyeluruh, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

73. Information System for Monitoring and Control of Local Development

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
units of service innovation	BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah

Information System for Monitoring and Control of Local Development (SIMPPD) uses website technology that allows access to hardware that are connected to the internet. The public can access information on the website without having to login while task units have their access as administrator

Strategic approach proposed are as follows:

1. *The development of a tool for the standardization form filling by all task units*
2. *The need to synchronize the data*
3. *Controlling tool to guarantee the accuracy of data entry and its availability, as well its timeliness*
4. *Facilitating the task units that are underperforming,*
5. *Control tool to objectively rank the performance of the task units in reporting their activities*
6. *Facility to generate executive*
7. *Public transparency*

Its innovation aspects consist of:

1. *Web-base online system*
2. *Data integration and*
3. *Executive reporting in the shape of graphics and tabulation*
4. *Collaborative based system among all task units*
5. *The availability of task units reports in the form of PDF files*
6. *The utilization of supplier's facility through internet/cloud networks.*

The main benefits of SIMPPD are immediate, accurate, and up to date decision making; assisting the task units in ease up the process of reporting; easier access to auditing institution in performing thorough analysis on the performance of the task units; increasing public trust to local government.

74. BAPETEN Licensing Information System for Export and Import (BALIS EXIM) *Online*

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	BAPETEN
Unit Inovasi Pelayanan	

Mengingat tenaga nuklir mengandung potensi bahaya atau risiko, maka diperlukan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion untuk terjaminnya keselamatan dan keamanan pemanfaatan SRP. Perizinan pemanfaatan SRP dimulai dari sejak dilahirkan melalui impor-tasi atau produksi, digunakan, sampai penghentian atau reekspor.

Pendekatan strategis yaitu:

1. Pemantauan Proses Perizinan secara *online*
2. SMS *Center*
3. Pelayanan *On the Spot Licensing*

Ada lima strategi pelaksanaan yaitu:

1. Strategi pelaksanaan Persetujuan impor dan ekspor SRP secara *online*
2. Strategi Persetujuan Pengangkutan zat Radioaktif secara *online*
3. Strategi Penetapan Penghentian secara *online*
4. Strategi Pemantauan Proses Perizinan secara *online*
5. Strategi Pelayanan *On the Spot Licensing*

Beberapa manfaat dari inovasi ini, 1) Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengurusan izin; 2) Mempersingkat waktu layanan perizinan); 3) Kepuasan pemohon izin meningkat; 4) BAPETEN dapat mendengar keluhan langsung para pemohon izin dan melihat kondisi sesungguhnya di lapangan mengenai; 5) Menjelaskan secara detail setiap tahap Proses Perizinan; 6) standardisasi dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen Perizinan; 7) Memperjelas alur Perizinan; 8) Memudahkan transparansi dan akuntabilitas; dan 9) Pengguna dapat mengetahui dengan jelas kriteria keberterimaan Permohonan Izin

74. *BAPETEN Licensing Information System for Export and Import Online*

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	BAPETEN
units of service innovation	

Nuclear Energy Regulatory Agency of Indonesia has introduced Licensing Information System for Export and Import Online. As it was well known that nuclear energy is risky and potentially dangerous, a permit on the usage of SRP is a necessity to ensure the safety and security in SRP utilization. Permits for the usage of SRP is needed starting from the process of importing or production, utilization, discontinuation or re-export

Approaches to the implementation of the initiative are:

- 1. Online licensing monitoring*
- 2. SMS Center*
- 3. On the spot licensing*

The five strategies in implementation are:

- 1. Online approval of SRP import and export*
- 2. Online approval for transporting radioactive substance*
- 3. Online discontinuance establishment*
- 4. Online monitoring in the licensing process*
- 5. On the spot licensing services*

Outcomes of the innovation are 1) increase of efficiency and effectiveness of license processing; 2) reducing the length of the SRP license process; 3) increased satisfaction from applicants; 4) direct feedbacks from the customers, and BAPETEN can directly observe and identify requirements that are not applicable to the current condition; 5) the ability to explain in details on each stage of the process; 6) standardization of evaluation licensing documents; 7) clarify the flow of the process; 8) creates transparency and accountability; and 9) applicants have access to the criteria of documents in line with the prerequisite.

75. Satu Meja Beres Perkara, Layanan Pendaftaran dan Penjaminan Terpadu (LP2T) pada Pelayanan Rawat Jalan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Unit Inovasi Pelayanan	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Layanan Pendaftaran dan Penjaminan Terpadu di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan diawali oleh keinginan manajemen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman kepada pengguna layanan. Layanan Pendaftaran dan Penjaminan Terpadu berbeda dengan pelayanan terpadu lainnya karena:

1. pengguna layanan cukup satu kali antri namun sudah mencakup beberapa layanan
2. pengendalian dokumen rekam medis menjadi lebih terkendali,
3. *update* informasi terkait layanan di rawat jalan dikembangkan melalui sistem informasi terintegrasi antara unit-unit yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen RS RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

Tujuan LP2T untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan, dengan upaya:

1. membangun komitmen
2. melengkapi sarana prasarana utama
3. meningkatkan kualitas SDM
4. pengembangan Unit Layanan Pendaftaran dan Penjaminan Terpadu

LP2T menghasilkan layanan pendaftaran dan penjaminan yang praktis, cepat, terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi, nyaman, fektif dan efisien . Hal yang penting adalah aman dan tidak ada rekam medis yang hilang.

LP2T memiliki beberapa manfaat, yaitu terintegrasinya sistem pendaftaran dengan sistem penjaminan; tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan; meningkatnya kepuasan pelayanan dan kenyamanan pengguna layanan; dan meningkatnya jaminan kerahasiaan rekam medis.

75. One Counter and You Get Healthier in Pekalongan Regency

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kabupaten Pekalongan
units of service innovation	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Registration and Integrated Service Assurance (LP2T) was motivated by hospital management's desire to provide fast, easy, and comfortable service to patients. LP2T has distinctive features that other integrated service don't such as:

1. *Service users are only required to queue once and can be used for more than one service*
2. *Better document control by diminishing difficulties to locate patients' medical record.*
3. *Information updates regarding outpatient are done through integrated information services. It is done by involved parties by using Kraton Hospital's information management system*

LP2T achieves its goal through:

1. *Building the commitment*
2. *Completing or adding the number of the main facility and infrastructure*
3. *Improving the quality of human*
4. *Developing integrated registration and insurance service*

LP2T produces registration and insurance services that are practical, timely, integrated, technologically advanced, comfortable, effective and efficient. Special emphasis is given to ensuring that patient's medical records are safe and kept secret.

LP2T gives several benefits that include the integration of registration system and its respective insurance system; service efficiency and effectiveness; improved certainty and comfort for service users; and the guaranty provided for the secrecy of patient's medical record and its safety.

76. Sistem Informasi Ketahanan Industri

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Kementerian Perindustrian
Unit Inovasi Pelayanan	Direktorat Ketahanan Industri Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

Inovasi Sistem Informasi Ketahanan Industri terkait erat dengan elemen-elemen kerjasama industri internasional ketahanan industri, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan dan pengamanan industri.

Diseminasi data secara cepat dan *online* berbasis web bertujuan agar informasi cepat sampai pemangku kepentingan dan mempermudah kerja sama. Pendekatan strategis yang dilakukan yaitu:

1. lonjakan impor, penurunan, dan peningkatan ekspor
2. profil industry
3. prediksi makroekonomi
4. hasil litbang Kemenperin
5. Notifikasi NTMs (dikeluarkan oleh negara mitra)
6. Notifikasi perkembangan penanganan kasus tuduhan maupun inisiasi Antidumping, Antisubsidi dan *Safeguard* secara global.

SIKI mulai diterapkan dan pada tahun 2013, dibangun fitur Sistem Peringatan Dini dan fitur *e-Quick Response*. Lonjakan Impor dengan Notifikasi Peringatan Dini melalui Email dan SMS serta penetapan kriteria sebagai sinyal bagi pengguna untuk menghadapi ancaman kondisi lonjakan impor.

Manfaat yang dihasilkan dengan dikembangkannya sistem informasi *online* berbasis *web* serta notifikasi peringatan dini adalah lonjakan impor dan informasi kondisi produk industri dalam negeri diperoleh sangat cepat. Pengguna dapat menghemat biaya dan tenaga, dan selalu *aware* terhadap kondisi produk industri binaannya ataupun produk yang dihasilkan.

76. Industry Resilience Information System

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Kementerian Perindustrian
units of service innovation	Direktorat Ketahanan Industri Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

Ministry of Industry has launched the Industry Resilience Information System (IRIS). It is closely related to the industrial collaboration elements of international industry resilience, norms, standards, procedures and criteria, technical assistance and evaluation in the sector of barrier handling and industry safeguard\.

Quick data dissemination and an online web based intended to conveys information quickly to stakeholders, and to ease cooperation. Strategic approaches are:

1. The increase and decrease of import and export.
2. Industry profile.
3. Macro economy forecast.
4. Research reports from Ministry of Industry
5. NTMs information (published by partner countries)
6. Notification of the development in case handling and initiation relating to Anti-dumping, Anti subsidy and global safeguard measures.

IRIS has been implemented since 2013, together with the development of Early Warning System and the e-Quick Response feature. The surge of imports is notified through the early warning notification by email and SMS and through the establishment of the performance indicator for the to be utilized in facing the threat of surge of import.

Outcomes resulted from the development of online web based information system and notifications from early warning system are information related to import surge through email and SMS gateway. User can save expense and energy, and would always be aware of the condition of the industrial product under its care or industrial products produced.

77. SMART POL PP (Sarana Masyarakat Berpartisipasi Aktif Mendukung Tugas SATPOL PP)

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Unit Inovasi Pelayanan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Email tibum_jtgprov@yahoo.com

Terbatasnya jumlah pegawai Satpol PP di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Satpol PP Provinsi Jateng membentuk Kader Siaga Tramtib di Desa/Kelurahan.

Agar makin berkiprah, perlu diupayakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan cara terintegrasi dan komprehensif. Strategi yang dilaksanakan:

1. Kader Siaga Tramtib sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat
2. perekrutan Kader Siaga Tramtib dari tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan elemen masyarakat yang peduli tramtibum di lingkungannya
3. Pengukuhan dan pelantikan oleh Bupati/Walikota daerah masing-masing
4. pembekalan sarana dan prasarana serta pengetahuan tentang Perda/Perkada
5. menjaga dan memelihara Kawasan dari pelanggaran Perda/Perkada
6. mengawasi, memantau, dan memelihara solusi penanganan yang dilakukan mengedepankan budaya kearifan lokal dan *win-win solution*
7. Bila terjadi pelanggaran maka tindakan KST adalah menegur, memberitahu, dan mengingatkan secara kekeluargaan

Manfaat utama yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja, dan penegakan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum dan HAM, transparansi dan akuntabilitas, kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan, kesetaraan gender, efektivitas dan efisiensi.

77. SMART SATPOL PP

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
units of service innovation	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Email tibum_jtgprov@yahoo.com

The limitation on the number of Satpol PP in Central Java Province and its regencies/cities causes problems in maintaining public order and eludes the optimal service for the society. Central Java's Satpol PP formed KSTs in villages.

An initiative is needed to integrate comprehensively different methods of maintaining public order. The strategy for its implementation includes:

1. *KST acts as the medium for public participation.*
2. *KST members are recruited from religious leaders, community figures, NOGs, and member of the society who care about public order.*
3. *KST members are recommended by heads of village and formalized as member by Regents/Mayors.*
4. *Providing KST members with equipment and knowledge of local.*
5. *Monitoring, supervising, and maintaining the areas from violations of local regulations.*
6. *The solutions taken by KST must give priority to local wisdom and win-win solution.*
7. *Upon cases of violation, KST must warn, inform, and remind the violators in ways that are non-violent and attuned.*

The main benefits of this initiative are the implementation of bureaucracy reform, the transformation of mindset and culture set, and the implementation the values and organizations of good governance. Also observed is the increasing in public participation, in the supremacy of law and human rights, transparency and accountability, public awareness as well as that of stakeholders', gender equality, and effectiveness and efficiency.

78. *Contra War* dan Sutera Emas di Kabupaten Malang

Kategori	Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Malang
Unit Inovasi Pelayanan	Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

Inisiatif “Penggunaan kontrasepsi pada wanita risiko tinggi (*Contraceptive fo Women at Risk*)”, diharapkan mampu menurunkan wanita belum menggunakan kontrasepsi, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB) secara signifikan. Program ini didukung oleh Sutera Emas (*Surveilans* Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat).

Tiga pendekatan dalam mendukung keberhasilan *Contra War*, yaitu:

1. Pendekatan Integrasi Lintas SKPD
2. Pendekatan Partisipasi Masyarakat
3. Pendekatan *Contra War* berbasis IT

Jaringan Program *Sutera Emas*:

1. Kader Kesehatan menyampaikan informasi temuan kasus kepada Bidan Desa
2. Bidan Desa melakukan *home visit* lalu menyampaikan informasi ke *server*
3. *Server Sutera Emas* mengirimkan pesan balasan melalui SMS *Gateway* disertai Tim Gerak Cepat dari Puskesmas terdekat
4. Tim Gerak Cepat dan Bidan Desa melakukan penanganan langsung
5. Apabila Tim Gerak Cepat dan Bidan Desa tidak dapat menangani kasus temuan, maka dilakukan rujukan kepada RSUD terdekat.

Manfaat utama *Contra War* adalah percepatan penurunan AKI dan AKB dan berkolaborasi dengan *Sutera Emas*.

78. Unified Society Based Epidemiology Surveillance at Kepanjen Sub-district, Malang Regency

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kabupaten Malang
units of service innovation	Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

The initiative of Malang Regency of Contraceptive for Women at Risk (*Contra War*) is expected to reduce significantly the women who have yet to use the contraceptive tools, maternal mortality, and infant mortality rate. The program is supported by *Sutera Emas* (Community-Based Integrated Epidemiological Surveillance).

Three approaches to support the goal of *Contra War* are:

1. Cross-Units Integrated Approach
2. Society participative approach
3. IT-based *Contra War* Approach

The program network of *Sutera Emas* are:

1. Health staffs submit findings of cases to the village midwife
2. Village midwives follow it up with a home visit and submits the findings to the server
3. *Sutera Emas* Server sends a reply through the SMS Gateway to the village midwives and dispatches reaction team from the nearest health center
4. Reaction team and village midwives handle the patients from the findings
5. If the reaction team and village midwife was unable to address the findings, the patients are referred to the nearest public hospital.

The main benefits of *Contra War* are accelerating the decrease of maternal mortality, and infant mortality rate and collaboration with *Sutera Emas*.

79. Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	BPS
Unit Inovasi Pelayanan	BPS Provinsi Kepulauan Riau Email iwan@bps.go.id

“Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari” adalah inisiatif aplikasi *mobile* berbasis Android yang menampilkan data dan informasi yang tersedia secara interaktif sesuai kebutuhan pengguna data. Inisiatif dibangun mempertimbangkan mobilitas pengguna sekaligus kecepatan penetrasinya di masyarakat.

Aplikasi ini meningkatkan pengalaman pengguna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat kapan pun dan dimana pun. Aplikasi dapat tersebar lebih cepat, memudahkan diseminasi informasi terkini langsung ke perangkat pengguna dan menjadi alternatif diseminasi selain PST BPS.

Strategi yang dilakukan guna memperkenalkan aplikasi ini, yaitu melakukan sosialisasi di berbagai seminar yang diadakan oleh BPS Provinsi Kepri, melalui rilis rutin oleh BPS Provinsi Kepri, melalui *website* BPS Provinsi Kepri, mendaftarkan aplikasi ini ke *Google Play* dan diseminasi di media sosial.

Manfaat utama inisiatif ini yaitu membantu diseminasi data BPS kepada pengguna dengan cepat, mudah, dan sederhana. Kemajuan teknologi perangkat mendorong BPS Provinsi Kepri untuk mengembangkan pelayanan berbasis *android*. Cukup menggunakan *smartphone*, data yang tersedia siap dimanfaatkan. Manfaat langsungnya adalah pengguna dapat mengakses tanpa PC atau laptop. Dimana saja dan kapan saja diperlukan, data dan informasi statistik bisa diakses.

79. Android Application Riau Island's Data on Fingertip

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	BPS
units of service innovation	BPS Provinsi Kepulauan Riau Email iwan@bps.go.id

Android Application of Riau Island (Kepri) Data on Fingertips is an Android-based mobile application that displays data and information in interactive ways as needed by users. This initiative was developed while taking into account its users mobility and the speed at which it can penetrate the society.

The application enhances users experience in obtaining data and information more quickly and accurate anytime anywhere. Its use can spread very quickly, facilitates better dissemination of information directly to users' mobile devices and compliments other dissemination tools such as PST.

The strategy to promote this application is through socialization in various workshops held by Statistics Bureau (BPS) of Kepri's routine release; website; registration to Google Play and dissemination in social media.

This application is expected to assist in quicker, easier and simpler dissemination of BPS's data. The technological advancement of mobile devices has motivated BPS Kepri to develop Android-based service. BPS's statistics can be obtained with the help of smartphones that eliminates the need for PCs or laptops. Statistical information and data are now accessible anywhere anytime.

80. SIPADU STIS: Sistem Komputerisasi Pelayanan Proses Administrasi Perkuliahan Menuju STIS Berstandar Internasional

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Badan Pusat Statistik (BPS)
Unit Inovasi Pelayanan	Email syukri@stis.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. STIS bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat.

Pada tahun 2009 SIPADU mulai dibangun. Sebagai langkah awal STIS menyempurnakan aturan pelaksanaan pekerjaan yang ada, lalu dikonversikan ke dalam sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi. Pendekatan strategis yang dilakukan yaitu:

1. Jurusan Komputasi Statistik berkoordinasi dengan BAAK menginisiasi pembangunan SIPADU
2. pembangunan awal SIPADU disinergikan dengan tema-tema skripsi mahasiswa.
3. Civitas Akademika STIS menjadi narasumber dalam menginformasikan masalah sehingga usulan solusi lebih tepat.
4. Jurusan KS berkonsultasi dengan Pimpinan STIS
5. Jurusan KS bertindak sebagai *system integrator*

strategi pelaksanaan yaitu:

1. membuat prioritas implementasi
2. Tim *developer* melakukan analisis terhadap mekanisme kerja
3. STIS berinvestasi *hardware* sesuai kebutuhan SIPADU.
4. penerapan sistem dilakukan setelah skripsi mahasiswa selesai
5. penerapan SIPADU dimulai dari kegiatan pokok dan berlanjut ke kegiatan lain

manfaat utama SIPADU antara lain beban kerja jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya dan memberikan kemudahan bagi pimpinan STIS, dosen dan mahasiswa.

80. Computerized System Service for Lecture Administration at STIS

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Badan Pusat Statistik (BPS)
units of service innovation	Email syukri@stis.ac.id

Institute of Statistic (STIS) is a government-operated college under the Statistics Indonesia (BPS). STIS is determined to provide the best services to its academic community and also to the society.

In 2009, SIPADU was developed. As the first step, STIS perfected the existing standard operating procedure then converted into an integrated computer-based information system. The strategic approaches are:

- 1. Computational Statistic Faculty coordinating with BAAK initiates the development of SIPADU*
- 2. SIPADU development was synergized with the theme of student's thesis*
- 3. STIS academic community were asked to be speakers to relay problems to the management. Thus the proposed solvency would be able to tackle the source of the problems.*
- 4. KS Faculty consults with STIS management*
- 5. Ensuring the integration of the system, KS Faculty acts as the system integrator in unifying various system modules*

The implementation strategies are:

- 1. Prioritizing in implementing the system*
- 2. Developer team analyze the BAAK work procedure*
- 3. STIS invested in hardware according to SIPADU necessity*
- 4. System implementation are done after students thesis process*
- 5. SIPADU are implemented starting from the main business process and is extended to other activities.*

The main outcomes from the initiatives are the workload for units such as BAAK, faculty, UPPM, and ADUM could be reduced significantly and provide convenience for STIS management, lecturers and students

81. Sistem Layanan Informasi Terpadu

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - SMKN 1 Nglipar Email smkn1_nglipar@yahoo.co.id

SMKN 1 Nglipar Gunungkidul menerapkan inovasi “Sistem Informasi Layanan Terpadu yaitu penggabungan beberapa aplikasi program pembelajaran yang sudah ada agar lebih mudah akses dan pelaksanaannya.

Aplikasi dikemas secara baik menjadi satu kesatuan. sehingga dirasakan lebih praktis. Pengguna masuk ke *web* sekolah kemudian mengakses fasilitas yang diperlukan.

Pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1. sosialisasi tentang kemudahan mengakses layanan *EMIS*, *Edmodo*, dan pembuatan *Facebook group*
2. workshop pembuatan media belajar dan buku elektronik
3. *workshop* aplikasi SILaT
4. guru memasukkan silabus dan RPP dalam program *EMIS* dan memasukkan soal dan penilaian dalam *Edmodo*
5. siswa bergabung dalam *facebook group* mata pelajaran
6. Tim IT membuat program yang merangkum *EMIS*, *Edmodo* dan *Facebook group* sehingga mudah diakses
7. sosialisasi kepada semua warga sekolah tentang kemudahan mengakses layanan melalui SILaT;
8. evaluasi berkala.

Strategi SILaT dilakukan dengan:

1. mendengarkan keinginan *stakeholders*
2. mendengarkan keinginan Guru dan Kepala Sekolah
3. mendengar kesulitan dan permasalahan yang dialami siswa
4. menginventarisir potensi yang dimiliki sekolah

manfaat utama, yaitu: kelancaran proses pembelajaran berbasis SILaT, informasi Bursa Kerja Khusus, dan buku elektronik *MsWord* dan *Pdf*, memudahkan administrasi pembelajaran dan komunikasi untuk guru, memudahkan pengawasan untuk Kepala Sekolah dan memudahkan memperoleh bahan ajar untuk siswa

81. Integrated Information Service System

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
units of service innovation	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - SMKN 1 Nglipar Email smkn1_nglipar@yahoo.co.id

Nglipar Gunungkidul's State Vocational High School implements Integrated Information Service System (SILaT) which is the integration of several existing learning programs to provide better access and implementation

The application is integrated in one simple form that makes it more practical. To use the facilities provided in the application, users simply need access school's web page.

The creative approaches are:

- 1. Socialization of teachers, students, and other components of the schools about the ease of access provided by EMIS, Edmodo, and Facebook Group*
- 2. Workshop on the production of electronic books and learning materials*
- 3. Workshop on SILaT application*
- 4. Syllabus and learning plans data entry to EMIS and that of test questions and evaluation marks by teachers to Edmodo*
- 5. Inviting the students to join Facebook Group based on learning subjects*
- 6. The creation of the application for integrating EMIS, Edmodo, and Facebook group in one media*
- 7. Socialization to all school's components on the ease of access provided by SILaT*
- 8. Performing scheduled evaluations.*

SILaT's extensive benefit includes the facilitation it gives to learning processes; the availability of information on Special Job Offers, and electronic books in Microsoft Word and PDF formats for students to obtain quality learning materials. For teachers, SILaT provides betterment in learning administration and communication, and for the Head Master it gives better access to supervision.

82. Transparansi Informasi Pembayaran Melalui e-SP2D

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Banda Aceh
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh Email mbs17.ms@gmail.com

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi atas proses pencairan dana begitu besar. Beberapa permasalahan utama antara lain : 1) Informasi SP2D yang diperlukan masyarakat sulit diakses; 2) Sulitnya melacak posisi dokumen pencairan; 3) Belum adanya kerjasama dengan pihak Bank Aceh dalam hal penyajian informasi kepada publik.

Inovasi e-SP2D lahir dari dorongan kuat oleh masyarakat dan ditindaklanjuti secara positif. Inisiatif e-SP2D ditunjukkan oleh tiga hal.

1. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi SDM
2. Integrasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Bank Aceh dengan SIPKD Kemendagri
3. Pergerakan dokumen pengajuan pencairan dapat diakses secara *realtime* dan *upto-date*

Keluaran konkrit e-SP2D.

1. posisi dan status dokumen pencairan lebih mudah dideteksi berdasarkan pencarian nomor SPM ataupun rekening tujuan
2. mengurangi intervensi pihak ketiga terhadap verifikator dokumen pencairan
3. menghapus kemungkinan kontak langsung antara pihak ketiga dengan verifikator
4. mempercepat Bank Aceh dalam melakukan pencairan dana

Manfaat utama e-SP2D yaitu masyarakat/pihak ketiga dapat mengetahui secara langsung informasi tentang status dokumen pencairan milik mereka, meningkatnya kinerja, proses pencairan dana pada Bank Aceh jauh lebih cepat dan akurat.

82. Transparency on Disbursement Information Though e-SP2D

Category	<i>Improving Service Delivery to the People</i>
Agency	Pemerintah Kota Banda Aceh
units of service innovation	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh Email mbs17.ms@gmail.com

Society dissatisfaction with the quality of information service related to the disbursement process is very big. Existing challenges are 1) accessibility of SP2D information; 2) tracking the progress of disbursement documents due to the unsystematic records; 3) there are no cooperation between SKPKD and Bank of Aceh to present information to the public.

E-SP2D resulted from societies demand for transparency, which was followed up positively. The creativity and innovation are shown in three points:

- 1. Budget Efficiency and Human Resource Optimization*
- 2. System integration between Bank of Aceh, and Ministry of Domestic Affairs SIPKD*
- 3. Access to real-time, and up-to-date information related to disbursement progress*

There are several outputs from the initiatives:

- 1. Disbursement progress can be well monitored using SPM number or the destination account number*
- 2. Reducing third party intervention in the verification process*
- 3. Removing potential of direct contact with the third party and*
- 4. Accelerates transfer of fund from Bank of Aceh to the destination account*

The outcomes from E-SP2D implementation are public/third party is given access to the disbursement progress; they can monitor the progress of SPM submitted to SKPKD, helps in reducing the workload of officials as the task was well systemized and administrated and accelerates the time taken by Bank of Aceh to transfer the fund to the destination account.

83. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / Call Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Boyolali
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Kontak 081325236328 Email pututwnskm@gmail.com

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang berisiko besar terhadap bencana. Ini menimbulkan kondisi kegawatdaruratan yang perlu penanganan cepat dan tepat. Penanganan kegawatdaruratan di bidang kesehatan memerlukan persiapan dini. Saat ini sedang dikembangkan SPGDT *online* sehingga masyarakat bisa mengakses layanan ketersediaan sarana kesehatan di rumah sakit.

Inovasi SPGDTs/*Call Center* (0276) 119 meliputi penyediaan informasi ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit, menyediakan tim yang siap melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan ada tim siaga bencana. Petugas dibekali informasi yang memadai untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan kegawatdaruratan dan Petugas jaga memantau selama 24 jam melalui *website* SPGDT.

Pelaksanaan strategi dimulai dengan penyediaan sarana dan prasarana, petugas Dinkes jaga 3 *shift* dan berperan aktif. Keluaran yang paling berhasil adalah pelayanan 24 jam, respons cepat sehingga mengurangi risiko kematian dan kecacatan, pemanfaatan *website*, dan *Call Center* (0276) 119.

Manfaat utama SPGDT adalah 1) fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama cukup; 2) pelayanan kesehatan tingkat kedua (SDM dan sarana-prasarana) baik; 3) pelayanan kesehatan tingkat ketiga, RS siap; 4) masyarakat menilai pertolongan cepat dan tidak berbelit; dan 5) pelayanan kegawatdaruratan profesional dan bermutu.

83. Call Center 119 in Boyolali Regency

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Kabupaten Boyolali
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Kontak 081325236328 Email pututwnskm@gmail.com

Boyolali Regency populaces face a constant threat of natural disaster. It causes emergency situations that need immediate and proper responds. Emergency management in health needs early preparations. The Government of Boyolali Regency is currently developing online Integrated Emergency Management System (SPGDT) that allows the society to access information on the availability of health facilities in hospitals.

SPGDTs/Call Center 119 consists of information service on the availability of hospital's facilities; the formation of the first aid team; and disaster emergency team. The operators are equipped with adequate information for responding to emergency inquiries. Staff-in-charge also monitors the website of SPGDT 24 hours a day.

The implementation of its strategy started with the provision of facilities and infrastructure; three shifts of Health Affair Office's staff and active participation. The most successful outcomes are 24-hour service, quick responses that reduce the risk of death and disability, utilization of the website and call center (0276) 119.

The main benefits from SPGDT are 1) first stage health service facility is adequate; 2) level two of health service (human resource and infrastructures) is well; 3) level three of health service facility (hospitals) are ready; 4) the public perceives the service positively as simple and quick; and 5) professional emergency service is professional and of high quality.

84. Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Inovasi Pelayanan	Biro Adpem Setda Provinsi Kalimantan Tengah Email papp_adpemb@kalteng.go.id

Inovasi "Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah" merupakan panduan penyerapan anggaran. Tujuannya, realisasi penyerapan anggaran tercapai sesuai rencana. Sistem terdiri dari: 1) perencanaan dan persiapan dan 2) pelaksanaan penyerapan anggaran.

Sistem ini kreatif, yaitu: 1) Perda tentang penetapan APBD tahun berikutnya ditetapkan pada akhir tahun berjalan, dan setelah ada Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD proses lelang dapat dimulai; 2) Penandatanganan kontrak secara kolektif di awal tahun berjalan; 3) Seluruh SKPD diberikan target penyerapan anggaran dan membuat rencana aksi; dan 4) Pelaksanaan Rapim Bulanan mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran, menindaklanjuti, dan alternatif solusi.

Pelaksanaan strategi: 1) perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyerapan anggaran; 2) penyusunan dan pengesahan dokumendan 3) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan lelang dilakukan apabila tersedia dokumen lelang dan gambar teknis/rencana, dan RAB.

Manfaat utama SPPAPKT adalah percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah dan ekonomi menggeliat sejak awal tahun. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester I/2014 (6,69%), angka kemiskinan dan pengangguran turun. Program ini mendorong peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi SKPD serta peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan.

84. Central Kalimantan Province Budget Absorption Acceleration System

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
units of service innovation	Biro Adpem Setda Provinsi Kalimantan Tengah Email papp_adpemb@kalteng.go.id

“Central Kalimantan Province Budget Absorption Acceleration System” innovation is a guideline in budget absorption. The goal is to ensure absorption of a budget in accordance with a quarterly budget plan. The system comprises of 1) planning and preparation and 2) Budget Realization.

The system is a creative innovation as shown as 1) Regional Regulation on the stipulation of next fiscal year APBD is stipulated at the end of the current fiscal year, and after an agreement between head of region and DPRD, procurement process are started; 2) collective execution of contract at the beginning of the fiscal year; 3) Each and every SKPD is given a budget absorption target and is demanded to formulate an action plan; and 4) Routine top management meeting to evaluate budget realization,

The main benefit of SPPAPKT is the acceleration of government budget and growth of the economy at the beginning of the year. The economy growth for the first semester of 2014 is 6.69%, poverty rates, and unemployment were decreased. This program encourages improvement of coordination, integration, synchronization, and harmonization with SKPD also performance improvement by the Electronic Procurement Service and Procurement Unit.

85. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) tanpa dinding di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Unit Inovasi Pelayanan	RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Email pututwnskm@gmail.com

Berat Badan Lahir Rendah merupakan masalah yang paling sering dijumpai. Angka bayi Berat Badan Lahir Rendah yang dirawat di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo termasuk tinggi bila dibandingkan rata-rata Provinsi.

Kondisi ini memunculkan “Program Pelayanan Berat Badan Lahir Rendah Tanpa Dinding di RSUD Wates” yang berupa pelayanan tanpa sekat/tanpa batas, di dalam dan di luar rumah sakit dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan dan akses tanpa batas.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Instalasi Maternal Perinatal melalui kelas Maternal yaitu memberikan pembelajaran, kegawatan ibu hamil, tanda persalinan, dan senam hamil
2. Persalinan dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
3. Ruang Perina dan *Neonatal Intensive Care Unit* yang mampu merawat bayi Berat Badan Lahir Rendah dengan pelayanan pemberian Surfaktan, Inisiasi Menyusu Dini, *Kangaroo Mother Care*, dan ruang tunggu ibu agar sewaktu-waktu bisa bersama bayi
4. Pemantauan melalui poliklinik anak, *home visite* oleh perawat/bidan, dan kelompok Pendukung-ASI.

Dampak yang utama antara lain:

1. Angka kematian perinatal turun menjadi 7,84 % pada tahun 2014
2. Keberhasilan pelayanan Berat Badan Lahir Rendah meningkat
3. *Length Of Stay* ruang Perina menurun yang berimbas pada penurunan biaya perawatan ataupun akomodasi keluarga
4. Partisipasi masyarakat tinggi, dengan adanya kelompok Pendukung ASI

85. Low Birth Weight Baby's Program at Wates Regional Hospital in Kulon Progo

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
units of service innovation	e-mail rsud@kulonprogokab.go.id

Low birth weight is one of the most frequently encountered problems. The rate of babies with Low birth weight who were treated in Wates Regional Hospital of Kulon Progo Regency is high, compared to the provincial average.

Such conditions brought the idea of, No-Wall Services for Babies with LBW Program in a form of unlimited service, inside and outside the hospital also community development in unlimited service and access.

The activities include:

1. Maternal Prenatal Installation through the Antenatal cares with maternal classes that provide learning, the gravity of pregnant women, birth symptoms, and pregnancy exercise.
2. Delivery of Comprehensive Emergency Neonatal Obstetric.
3. Perinatology Room and Neonatal Intensive Care Unit those are able to take care of LBW babies with providing surfactant services, Early Initiation of Breastfeeding, Kangaroo Mother Care, and mother waiting room so that they can be with the baby at any time.
4. Monitoring through child clinic, home visits by nurse/midwife and Breastfeeding Mother Support Group.

The most successful outputs are:

1. The rate of prenatal mortality fell to 7.84% in 2014.
2. The success of services for babies with LBW increases.
3. Length Of Stay in Perinatology Room decreased which result in decreasing the cost of treatment or family accommodation.
4. High society participation, with the Breastfeeding Mother Support group.

86. SMS-Gateway Sebagai Inovasi Pelayanan Publik melalui Otomasi Informasi Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal di Kota Pekalongan

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Pekalongan
Unit Inovasi Pelayanan	BPMP2T Kota Pekalongan Email oss@pekalongankota.go.id

Program *SMS-Gateway* merupakan inisiatif Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan dalam mempermudah pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. Sebelumnya komunikasi dilakukan melalui surat menyurat, telepon dan pengumuman melalui radio atau *website*. Konsekuensinya yaitu *inefisiensi* waktu, tenaga dan biaya dan layanan tidak optimal.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan membuat proses penyampaian informasi dengan memanfaatkan pesan pendek sehingga penyampaian informasi lebih cepat, akurat, efisien dan efektif.

Layanan *SMS-Gateway* merupakan inovasi pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang telah ada dimana data perusahaan dihubungkan dengan aplikasi *SMS-Gateway* yang secara otomatis dapat mengirimkan SMS berupa informasi layanan sesuai jadwal, baik pada saat proses pelayanan perizinan maupun pengendalian penanaman modal. *SMS-Gateway* dapat melayani lebih dari 1.000 SMS setiap harinya, sehingga dalam kurun waktu 1 minggu (5 hari kerja) dapat menjangkau semua pemohon izin.

Program *SMS-Gateway* sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dalam pemberitahuan penerbitan izin, daftar ulang izin, dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pengusaha.

86. SMS-Gateway for Licensing Service in Pekalongan

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pemerintah Kota Pekalongan
units of service innovation	BPMP2T Kota Pekalongan Email oss@pekalongankota.go.id

SMS-Gateway Program is an initiative from Integrated Licensing Service and Investment Agency of Pekalongan Central Java in facilitating the licensing and control services of capital investment. Previously, communication was conducted through correspondence, telephone and radio announcements as well as a website. The consequences were inefficiency of time, effort, and expense also poor service

Integrated Licensing Service and Investment Agency of Pekalongan made the process of delivering information by utilizing the short messaging system to deliver information more quickly, accurately, efficient and effective.

SMS Services Gateway is the licensing service and investment control innovation by utilizing Integrated Services Management Information System application. It has existed where corporate data in is associated with the SMS-Gateway application that can automatically send SMS in the form of services information on schedule, both during the process of licensing services and investment control. SMS-Gateway can serve more than 1,000 SMS per day so that within a period of one week (5 working days) it can reach all of the applicants.

SMS-Gateway program is very useful to improve the performance in the notice issuance, permit re-registration, Investment Activities Report reporting by employers.

87. Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Memperkuat Budaya Pelayanan Prima di Kabupaten Pinrang

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pinrang
Unit Inovasi Pelayanan	Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang Email ortalasetdapinrang@gmail.com

Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang adalah inovasi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, peningkatan kinerja pemerintah, dan pelayanan publik.

Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan menyediakan sistem, dan prosedur yang memungkinkan segala keluhan, pengaduan, ataupun protes dapat dikelola dengan baik sehingga. Sebelumnya masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pengaduan antara lain karena frustrasi atau pesimisme; keengganan menyampaikan pengaduan langsung; keterbatasan waktu pimpinan untuk mendengarkan sendiri pengaduan; dan penanganan pengaduan masih berbentuk manual.

Pengadu diberi akses untuk mengetahui status tindak lanjut dari pengaduannya. Agar waktu yang dibutuhkan untuk menangani pengaduan lebih singkat dan biaya lebih sedikit, maka penanganan pengaduan dilakukan dengan memanfaatkan internet dan menggunakan aplikasi pengaduan yang terintegrasi. Selain itu disediakan tempat khusus pelayanan pengaduan masyarakat yang nyaman dengan Petugas yang diseleksi dan wajib memenuhi beberapa kriteria sehingga cakap dalam menangani pengaduan.

Manfaat utama yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

87. Information and Complaint Center in Pinrang Regency

Category	<i>Improvrmnt in Delivering Service to Society</i>
Agency	Pemerintah Kabupaten Pinrang
units of service innovation	Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang Email ortalasetdapinrang@gmail.com

Information and Complaint Center of Pinrang Regency South Sulawesi is an innovation that provides opportunities for people to participate in the monitoring of development programs, increasing government performance and public service.

Information and Complaint Center provides systems, and procedures that allow any complaint, grievance, or protests can be managed properly. Previously, society has limitations in submitting a complaint due to frustration or pessimism; reluctance in filing complaints directly; limited time of leader to listen to their complaint; and the handling of complaints still manual.

The complainant was given access to know the status of the follow-up of their complaint. To reduce time and cost to handling complaints, the Internet, and integrated complaint applications are being utilized. It also provides a special place that is convenient with selected officers who must fulfill several criteria so that they can be proficient in handling complaints.

The main benefit is the increased participation of society in the delivery of public services; increasing the efficiency and effectiveness of handling of complaints; and public satisfaction towards public services.

88. Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014

Kategori	Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang inovatif
Instansi	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

GERakan pemBANGunan Rakyat Aceh Jaya diluncurkan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa, santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014. Program ini didasarkan atas rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Beberapa masalah pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya:

1. rendahnya motivasi siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas
2. rendahnya dukungan pemerintah
3. banyaknya anak usia sekolah khususnya yang berasal dari keluarga miskin belum memperoleh pendidikan yang layak
4. rendahnya Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan
5. keluarga rentan ekonomi lemah yang mempengaruhi pola pikir terhadap pentingnya pendidikan bagi anak

Beasiswa diberikan tanpa memandang status, mengedepankan azas keadilan dan pemerataan pendidikan, disalurkan secara langsung untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. penyusunan anggaran
2. penetapan SKPD sebagai pelaksana
3. penyusunan dokumen kegiatan
4. legislasi
5. kajian pengeluaran dana
6. pencairan dana dan penyaluran
7. monitoring dan evaluasi

Manfaat utama yaitu meningkatnya angka partisipasi sekolah, motivasi dan komitmen orang tua untuk menyekolahkan anak, dukungan positif dari berbagai lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan siswa, jumlah lulusan, dan kepercayaan masyarakat.

88. Aceh Jaya Cerdas Scholarship Year 2014

Category	<i>Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
units of service innovation	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

Development Movement of Aceh Jaya Nangroe Aceh Darussalam has been launched with the provision of education financial assistance to students, pupils and college students in all level of educations, through Program Aceh Jaya Cerdas Scholarship Year 2014. This program was based on the low participation of school-age population for continuing education.

Some of the problems of education in Aceh Jaya Regency are:

- 1. The low motivation of pupils and students to improve quality.*
- 2. Lack of government support.*
- 3. A huge number of school-aged children, especially students who come from poor families who do not enjoy a decent education.*
- 4. Low Net Participation Ratio in all levels of education.*
- 5. The existence of vulnerable low-income families that affect the mindset about the awareness of the importance of education for children.*

The scholarship is given regardless of status, promoting the principles of fairness and equality of education and channeled directly to ensure that it is well targeted. The steps of implementation are as follow:

- 1. Budgeting*
- 2. Establishing SKPDs as executor*
- 3. Document preparation*
- 4. Legislation*
- 5. The study of the disbursement of funds*
- 6. Disbursement and distribution*
- 7. Monitoring and evaluation*

The main benefits are the following. The school participation rate increases. The motivation and commitment of parents to send their children to schools increases. Positive supports from many people come. The quality of education of students increases. The number of graduates increases, as well as the public trust.

89. Katresna Sadaya - Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu dan Anak

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kota Bandung
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kesehatan Kota Bandung - Puskesmas Kopo Email e.edywar@gmail.com

Berdasar hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 angka kematian ibu meningkat cukup drastis. Penyebab kematian ibu sebenarnya dapat dicegah apabila diketahui sejak dini. Banyak kasus kematian ibu dan bayi terjadi di level keluarga, akibat keterlambatan mengenali tanda-tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan untuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas Kopo, didukung Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan terobosan melalui Katresna Sadaya.

Katresna Sadaya berasal dari bahasa Sunda, yang artinya kasih sayang/kepedulian semua, adalah wujud perpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kearifan lokal yang mengakar pada budaya masyarakat Sunda, dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan mempercepat penurunan jumlah kematian ibu dan anak.

Lingkup Katresna Sadaya yaitu:

1. pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan
2. peningkatan minat baca ibu
3. mendorong peran serta dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu.

Dampak yang paling berhasil yaitu meningkatnya *community awareness* terhadap kesehatan ibu dan anak, meningkatnya cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak dan pengetahuan dan kemampuan ibu untuk memutuskan pelayanan kesehatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu; dan meningkatnya kualitas pelayanan.

89. Society Movement Concerning Mother and Child Health

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kota Bandung
units of service innovation	Dinas Kesehatan Kota Bandung – Puskesmas Kopo Email e.edywar@gmail.com

Based on the results of Demographic and Health Survey in 2012, the maternal mortality rate increased quite dramatically. Causes of maternal mortality can be prevented if known early. A lot of cases of maternal and infant mortality occur at the family level, due to delays in recognizing danger signs and a late decision to refer to a health care facility. Public Health Center Kopo, supported by Bandung City Health Office, make a breakthrough through “Katresna Sadaya”

Katresna Sadaya is derived from the Sundanese, which means “love/care for all”. It is a form of fusion of community empowerment in health with local wisdom rooted in the culture of Sundanese. It aims to improve maternally and child health and accelerate the reduction in the number maternal and child mortality.

The scopes of *Katresna Sadaya* are:

1. Empowering the community to act as the subject of health development.
2. Increasing of mother’s interest in reading.
3. Encouraging participation and creativity of the community in an effort to increase community participation in using Integrated Health Center.

The most successful outcomes are the following. The community awareness of the health of mothers and children increases. The range of services for mothers and children increases. Mother knowledge and ability to quickly decide the health services increases, the community participation in using the Integrated Health Center and improving the quality of service increases.

90. Pemanfaatan Aset Terbengkalai Solusi Peningkatan Kreativitas Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Unit Inovasi Pelayanan	Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian (BBPLK) Jakarta Email bbplatrans@yahoo.co.id

Inovasi Pemanfaatan Aset Terbengkalai dijadikan salah satu solusi peningkatan kualitas SDM dengan cara menyinergikan aset-aset Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian yang belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini dilakukan dalam sebuah konsep lahan *Demonstration Plotting* dengan memanfaatkan lahan terbengkalai, modul-modul ajar, sumber dana, peralatan dan perlengkapan serta *website*.

Pendekatan program meliputi:

1. Penyediaan Kawasan terintegrasi
2. Pembagian Lahan dalam bentuk *Demonstration Plotting* disesuaikan dengan tema modul ajar yang akan di uji coba
3. Pembagian tupoksi personil
4. Pemberian nama tematik lahan
5. Lahan tidur menjadi lahan hijau, indah dan menghasilkan produk

Pelaksanaan strategi dimulai dengan penataan struktur organisasi dan personil, kemudian dibuat kegiatan jangka pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Intinya komunikasi, memperbanyak kegiatan, dan kemitraan mengubah pola pikir dan budaya kerja.

Manfaat utama adalah termanfaatkannya lahan terbengkalai; aktualisasi keilmuan PSM; terbentuk tenaga implementator yang kreatif dan inovatif, masyarakat ikut menikmati pelatihan dan percontohan, panen memberi hasil keuangan, dan pelaksanaan bimtek makin sering.

90. Utilization of Abandoned Asset

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
units of service innovation	Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian (BBPLK) Jakarta Email bbplatrans@yahoo.co.id

The innovation on the utilization of abandoned asset in Transmigration Training Development Center is used as a solution to increase the human resource quality by synergizing abandoned assets in in Transmigration Training Development Center which were previously not utilized optimally. It is done in the concept of Demonstration Plotting by utilizing abandoned land, modules, funding, equipment and website.

Approaches undertaken are:

- 1. Providing an integrated area*
- 2. Dividing the land into demonstration and adapting them to each training modules*
- 3. Dividing the main task and function of personnel*
- 4. Thematic naming for each demonstration plotting*
- 5. The land that was previously dormant was transformed into a lush and beautiful land that produces the harvest*

Main outcome from the innovation are the utilization of abandoned land, actualizing PSM knowledge, the formulation of creative and unique implementer, training modules, society enjoys and able to participate in training and demonstration, profit from harvest of demplot, and the increase in technical assistance frequency.

91. Taman Pintar, Science Center Sebagai Sarana Literasi Sains Masyarakat

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Yogyakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Taman Pintar Kota Yogyakarta Email yosie@tamanpintar.com

Pembangunan Taman Pintar dilatarbelakangi kenyataan bahwa pada skala internasional, anak-anak Indonesia ternyata memperoleh skor tes literasi sains yang sangat rendah. Artinya kemampuan sains baru berada pada tahap mampu mengenali sejumlah fakta dasar, belum sampai pada tahap mampu mengomunikasikan dan menerapkannya.

Pemko Yogyakarta berinisiatif menyediakan sarana pembelajaran berbasis literasi sains, melalui pembangunan sebuah *science center*, yang berlokasi di jantung Kota Yogyakarta. Keunikan Taman Pintar antara lain arsitektur bangunan dan desain interior membuat ceria anak-anak, iptek, budaya dan kearifan lokal, dan zona budaya.

Strategi pelaksanaan dimulai dengan pencarian dan penentuan lahan, kemitraan pemda, dunia usaha/swasta dan masyarakat; pengembangan wahana dan konten, memicu minat anak-anak untuk belajar lebih intensif di luar sekolah, kompetisi sains di bidang robotik dan roket air, dan *science show* ke berbagai sekolah dan ruang publik, informasi melalui rubrik khusus pada media lokal.

Manfaat utama Taman Pintar menarik minat anak-anak, pelajar dan mahasiswa, Pembelajaran budaya dan kearifan lokal, ekonomi, dan teknologi. Di samping itu dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan literasi masyarakat, pelajar dan anak-anak, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja maupun kesempatan *multiplier effect* dari pengunjung yang datang.

91. Science center for Society Science Literacy

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kota Yogyakarta
units of service innovation	Taman Pintar Kota Yogyakarta Email yosie@tamanpintar.com

The initiation of Smart Park was based on the fact that in international level, Indonesian is among the five lowest scoring nation in children science literacy index. It means that ability was only to recognize basic facts, with almost no capability to communicate and implement them

Yogyakarta City Government initiated a science-literacy-based learning facility, by building a science center located in the heart of the city. Among its uniqueness are its fun-themed exterior and interior; its accommodation of science, technology, culture and local wisdom; and its status as a cultural zone.

Its implementation strategies are: location search; creating a partnership between the government, business enterprises, and the society; procurement of its exhibits; the development of rides and contents; socializing the need for children to retrieve knowledge outside of schools; science competitions on robotics and water rocketry; and science shows in various schools and public spaces, information dissemination in special features of local media

Smart Park's advantages are increasing children, school student, and college students' interest in science; providing local wisdom and cultural learning, contribution to the economy, technology, and tourism. It also contributes to the local economy, society, and children's science literacy, and to the creation of jobs as well as the chance to create multiplier effect from visitors

92. Rumah Pajak untuk Anak mengajak Anak Kenal dan Cinta Pajak sejak Dini

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Keuangan
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

KPP Pratama Demak berinisiatif membuat “tempat yang nyaman” bagi anak-anak sehingga tidak merasa bosan ketika diajak orang tuanya ke kantor pelayanan pajak. Tempat yang nyaman ini berupa inovasi “Rumah Pajak Untuk Anak” yaitu ruang bermain untuk anak dan pengenalan dini tentang pajak. Inovasi ini sekaligus memberikan edukasi perpajakan kepada anak usia dini dan memberikan citra yang ramah dan menyenangkan tentang KPP.

Orang tua yang melaporkan pajaknya setiap bulan dengan suka rela mengajak anaknya ke KPP karena anak-anaknya terhibur dan mendapatkan edukasi sebagai generasi penerus yang bangga dan cinta pajak.

Rumah Pajak Untuk Anak diisi aneka mainan anak-anak dengan tema pajak dan bisa digunakan sebagai ruang belajar saat anak usia masih dini.

Strategi pelaksanaan kegiatan yaitu Rumah Pajak Untuk Anak menyatu dengan ruang pelayanan, anak-anak bisa mengetahui dan belajar tentang pajak, mewarnai gambar bertema pajak, permainan berbasis pajak, foto berlatar belakang pajak, komik pajak, edukasi pajak, budaya baca pajak, *family time* meningkatkan komunikasi dengan anak.

Keluaran konkret: orang tua WP antri dengan tenang dan anak-anak senang bermain, anak-anak bisa menyebarkan Rumah Pajak Untuk Anak kepada teman-temannya, kesan ramah, konsep baru pelayanan prima, pelayanan berkualitas untuk semua. Manfaat utamanya orang tua tidak terganggu, anak-anak merasa senang belajar bermain, ramah dan terbuka bagi masyarakat luas.

92. Tax House for the Children

Category	<i>Promoting Collaborative Approach Based Government in Information Era</i>
Agency	Kementerian Keuangan
units of service innovation	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

KPP Pratama Demak initiated to create a comfortable place for the children to avoid them being bored while accompanying their parents. The comfortable place is an innovation called Tax House for the Children, a playing area and a place to introduce taxation to the children from the early age. At the same time, the innovation provides tax education and creates a friendly image of the office to the children of early age. Parents who file their monthly tax reports would gladly bring their children along, as the children enjoy their stay, moreover gains an introduction to tax as a proud and tax embracing generation.

RPUA are filled with various kinds of toys with tax theme and can be used as a learning place for children

Implementation strategies are: integrating RPUA together with the room that provides the services, children can know and learn about taxations, tax themed picture coloring, tax based games, taking pictures using tax theme as the background, tax comics, taxation education, developing taxation reading culture, and family time helps in increasing communication between parents and child.

Concrete outputs are taxpayers who are parents are composed while the children can play on their own, the children would be able to spread the existence of RPUA to its peers, friendly image, a new concept of excellent services, and quality services for all. The main benefits are parents are not disturbed, children feel happy playing and studying, friendly and open to general public.

93. Pelayanan Pendidikan Melalui Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru (SITJB)

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Kementerian Luar Negeri
Unit Inovasi Pelayanan	Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Email dewilestari@kemlu.go.id

Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru gratis kepada anak-anak Indonesia di Johor Bahru, khususnya anak-anak Buruh Migran Indonesia. Untuk mengantisipasi penangkapan dalam perjalanan pergi dan pulang sekolah, anak-anak diantar dan dijemput dengan kendaraan dinas konsulat yang bebas dari kemungkinan *roadblock* dan razia. Anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan setara dengan pendidikan formal di Indonesia dan ijazah kelulusan diakui sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak menunjukkan perkembangan positif baik secara akademis maupun social. Mereka juga secara perlahan mulai menyesuaikan dengan kultur dan bahasa Indonesia.

Program ini dibungkus sebagai *Indonesian Community Center* sehingga tidak dikenakan ketentuan terkait prosedur pendirian sekolah internasional.

Kegiatan akademik dilakukan melalui koordinasi dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Buku laporan hasil belajar diisi oleh guru kelas dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sosialisasi keberadaan sekolah dilakukan secara *door to door*. Dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 50 anak yang mengikuti pendidikan di SITJB.

Program ini merupakan solusi pendidikan bagi Buruh Migran Indonesia di Johor Bahru dengan kemampuan keuangan terbatas. Manfaatnya terlihat dari jumlah anak yang meningkat dan bisa melanjutkan pendidikan baik di Malaysia maupun di Indonesia.

93. Education Quality Service through Indonesia Open School Johor Bahru

Category	Promoting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Kementerian Luar Negeri
units of service innovation	Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Email dewilestari@kemlu.go.id

Indonesia Open School Johor Bahru gives free education to Indonesian children in Johor Bahru, especially those of migrant workers'. Children who often don't have a legal permit to live in Malaysia are given free transportation from their residing places to school in order to avoid apprehension by Malaysian authorities. Indonesian children obtain educational equality with children in Indonesia, with both their grade and diplomas can formally be used in Indonesia so they can continue their education at the proper level. Indonesian children in Malaysia show development in their academic and social skills. They also start to show better familiarity with Indonesian culture and language.

Institutionally, it is operated as Indonesian Community Center, therefore, can be excluded from international school category thus is not required to fulfill an extensive requirement of operating one.

Its academic activity is operated under the coordination with SIKL. School reports are graded by the teachers and also signed by the Principle of SIKL. Distributing brochures and information door to door does SITJB's promotion and socialization. In less than one year, it has already admitted 50 students.

SITJB is the solution for child education problems faced by migrant workers. The number of children who are qualified for advanced education in Malaysia and Indonesia has shown its beneficial effect on the society.

94. Reformasi Sistem Pelayanan Yang Bersifat Represif Menjadi Humanis

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Bontang
Unit Inovasi Pelayanan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

Inisiatif “Reformasi Sistem Pelayanan Yang Bersifat Represif Menjadi Humanis” terfokus pada perubahan sistem pelayanan yang mengedepankan penindakan secara represif menjadi lebih humanis dan santun. Mengutamakan koordinasi penerapan sistem dan interaksi dan menggunakan berbagai metode untuk meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi meliputi banyaknya pelanggaran; kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda Kota Bontang; keresahan masyarakat; penertiban yang dilakukan Satpol PP belum tuntas; kesan Satpol PP arogan dan personil terbatas.

Metode yang dilakukan meliputi penempatan 2 orang personil Satpol PP di tiap kelurahan; pendekatan aspek psikologi dan sosial; mengedepankan persamaan gender; memberikan pemahaman kepada pelaku pelanggaran; pembuatan surat pernyataan pelanggaran; dan penghargaan kepada pelaku pelanggaran yang telah mematuhi janji surat pernyataan yang dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan strategi meliputi:

1. pembagian tugas pelaksanaan sistem antara tim pelaksana dan tim pelaporan
2. proses penanganan pelanggaran perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. pemberian penghargaan

Manfaat yang diperoleh meliputi perolehan data lebih valid dan akurat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda, perubahan pola pikir masyarakat terhadap citra Satpol PP dan pola kerja Satpol PP menjadi lebih terstruktur.

94. Reforming Repressive Service System into a Humane Service

Category	Supporting Collaborative Approach Based Government in Information Era
Agency	Pemerintah Kota Bontang
units of service innovation	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

The initiative of “Reforming Repressive Service System into a Humane Service” is focused on changing repressive enforcement into a more humane and polite system. It prioritized coordination in system implementation and interaction are put forward, and it utilizes various methods to increase of trust and society participation.

Problems that happened includes the numbers of local regulation violation, lack of society understanding on Bontang City Regulation, society anxiety to the widespread of disorder and disrupt of peace; Satpol PP enforcement that was yet to be fully resolved, the images that Satpol PP are arrogant and lacking staff.

The methods are: placing 2 Satpol PP staffs in every villages; social and psychological aspect approach; putting forward gender equality; providing understanding to the offender; making a statement of offence; and appreciation to the offenders who had complied with statements that was made.

Strategy implementation includes:

1. Dividing the tasks in the system into enforcer team and reporting team
2. Handling of local regulation offence, and disruption of peace and orders
3. Appreciation

The outcomes include a more valid and accurate data, improving societies understanding to the local regulation, the change of society mindset on Satpol PP images and Satpol PP work pattern was better structured.

95. Tabungan Emas Hijau untuk Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD dan ABK Kecamatan Ponjong

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Unit Inovasi Pelayanan	Gugus PAUD VI Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Email fx.iriantonno@yahoo.com

Tabungan Emas Hijau Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Anak Berkebutuhan Khusus Kecamatan Ponjong adalah inovasi penanaman 1000 pohon di Kecamatan Ponjong, Gunungkidul untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Anak Berkebutuhan Khusus kepada masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga mitra dan para praktisi.

Sebelum inovasi ini, Gugus PAUD VI tidak punya cadangan dana jangka panjang dan terdapat lahan yang kurang maksimal pemanfaatannya. Program ini memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sayuran, industri rumah tangga, kerajinan batik, dan *finger painting*.

Program ini merupakan terobosan pencarian sumber dana jangka panjang dan pemanfaatan lahan kosong, dan pelatihan anak usia dini untuk mengenal, menyayangi, dan merawat tanaman, kemandirian dan keterampilan hidup; dan menyadarkan warga untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus.

Langkah-langkah pelaksanaan:

1. pertemuan rutin Forum PAUD membahas dana cadangan operasional untuk masa datang,
2. Pencanaan penanaman 1000 pohon di masing-masing desa
3. penyemaian melibatkan warga,
4. Penanaman perdana dilaksanakan bersamaan dengan acara Gebyar PAUD Kecamatan Ponjong

Dampak Berkelanjutan yaitu sumber dana yang berkelanjutan.

95. Early Childhood Education and Children with Special Needs in Ponjong District

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Pemerintah Kabupaten Badung
units of service innovation	Email fx.iriantonono@yahoo.com

The innovation is the Green Gold Savings to Improve Service Quality of early childhood education and children with special needs. The administrator is Ponjong District, Gunung Kidul. The innovation specific is to planting 1,000 trees in Ponjong District, Gunungkidul to improve the service quality of Early Childhood Education the Children with Special Needs to the public through collaboration with partner agencies and early childhood practitioners.

Problems faced before the innovation is that ECD has no long-term reserved funds, and there is a minimum utilization of land. This program utilizes the yard by planting vegetables, making home industries, producing batik, and finger painting.

This program is a breakthrough to find a long-term source of funding and utilization of vacant land. It also provides early childhood training to know, love, and caring for plants, independence, and life skills; and build society awareness to educate children with special needs.

The implementation steps are:

1. Regular meetings of ECD Forum to discuss reserve fund for future operations.
2. The declaration of planting 1000 trees in each village.
3. Seeding involves citizens.
4. Initial planting was held in conjunction with the ECD Celebration of Ponjong District.

Sustainable Impact is a sustainable source of funding.

96. Pelayanan Prima Bankable

Kategori	Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi
Instansi	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Email saloma_74@yahoo.com

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebelum dilakukan sistem *bankable*, pelayanannya masih manual namun setelahnya dapat diproses pada saat itu juga melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan proyek Pemkab Aceh Jaya sangat mengharapkan agar dapat diproses lebih cepat namun permintaan ini sangat sulit untuk dipenuhi, karena birokrasi masih panjang, pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi terbatas dan belum terintegrasi, pemahaman petugas terhadap aturan yang menyangkut tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan masih kurang.

Bupati mengusulkan agar dibentuk satu unit khusus menangani proses penerbitan SP2D dengan langkah sebagai berikut:

1. membentuk unit kerja khusus sebagai tempat pelayanan tunggal
2. memangkas alur birokrasi
3. membangun jaringan
4. pelatihan secara rutin kepada semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
5. menyusun Peraturan tentang SOP; menyiapkan ruangan khusus untuk dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai; menyiapkan Tower khusus dan perangkat dan menyiapkan Kartu Identitas Petugas

Keluaran pelayanan yaitu penerbitan dan pencairan SP2D yang diproses lebih cepat dan terkontrol dan penyusunan laporan diproses lebih cepat, dan tidak ada lagi pembayaran yang melewati tahun anggaran.

Manfaat utama pelayanan *bankable*, memberikan kemudahan dalam kepengurusan pencairan dan perubahan waktu penyelesaian menjadi dalam hitungan jam.

96. Bankable Excellent Service

Category	<i>Promoting Collaborative Approach Government in the Information Era</i>
Agency	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
units of service innovation	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Email saloma_74@yahoo.com

The service for Fund Disbursement Order (SP2D) before the bankable systems was still manual but after, it can be processed at that time through the Regional Management Information System Application.

The third parties who carry out projects in Aceh Jaya Regency expected that the paperwork process is faster. However, this demand is difficult to accomplish. The bureaucracy procedure is complicated, the implementation of financial management is limited, and the personnel do not understand the rules of the financial management and implementation.

The Regent proposed to establish a special unit to handle the issuance process with steps as follow:

- 1. Establishing a special unit as a single service place.*
- 2. Detruncating bureaucracy.*
- 3. Establishing an integrated.*
- 4. Regular training to all personnel involved in the financial management.*
- 5. Prepare the decree about sops, prepare a special room equipped with facilities and infrastructure; prepare special tower and online software and unit officers identity card.*

The Outputs include issuance and disbursement of SP2D that is processed faster and more controlled; the time required to process the issuance and prepare reports processed more quickly, and no more payment made after the fiscal year.

The main benefit of bankable services is to provide convenience in terms of good stewardship of the disbursement of funds and changes in the completion time to be in a matter of hours.

97. Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai asas tata kelola pemerintahan

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Surakarta
Unit Inovasi Pelayanan	Unit Layanan Aduan Surakarta Email bagorska@yahoo.co.id

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen membentuk Unit Layanan Aduan Surakarta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan yang sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk merespons pengaduan masyarakat guna menangani pengaduan dan ketidakpuasan masyarakat.

Program ini berbasis *web* dan respons pengaduan cepat dengan semua kanal aktif, sehingga masyarakat bisa memilih kanal termudah. Aduan pada semua kanal akan dilayani dan semua aduan yang masuk akan di *forward* ke *Website* agar semua orang mengetahui aduan yang masuk beserta jawabannya melalui *website*. Dalam aplikasi ini terdapat sistem yang terintegrasi antara pengelola dengan admin masing-masing unit.

Proses pelaksanaan program meliputi penyiapan aplikasi; penyiapan pengelola; super Admin sebagai koordinator aplikasi; pengelolaan pengaduan; dan jawaban atas pengaduan dilakukan cepat oleh pejabat terkait.

Berkat aplikasi ini masyarakat mudah mendapatkan jawaban dan terbantu atau terfasilitasi cepat aduannya. Dengan program ini pengaduan masyarakat meningkat dan respons pengaduan diberikan secara cepat. mendorong transparansi pelayanan, pelayanan berkualitas menuju prima, mendidik kejujuran dan kedisiplinan, membangun kepercayaan publik kepada pemerintah, serta wadah atau mediasi pengaduan masyarakat.

97. Surakarta Complaints Service Unit

Category	<i>Improvement in Delivering Service to Society</i>
Agency	Pemerintah Kota Surakarta
units of service innovation	Unit Layanan Aduan Surakarta Email bagorska@yahoo.co.id

Government of Surakarta Central Java committed to forming Surakarta Complaints Service Unit. It aims to improve the quality and ensure the provision of services in accordance with the principles of good governance as well as to respond to society complaints to address complaints and discontents.

This program is web-based and response quickly to complaints with all channels activated so that people can choose the easiest channel. The complaint shall be served on all channels, and will be forwarded to the Website so that everyone knows all the complaints that came and the answer via the website. In this application, there is an integrated system between managers with an administrator in each unit.

The organizing processes cover preparation of the application; the preparation of the administrators; Super Admin as coordinator; complaint management; and a quick answer to a complaint made by a relevant authority.

Because of this application, public can easily get a straight answer from the officials in charge and transparency of complaint. This program assists people by filling their complaint quickly. It encourages transparency of services, high quality of service towards excellence, educate honesty and discipline, build public confidence in government, as well as medium or mediating complaints.

98. Ketuk Pintu Rumah Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
Unit Inovasi Pelayanan	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Email msdbell10@yahoo.com

Badan Pertanahan Nasional meluncurkan kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah dengan cara mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah dan melakukan pendataan dengan memberikan formulir kelengkapan berkas kepada setiap penduduk, meneliti berkasnya, dan menghitung besaran biaya yang wajib dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku, dilakukan sendiri oleh penduduk yang didatangi. Apabila persyaratan dipenuhi, dilaksanakan pengukuran. Setelah itu pemilik tanah diberi kesempatan beberapa hari untuk melengkapi dan menyelesaikan berkas permohonannya, sebelum petugas dari kantor pertanahan datang menjemput berkas sekaligus menerima biaya pengurusan tanah. Inovasi ini menghilangkan percaloan pengurusan sertifikat tanah.

Output yang paling konkret adalah: 1) meningkatnya penerbitan sertifikat hak atas tanah; 2) meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan administrasi pertanahan; 3) meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 4) meningkatkan pemetaan tanah yang sudah bersertifikat ke dalam aplikasi GEO-KKP terintegrasi secara nasional.

Dampaknya antara lain;

1. peningkatan layanan yang signifikan
2. tidak ada sistem percaloan.
3. kurangnya sengketa penguasaan dan pemilikan tanah
4. perubahan pola pikir masyarakat
5. jika terjadi sengketa tanah di lapangan, diupayakan mediasi penyelesaian langsung dengan bantuan pemerintah setempat

98. Door Knocking of Land Office of Selayar Island

Category	Improvement in Providing Service to Society
Agency	Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN
units of service innovation	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Email msdbell10@yahoo.com

Land Office of Selayar Regency launched People Services for Land Certification program. The project administrators are visiting the community from door to door. They are collecting data by giving form to every resident. After examining the file, they calculate the amount of fees as regulated by law. Carried out by the residents who are attended.

After that landowners were given the opportunity for a few days to complete and finish the application file, before the officers of the land office came to pick up the file and at the same time receive handling costs. This innovation eliminates intermediaries/middlemen in arranging the land certificate.

The most concrete outputs are:

- 1. Increase in the issuance of certificates of land rights.*
- 2. Increasing the public understanding of the law and land administration.*
- 3. Minimize disputes, conflicts and land matters.*
- 4. Improve the mapping of land.*

The impacts are as follow:

- 1. A significant increase in services*
- 2. No brokering system.*
- 3. Lack of land tenure and land ownership dispute.*
- 4. Change the mindset of the people.*
- 5. If there is a land dispute in the field, attempted mediation settlement directly with the help of local government.*

99. SWAT – Solid Waste Transportation (Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah)

Kategori	Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Instansi	Pemerintah Kota Surabaya
Unit Inovasi Pelayanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Email vieka.ariestyani@gmail.com

Masalah persampahan di Kota Metropolitan adalah salah satu hal yang penting untuk diatasi. Volume sampah Kota Surabaya signifikan bertambah sementara pengangkutan sampah menggunakan armada yang jumlahnya terbatas, sehingga Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif membangun manajemen pengangkutan yang efektif dan pengawasan yang intensif untuk memudahkan evaluasi penanganan persampahan.

Sistem manajemen ini dinamakan *Solid Waste Transportation* yaitu sistem manajemen pengangkutan sampah terkomputerisasi, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, *online* 24 jam, versi tablet dan *mobile*, menampilkan data secara *realtime* sehingga memudahkan pengawasan penanganan sampah.

Keluaran program yaitu pengendalian pembuangan sampah ke TPA, Efisiensi pemakaian BBM Kendaraan Angkutan Sampah, Efektivitas Rute dan Ritase Pengangkutan Sampah, Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pengangkutan sampah, dan Kinerja Supir Angkutan Sampah dan kondisi kendaraan angkutan sampah.

Manfaat utama inovasi ini yaitu proses pengangkutan sampah dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala, kemudahan verifikasi kendaraan yang masuk TPA; efisiensi BBM angkutan sampah; dan kemudahan dalam monitoring tonase/volume sampah yang masuk ke TPA. Dampak lain yaitu kepuasan pelayanan pengangkutan sampah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat.

99. Waste Transportation Management System

Category	<i>Improvement in Providing Service to Society</i>
Agency	Surabaya City
units of service innovation	Name DKP Kota Surabaya Email vieka.ariestyani@gmail.com

Waste is one of the important problems in a city. Surabaya City Government has an initiative to build an effective transport management and intensive supervision to facilitate evaluation of waste management.

This management system is called Solid Waste Transportation. It is a computerized, integrated and online waste transportation management system. It is based on information technology by using mobile and tablet version, showing the data in real time. Thus, it eased the supervision of waste management.

The outcome is as solutions to problems of: Control of waste disposal to landfill, fuel usage Vehicle Efficiency Waste, and Effectiveness of the Route and Rites of Waste Transportation, Public Satisfaction in the service of transporting waste, and Waste Transport Driver Performance and waste transportation vehicle condition.

The main benefits of this innovation are the process of transporting waste can be monitored and regularly evaluated, the ease of verification of vehicles entering the landfill; waste transportation and fuel efficiency; and ease of monitoring tonnage / volume of waste that goes to landfill. Another impact is the satisfaction of waste transporting service and clean and healthy environment.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also any other financial activities that may occur. It is essential to ensure that all entries are properly documented and supported by appropriate evidence.

In addition, the document emphasizes the need for regular reconciliation of accounts. This process involves comparing the company's internal records with the bank statements to identify any discrepancies. By doing so, the company can ensure that its financial statements are accurate and reliable.

Furthermore, the document highlights the significance of maintaining a clear and organized system for tracking expenses. This can be achieved by using a consistent coding system and keeping all receipts and invoices in a central location. This approach will facilitate the preparation of financial reports and help in identifying areas where costs can be reduced.

Finally, the document stresses the importance of staying up-to-date on changes in tax laws and regulations. This is particularly important for small businesses, as they may not have the resources of larger corporations to monitor these changes. Consulting with a professional accountant or tax advisor can help ensure that the company remains in compliance and takes full advantage of any available tax benefits.

The second part of the document provides a detailed overview of the company's financial performance over the past year. This includes a breakdown of revenue by product line and a comparison of actual results against budgeted figures. The analysis shows that while sales in the core market remained strong, there was a notable decline in revenue from new product lines.

The document also includes a discussion of the company's operating expenses, which have increased significantly due to rising costs in several key areas. This has led to a narrowing of the profit margin, which is a cause for concern. Management is currently reviewing these costs to identify potential areas for savings and cost reduction.

In terms of cash flow, the company has maintained a positive position throughout the year, which is a testament to its prudent financial management. However, the document notes that there is a need to improve working capital management, particularly in the area of accounts receivable, to ensure that cash is available to meet the company's ongoing needs.

Overall, the document concludes that while the company has achieved some success in its core market, it faces significant challenges in managing its costs and expanding into new areas. Management is committed to addressing these challenges and improving the company's overall financial performance in the coming year.

Top 99
Inovasi Pelayanan Publik Indonesia
Tahun 2015

Top 99
INDONESIA PUBLIC SERVICE INNOVATIONS
2015

Komentar dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota
Comments from the Ministry, Provincial, Regency and City

Komentar dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S. Brodjonegoro



Dengan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2015 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat memotivasi K/L maupun Pemda untuk memberikan layanan publik melalui inovasi yang sejalan dengan Nawa Cita, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Kepala BPS, Dr. Suryamin, MSc.

“Kompetisi inovasi dapat memberi manfaat positif bagi K/L, diantaranya: memberi semangat yang tinggi kepada instansi untuk mengevaluasi diri sendiri terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang berlaku sebelumnya; merangsang ASN untuk semakin memperluas pengetahuannya dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru dalam menjawab tantangan perubahan zaman, dengan memanfaatkan teknologi terkini; dan akhirnya akan menghasilkan ukuran baku yang semakin berkualitas dalam pelaksanaan proses bisnis.”



Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan



Sebagai bagian dari agenda besar Reformasi Birokrasi di Indonesia, mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar, sehingga ruang bagi lahirnya berbagai inovasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik di berbagai instansi pemerintah, perlu terus ditingkatkan dan didorong secara masif. Untuk itu, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diprakarsai oleh Kementerian PAN & RB sebagai ajang penghargaan inovasi pelayanan publik perlu mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Terbukti, melalui ajang ini, telah lahir berbagai inovasi layanan publik yang dapat menjawab kebutuhan, kepuasan, dan kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat layanan.

Bambang P.S. Brodjonegoro, Minister of Finance of Indonesia

The Competition of Public Service Innovation 2015 sponsored by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform is hoped to stimulate government agencies to provide public services that are consistent with Nawa Cita and clean, effective, democratic, trusted good government governance.

Dr. Suryamin, MSc., Head of the Indonesian Statistics Agency

Innovations competition brings the following advantages to ministries and agencies. It gives high enthusiasm to conduct a self-evaluation towards the efficiency and effectiveness of the existing business process. It stimulates public officials to broaden knowledge by learning new things and coping with challenges by using the latest technology. Finally, it produces a higher quality standard measurement in the business process.

Ahmad Heryawan, Governor of West Java

As part of the big agenda of Bureaucracy Reform in Indonesia, materialize the citizens' satisfaction towards public services is inevitable. Therefore, innovations to improve public service quality in all government agencies must be massively pushed. For the reason, Competition of Public Service Innovation sponsored by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform should be appreciated. Through this event, many innovations have emerged to answer needs of people as the public service consumers.

Komentar dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.



Kami mengapresiasi program Sinovik ini karena daerah diberi ruang seluas-luasnya untuk berkompetisi melaksanakan inovasi secara transparan dan obyektif dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas dan terukur, sehingga akan mendorong daerah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami juga menyambut baik penerbitan buku ini, yang pasti sangat berguna bagi kami untuk mereplikasi best practice inovasi di daerah lain yang tentunya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Kami berharap program Sinovik ini dapat terus berjalan sehingga dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bupati Pinrang, H.A. Aslam Patonangi, SH, M.Si

Kompetisi inovasi ini menjadi spirit dalam menciptakan *good governance* bagi pemerintah daerah untuk senantiasa menciptakan “satu instansi, satu inovasi (*one agency one innovation*), kami sangat apresiasi Kementerian PANRB atas kompetisi ini dan berharap ke depan Pemda Kabupaten Pinrang bisa menjadi pionir untuk menciptakan reformasi investasi di Indonesia.



Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT



“Sebetulnya kejuaraan itu bukan tujuan utama, yang utama adalah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Jadi parameternya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik dapat mendorong pemerintah daerah menciptakan inovasi-inovasi dalam melayani segala lapisan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman dan ekspektasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri”

Comments from the Ministry, Provincial, Regency and City

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, Banyuwangi Regent

We appreciate the Sinovik program because it provides a transparent and an objective media for local governments to compete in the implementation of innovation. The program has pushed local governments to give the best public services to the community by using clear and measurable assessment indicators. We also welcome the publication of this book because we can replicate the best practices of other local governments. Hopefully, the program continues sustainably to stimulate local governments to improve the quality of public services.

H.A. Aslam Patonangi, SH, M.Si, Pinrang Regent,

The innovation competition with the jargon of “one agency one innovation” has become a spirit for local government to commit the good governance. We appreciate the event sponsored by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. Hopefully, Pinrang Regency can be a pioneer in creating investment reform in Indonesia.

Ir. Tri Rismaharini, MT, Surabaya Mayor

The competition is not the main goal. The main goal is to improve the prosperity of the citizens. Therefore, the parameter is the improvement of citizens’ welfare. The competition of public service innovations induces the local government to invent innovations to serve the whole society. The innovation is adaptive to the changing times and people’s expectation under the framework of citizens’ prosperity.

Komentar dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota

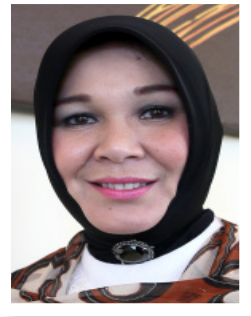
Hj. Badingah, S.Sos, Walikota Gunungkidul



Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini sangat mendorong kreatifitas daerah khususnya penyelenggara pelayanan publik untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih konkrit. Ajang kompetisi ini juga merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap upaya daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga penyelenggara pelayanan publik senantiasa termotivasi untuk memperbaiki kinerja pelayanannya. Selain itu, beberapa inovasi dari daerah lain sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran yang memungkinkan direplikasi di daerah kami. Kami berharap kompetisi inovasi pelayanan publik terus diselenggarakan setiap tahun, dan semoga beberapa inovasi dari daerah kami dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi daerah lain.

Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, SE

“SINOVIK” merupakan salah satu ajang kompetisi yang memberikan motivasi bagi kami, Pemerintah Daerah, untuk lebih aktif dan kreatif menciptakan berbagai inovasi bagi peningkatan pelayanan publik di daerah. Tantangan dan suasana kompetisi merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi terbentuknya suatu inovasi dan ide-ide kreatif. Yg terpenting bagi kami bukanlah hanya memperoleh penghargaan tetapi inovasi yg di jalankan sesuai dgn proses yang benar dan program inovasi tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan , sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. inovasi-inovasi ini kami harapkan bukan hanya sebagai bagian dari kompetisi tetapi dapat saling berbagi dengan daerah dan kementerian untuk dapat mewujudkan INDONESIA HEBAT.



Walikota Bandung, Moch. Ridwan Kamil, ST, MUD

Pelayanan publik merupakan inti dari tugas pemerintah yang diatur dengan standar tertentu. Inovasi merupakan bagian dari filosofi segitiga pilar pembangunan Kota Bandung (Desentralisasi-Inovasi-Kolaborasi). Inovasi pelayanan publik bertujuan untuk menggali potensi aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan program kerja dengan cara baru yang efektif, efisien, dan memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat dengan menerapkan konsep good governance. Kompetisi inovasi pelayanan publik diharapkan menjadi stimulant dan reward bagi aparatur pemerintah agar lebih kreatif dan thinking out of the box dalam menyelesaikan permasalahan diranah kerjanya. Inovasi Kota Bandung memberi inspirasi dan dapat direplikasi, untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Comments from the Ministry, Provincial, Regency and City

Hj. Badingah, S.Sos, Gunungkidul Mayor

We welcome and support the Competition of Public Service Innovation sponsored by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The activity stimulates the creativity of local government especially in public service to improve the quality of delivery to citizens. The competition is a reflection of the central government appreciation towards the local government's efforts to improve public service delivery to enhance the performance. In addition, other local governments' innovations are very helpful as lessons learned and can be replicated. We hope that the competition would be organized annually and wish that our innovations could be developed and bring benefits to others.

Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, Banda Aceh Mayor

SINOVIK is a competition event that gives motivation to the local government to be more active and creative in constructing many innovations to improve public service. Competition challenges and situations are motivating factors to induce innovation and creative ideas. The most important thing for us is not to get the award but to implement the innovation based on the correct procedures. Moreover, the innovation is being implemented sustainably and brings real benefits to citizens. We hope that these innovations are not only meant to compete each other but also aimed to materialize INDONESIA IS GREAT.

Moch. Ridwan Kamil, ST, MUD, Bandung Mayor

Public service is the main duty of the government as regulated by particular standards. Innovation is a part of Bandung City development's triangular pillars (Decentralization-Innovation-Collaboration). Public service innovation aims to explore potentials of government officials to accomplish program with new, effective, and efficient ways. It also provides benefits to citizens by implementing the good governance concept. Competition of public service innovations is expected to be a stimulant and a reward for government officials to be more creative and to thinking out of the box in dealing with their problems. Bandung City's innovations give inspirations to others and can be replicated to improve the public service quality.

Tim Evaluasi 2015 / Evaluation Team 2015



1. Prof. Drs. Komaruddin, MA
2. Prof. Deddy T. Tikson, M.Sc, Ph.D
3. Prof.Dr.Ida Bagus Wyasa Putra,S.H., M.Hum
4. Dr. Hardi Warsono, MT
5. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si.

6. Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.Hum
7. Susi Dwi Harjanti, S.H.,LLM.,Ph.D.
8. Dr. Lina Miftahul Jannah, M.Si
9. Dr. Hartoyo, M.Si.
- 10.Oskar Vitiano, S.E. M.PPM.

Tim Panel Independen 2015 / Panel Independent Team 2015



1. Prof. Dr. JB Kristiadi
2. Prof. Dr. Eko Prasajo
3. Prof. Dr. R. Siti Zuhro
4. Indah Suksmaningsih (YLKI)

5. Neneng Goenadi (QA RB)
6. Bambang Setiawan (Kompas)
7. Dadan S. Suharmawijaya (JPIP)
8. Nurjaman (SCTV)